



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 17 TAHUN 2016
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH
TAHUN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa Rencana Kerja Pembangunan Daerah menjadi Pedoman penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pembangunan Daerah dapat diubah untuk menyesuaikan dengan perkembangan tahun berjalan yang disebabkan sesuai kriteria yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2016;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
 2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5324);
9. Undang-Undang ...

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri

Dalam ...

- Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015;
 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi Perangkat Daerah Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kutai Timur;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kutai Timur;
 21. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur;
 22. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016;
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan ...

25. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 19 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH TAHUN 2016.

Pasal 1

- (1) Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut (RKPD) Tahun 2016 adalah Rencana Tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
- (2) Perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini memuat:

BAB I Pendahuluan

BAB II Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun sebelumnya dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah

BAB III Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah

BAB IV Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah

BAB V Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Dalam Perubahan RKPD

BAB VI Penutup

Pasal 2 ...

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2016 merupakan dokumen lanjutan dari RKPD Tahun 2016, yang disusun akibat terjadinya perubahan asumsi-asumsi dari RKPD Tahun 2016 yang meliputi: perubahan kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah.

Pasal 3

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016, digunakan sebagai:

- a. pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) Tahun 2016; dan
- b. pedoman Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Tahun 2016.

Pasal 4

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2016 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.






Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar ...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 9 September 2016
BUPATI KUTAI TIMUR,

No.	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kasmidi Bulang, S.T.,M.M.	Wabup.	
2.	Ir. Hj. Yulianti	Plt. Sekda	
3.	Drs. H. Syafruddin, M.AP.	Ass. I	
4.	Nora Ramadani, S.H.,M.H.	Plt. Kabag. Hukum	
5.	Ir. Suprihanto. CES 	Kepala Bappeda	


H. ISMUNANDAR

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PEMBANGUNAN DAERAH
(RKPD)
TAHUN 2016**



**PEMERINTAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
2016**



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1. Latar Belakang.....	1-1
1.2. Dasar Hukum Penyusunan.....	1-4
1.3. Hubungan Antar Dokumen.....	1-8
1.4. Sistematika Dokumen RKPD.....	1-9
1.5. Maksud dan Tujuan.....	1-11
BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN.....	II-1
2.1. Gambaran Umum Kondisi Daerah.....	2-1
2.1.1 Aspek Geografis dan Demografi.....	2-1
2.1.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat.....	2-20
2.1.3 Aspek Pelayanan Umum.....	2-39
2.1.4 Aspek Daya Saing Daerah.....	2-95
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Berjalan Dan Realisasi RPJMD.....	2-105
BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH.....	III-1
3.1. Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah.....	3-2
3.2. Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	3-10
3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	3-11
3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	3-18
3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah.....	3-23
BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH.....	IV-1
4.1. Program Dan Kegiatan Prioritas Daerah.....	4-1
4.2. Perubahan Rencana Kerja SKPD.....	
BAB V PENUTUP.....	VI-1



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa di Kabupaten Kutai Timur	2 - 3
Tabel 2.2	Penyebaran Fisiografi Kabupaten Kutai Timur	2 - 5
Tabel 2.3	Potensi Di Setiap Kecamatan Kabupaten Kutai Timur	2 - 7
Tabel 2.4	Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 16
Tabel 2.5	Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 17
Tabel 2.6	Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 18
Tabel 2.7	Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011-2015	2 - 19
Tabel 2.8	Perkembangan PDRB Dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2011-2015	2 - 23
Tabel 2.9	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011 - 2015 (Juta Rp)	2 - 26
Tabel 2.10	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015	2 - 28
Tabel 2.11	Persentase Penduduk Miskin Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 29
Tabel 2.12	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 31
Tabel 2.13	Rata-rata Lama Sekolah Penduduk di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 32
Tabel 2.14	Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 35
Tabel 2.15	Angka Kelahiran dan Kematian, Usia Harapan Hidup, dan Rasio Ketergantungan Tahun 2011-2015	2 - 36
Tabel 2.16	Jumlah Tenaga Kerja Di Kabupaten Kutai Timur Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014-2015	2 - 38
Tabel 2.17	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan 2011-2015	2 - 39
Tabel 2.18	Rasio Keterrersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 41
Tabel 2.19	Rasio Guru Terhadap Murid Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 41
Tabel 2.20	Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 44



Tabel 2.21	Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 45
Tabel 2.22	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan	2 - 46
Tabel 2.23	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 47
Tabel 2.24	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 48
Tabel 2.25	Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 49
Tabel 2.26	Jumlah Posyandu dan Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 50
Tabel 2.27	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 55
Tabel 2.28	Sarana Peribadatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2015	2 - 56
Tabel 2.29	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 58
Tabel 2.30	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 59
Tabel 2.31	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 60
Tabel 2.32	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Tahun 2011-2015	2 - 61
Tabel 2.33	Capaian Aspek Pelayanan Umum Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015	2 - 63
Tabel 2.34	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanahan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015	2 - 65
Tabel 2.35	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 65
Tabel 2.36	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2011-2015	2 - 67
Tabel 2.37	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan KB dan Keluarga Sejahtera	2 - 68
Tabel 2.38	Rasio Akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 69
Tabel 2.39	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 69
Tabel 2.40	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 70
Tabel 2.41	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi dan UKM Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 72
Tabel 2.42	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 73
Tabel 2.43	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 75



Tabel 2.44	Capaian I Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudean dan Olahraga Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 75
Tabel 2.45	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 76
Tabel 2.46	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 77
Tabel 2.47	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 78
Tabel 2.48	Regulasi Ketahanan Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 79
Tabel 2.49	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 79
Tabel 2.50	Ketersediaan Dokumen Statistik di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 80
Tabel 2.51	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 81
Tabel 2.52	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 82
Tabel 2.53	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 83
Tabel 2.54	Luas Lahan Hasil Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 83
Tabel 2.55	Produksi Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 84
Tabel 2.56	Persentase Kontribusi PDRB Sektor Pertanian dengan Migas Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2014	2 - 86
Tabel 2.57	Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 87
Tabel 2.58	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 88
Tabel 2.59	Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 89
Tabel 2.60	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 90
Tabel 2.61	Produksi Minyak Bumi dan Batubara Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 90
Tabel 2.62	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 91
Tabel 2.63	Kunjungan Wisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 92
Tabel 2.64	Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 92
Tabel 2.65	Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2012-2015	2 - 93
Tabel 2.66	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 94



Tabel 2.67	Capaian Indikator Kinerja Urusan Perindustrian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 95
Tabel 2.68	Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 96
Tabel 2.69	Rata-rata Pendapatan Petani Per Tahun Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 96
Tabel 2.70	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perhubungan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 97
Tabel 2.71	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Penataan Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 98
Tabel 2.72	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 98
Tabel 2.73	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 100
Tabel 2.74	Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 100
Tabel 2.75	Capaian Indikator Fokus Iklim Berinvestasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 101
Tabel 2.76	Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 103
Tabel 2.77	Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016	2 - 105
Tabel 3.1	Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	3 - 7
Tabel 3.2	Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016	3 - 17
Tabel 3.3	Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016	3 - 22
Tabel 3.4	Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur tahun 2016	3 - 24
Tabel 4.1	Matrik Program dan Kegiatan SKPD Dalam Perubahan RKPD Tahun 2016	4 - 4



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Perencanaan	1 - 8
Gambar 2.1	Peta Kabupaten Kutai Timur	2 - 2
Gambar 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015	2 - 24
Gambar 2.2	PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015	2 - 25
Gambar 2.4	Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015	2 - 27
Gambar 2.5	PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015	2 - 29
Gambar 2.6	Capaian Indeks Pembangunan Manusia [IPM] Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	2 - 30
Gambar 2.7	Angka Partisipasi Kasar [APK] Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015	2 - 33
Gambar 2.8	Angka Partisipasi Murni [APM] Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015	2 - 34
Gambar 2.9	Angka Partisipasi Sekolah [APS] Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015	2 - 40
Gambar 2.10	Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan Tahun 2011-2015	2 - 43
Gambar 3.1	Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015	3 - 8



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana pembangunan tahunan [periode satu tahun] daerah dituangkan dalam dokumen yang disebut sebagai Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, maka disusunlah perubahan RKPD. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 menyebutkan bahwa beberapa keadaan yang dapat dilakukan Perubahan RKPD, diantaranya meliputi:

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah;
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
- c. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
- d. Pergeseran pagu kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan.

Berdasarkan perkembangan perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 berlanjut hingga pertengahan awal tahun 2016 berdampak pada kinerja perekonomian nasional yang cukup signifikan. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama pada harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih jauh dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016 secara keseluruhan. Pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas diperkirakan mengalami penurunan. Tidak



tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan target penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga memengaruhi penurunan proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016.

Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. Harga Minyak Mentah (ICP) pada Perubahan APBN tahun 2016 diproyeksikan berada pada kisaran US\$ 35 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US\$50 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi. Menurunnya asumsi harga minyak mentah tersebut di atas menyebabkan pada turunnya asumsi penerimaan negara yang berimplikasi pada menurunnya Dana Bagi Hasil kepada daerah menurun drastis.

Perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran hingga melebihi ambang batas. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3,0 persen dari produk domestik bruto. Berangkat dari perkembangan perekonomian tersebut, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik dalam pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1) perubahan kebijakan pada bidang pendapatan negara terutama dilakukan dengan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure* dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan *tax base* perpajakan di Indonesia; (2) penghematan dan pemotongan belanja kementerian negara/lembaga yang kurang produktif; (3) rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (4) kebijakan perubahan besaran *fixed* subsidi; (5) peningkatan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (6) peningkatan pengeluaran pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat (Nota Keuangan RAPBNP, 2016).

Kebijakan Pemerintah berkaitan dengan rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) di atas telah menyebabkan Pendapatan Daerah khususnya dan pos Dana Bagi Hasil menurun drastis. Penurunan tersebut mengharuskan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan perubahan kebijakan



Pendapatan Daerah dengan melakukan penyesuaian besaran Pendapatan Daerah Tahun 2016. Selanjutnya, perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 juga berimplikasi terhadap arah kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016. Oleh karena itu, dengan adanya perkembangan tersebut di atas perlu dilakukan perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016.

Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2016 secara umum mempunyai nilai strategis dan penting, antara lain:

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagai tahun transisi RPJMD Tahun 2011-2015 dan pelaksanaan RPJMD Tahun 2016-2021;
- b. Menjadi referensi penyusunan perubahan Rencana Kerja SKPD, berupa program/kegiatan SKPD dan/atau lintas SKPD;
- c. Mewujudkan konsistensi program dan pemenuhan pencapaian sasaran RPJMD 2011-2015 yang belum terealisasi serta keberlanjutan dalam pelaksanaan RPJMD 2016-2021;
- d. Menjadi dasar penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan tahun 2016 guna menyusun Perubahan RAPBD tahun 2016;
- e. Menjadi acuan dalam mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD Tahun 2016.

Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 memuat arah kebijakan pembangunan yang merupakan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk memberikan arahan kebijakan dalam melaksanakan pembangunan daerah yang berkesinambungan, sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Substansi RKPD mengacu kepada RPJMD dan RPJPD serta memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, rencana kerja dan pendanaannya.

Perubahan RKPD Tahun 2016 mengacu pada hasil evaluasi pembangunan tahun sebelumnya dan tahun berjalan. Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat kebijakan publik dan arah kebijakan pembangunan daerah, yang diharapkan dapat menciptakan kepastian kebijakan sebagai komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang harus dilaksanakan secara konsisten. Perubahan RKPD Tahun 2016 memuat penjelasan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan ekonomi daerah, evaluasi hasil RKPD tahun 2016, serta rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam perubahan RKPD.



Tahapan penyusunan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 meliputi:

- a. Penyusunan Rancangan Perubahan RKPD tahun 2016, berdasarkan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah dan hasil evaluasi laporan realisasi Rencana Kerja SKPD;
- b. Perumusan Rancangan Akhir Perubahan RKPD tahun 2016, berdasarkan rancangan perubahan Rencana Kerja SKPD;
- c. Penetapan Perubahan RKPD tahun 2016.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851];
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur, [Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896];
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286];
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355];
5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389];
6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400];
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun



- 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437] sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 9. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 11. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725];
 12. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112);
 13. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150);



16. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
20. Intruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010);
21. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
22. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2011 tentang Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia;
23. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang



- Tahapan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah:
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 470);
 27. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Kalimantan Timur 2005-2025;
 28. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 1);
 29. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 2);
 30. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Wilayah Kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Lainnya Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 3);
 31. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2009 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Kutai Timur (Lembaran Daerah Tahun 2009 Nomor 06);
 32. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2006-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2010 Nomor 4);
 33. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 11 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 11);
 34. Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor Tahun 2015 Tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016;

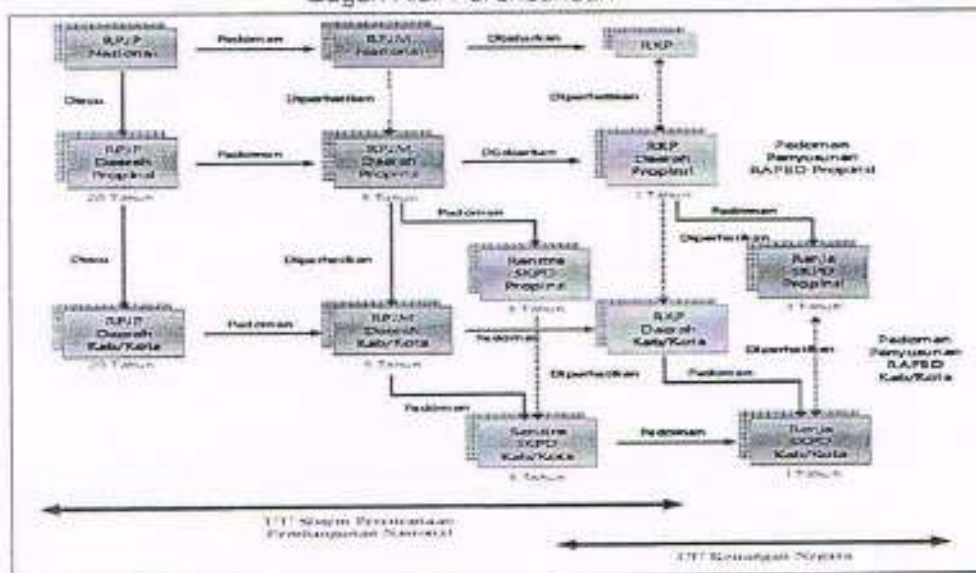


1.3 Hubungan Antar Dokumen

Dokumen perencanaan pembangunan daerah terintegrasi dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Keuangan Negara. Terdapat keterkaitan antara beberapa dokumen perencanaan mulai dari tingkat nasional hingga provinsi dan dari tingkat provinsi ke tingkat kabupaten/kota. Dalam hal ini, RPJP Nasional menjadi pedoman bagi penyusunan RPJM Nasional dan RKP. Oleh karena itu, ketiga dokumen nasional di atas menjadi pedoman penyusunan RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, dan RKPD provinsi, dan selanjutnya juga menjadi pedoman penyusunan RPJPD Kabupaten, RPJMD Kabupaten, dan RKPD Kabupaten. RPJMD dan RKPD selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra SKPD dan Renja SKPD.

RPJMD dan Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan jangka menengah daerah untuk periode 5 tahunan, yang dijabarkan lebih lanjut menjadi rencana tahunan, Rencana kerja tahunan pada tingkat nasional dinamakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan pada tingkat daerah disebut Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD). Hubungan Renstra K/L dengan RKP dan Renstra SKPD dengan RKPD adalah **bersifat mengikat** yaitu penyusunan rencana tahunan harus berpedoman pada rencana lima tahunan. Sedangkan hubungan antara Renstra K/L dan Renstra SKPD adalah bersifat konsultatif yaitu penyusunan Renstra SKPD harus memperhatikan Renstra K/L. Hubungan RKPD dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada Gambar 1.1 di bawah ini.

Gambar 1.1
Bagan Alur Perencanaan



Sumber : UU SPPN No 25 Tahun 2004



Sehubungan dengan adanya keselarasan sistem perencanaan dan sistem penganggaran, maka RKPD harus dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Oleh karena itu penyusunan RKPD tersebut, perlu dilakukan secara lebih rinci dengan tekanan utama pada penetapan program dan kegiatan. Penetapan program dan kegiatan tersebut harus pula mencakup indikator dan target kinerja serta perkiraan kebutuhan dana untuk mendukung pelaksanaan masing-masing program dan kegiatan.

1.4 Sistematika dokumen Perubahan RKPD

Sistematika dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, yang mengimplementasikan perencanaan pembangunan jangka menengah dan penganggaran tahunan adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Perubahan RKPD, proses penyusunan Perubahan RKPD, kedudukan Perubahan RKPD tahun rencana dalam periode dokumen dokumen RPJMD, keterkaitan antara dokumen RKPD dengan dokumen RPJMD, Renstra SKPD, Renja SKPD serta tindaklanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Memberikan uraian ringkas tentang dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Perubahan RKPD, baik yang berskala nasional, maupun lokal. Dalam hal ini kalau di daerah telah diterbitkan Peraturan Daerah atau Peraturan Kepala Daerah yang mengatur tentang perencanaan dan penganggaran ataupun tentang tata cara penyusunan dokumen perencanaan dan pelaksanaan musrenbang, perlu dicantumkan.

1.3 Hubungan antar dokumen

Bagian ini menguraikan tentang dokumen yang digunakan dalam penyusunan perubahan RKPD dan hubungan antar dokumen.



1.4 Sistematika Dokumen RKPD

Mengemukakan organisasi penyusunan dokumen perubahan RKPD terkait dengan pengaturan bab serta garis besar isi setiap bab di dalamnya.

1.5 Maksud dan Tujuan

Menjelaskan maksud dan tujuan penyusunan perubahan RKPD tahun rencana beserta perubahannya dalam kaitannya dengan dokumen RPJMD dan isu strategis serta kaitannya dengan Visi dan Misi Kepala Daerah.

II. EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Mendesripsikan gambaran umum kondisi daerah yang meliputi aspek geografi dan demografi, kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah

2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Sampai Tahun Lalu dan Realisasi RPJMD

Menguraikan hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah berupa program dan kegiatan, indikator kinerja program serta capaian kinerja RPJMD hingga tahun 2015. Hal ini dilakukan untuk:

- a) Mengetahui sejauh mana kemajuan yang telah dicapai terhadap target kinerja yang diharapkan menurut RPJMD, target pembangunan nasional (RPJM Nasional) maupun sektoral;
- b) Mengetahui realisasi capaian program dan kegiatan sampai tahun 2016 semester I
- c) Mengetahui tingkat capaian realisasi target sampai tahun 2016 semester I

III. PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Mengemukakan tentang kondisi ekonomi makro antara lain mencakup:

- 1) Perubahan kerangka ekonomi makro;
- 2) Perubahan kerangka pendanaan pada perubahan RKPD Tahun 2016



IV. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

Memuat pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi kelompok sasaran yang mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

V. PENUTUP

Bagian ini memuat arahan bagi SKPD dalam rangka menyusun dokumen Perubahan Renja SKPD.

1.5 Maksud dan Tujuan

Tujuan penyusunan Perubahan RKPD ini untuk mewujudkan keselarasan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumberdaya dalam pembangunan daerah. Sehingga Perubahan RKPD 2016 ini dapat berfungsi sebagai dasar hukum perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan bagi:

1. Penyusunan Perubahan Renja-SKPD, KUPA dan Perubahan PPAS, serta Perubahan APBD Tahun Anggaran 2016;
2. Memfasilitasi berbagai potensi sumberdaya masyarakat atau swasta dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.



BAB II

EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN

2.1 Gambaran Umum Kondisi Daerah

Gambaran umum kondisi daerah memberikan gambaran kondisi geografi dan demografi serta indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam pembangunan di Kabupaten Kutai Timur. Indikator capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan meliputi aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.

Gambaran umum kondisi daerah memberikan basis atau pijakan dalam proses perumusan perencanaan pembangunan daerah. Analisis lebih lanjut masing-masing aspek dapat dijelaskan sebagaimana berikut:

2.1.1 Aspek Geografi Dan Demografi

Analisis aspek geografi dilakukan untuk memperoleh gambaran mengenai karakteristik lokasi dan wilayah, potensi dan pengembangan wilayah, serta kerentanan wilayah terhadap bencana. Sementara itu, aspek demografi meliputi perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu.

2.1.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Karakteristik lokasi dan wilayah Kabupaten Kutai Timur dapat ditinjau dari beberapa aspek :

1. Luas dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari lima [5] kecamatan merupakan kabupaten hasil pemekaran wilayah berdasarkan Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang di Provinsi Kalimantan Timur. Mengacu pada Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 1999, Kabupaten Kutai Timur dimekarkan menjadi 11 wilayah kecamatan, dan kemudian berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 12 Tahun 2005 dimekarkan lagi menjadi 18 kecamatan dengan 133 desa dan 2 kelurahan.



Tabel 2.1
Luas Wilayah Kecamatan dan Jumlah Desa/Kelurahan
di Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa		Luas	
		Desa	Kelurahan	Km ²	%
1	Muara Ancalong	8		2.739,30	7,66
2	Busang	6		3.721,62	10,41
3	Long Mesangat	7		526,98	1,47
4	Muara Wahau	9		5.724,32	16,01
5	Telen	7		3.129,61	8,75
6	Kombeng	7		581,27	1,63
7	Muara Bengkal	7		1.522,80	4,26
8	Batu Ampar	6		204,50	0,57
9	Senggatta Utara	3	1	1.262,59	3,53
10	Bengalon	11		3.196,24	8,94
11	Teluk Pandan	6		631,00	1,77
12	Rantau Pulung	8		1.660,85	4,65
13	Senggatta Selatan	3	1	143,82	0,40
14	Kaliorang	7		3.322,58	9,29
15	Sangkulirang	13		438,91	1,25
16	Sandaran	7		3.419,30	9,57
17	Kaubun	8		257,45	0,72
18	Karangan	7		3.064,36	8,57
	Kabupaten Kutai Timur	133	2	35.747,50	100,00

Sumber: BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

2. Letak dan Kondisi Geografis

Wilayah Kabupaten Kutai Timur berada pada 115° 56'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 1°17'1" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. 115°58'26" - 118°58'19" Bujur Timur dan 0°02'11" Lintang Selatan - 1°52'39" Lintang Utara. Letak geografis wilayah Kabupaten Kutai Timur memiliki potensi cukup strategis untuk mendukung interaksi wilayah Kabupaten Kutai Timur dengan wilayah luar, baik dalam skala nasional maupun internasional, terutama dengan adanya dukungan fasilitas transportasi.

Potensi posisi strategis tersebut terlihat dari posisinya yang dikaitkan dengan wilayah lebih luas adalah sebagai berikut:

- Kabupaten Kutai Timur berada pada jalur regional lintas Trans Kalimantan yang menghubungkan jalur Tarakan [Kota Orde II] - Tanjung Redeb ke Samarinda [Kota Orde Ibu Kota Provinsi] - Balikpapan [Kota Orde I] -



Kabupaten Penajam Paser Utara-Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat. Sehingga, dengan posisi tersebut, menjadi potensi yang mendukung kelancaran mobilitas barang dan jasa dari dan ke dalam Kabupaten Kutai Timur.

- b) Wilayah perairan Kabupaten Kutai Timur dengan panjang garis pantai 152 km, terletak dalam wilayah perairan Selat Makasar dan Laut Sulawesi, sedangkan bagian Laut Kalimantan Timur merupakan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II, sehingga posisi Kutai Timur menjadi strategis karena berada pada jalur transportasi laut internasional.

Adanya posisi Kabupaten Kutai Timur yang strategis tersebut, merupakan tantangan dan sekaligus peluang, sehingga apabila dapat dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadi pendorong dalam upaya meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian daerah.

3. Topografi

Kondisi topografi wilayah Kabupaten Kutai Timur bervariasi berupa dataran, berbukit hingga pegunungan serta pantai dengan ketinggian tanah bervariasi antara 0-7 meter hingga lebih dari 1.000 meter dari permukaan laut. Sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur mempunyai kelerengan di atas 15 persen, dengan total luas wilayah 2.516.233 Ha (76,37 persen dari total luas lahan). Wilayah dengan kelerengan di atas 40 persen mempunyai areal yang cukup luas, tersebar di seluruh wilayah, khususnya terkonsentrasi di bagian barat laut dengan ketinggian lebih 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dengan karakteristik topografi seperti ini termasuk dalam kategori lahan kritis yang sangat potensial mengalami degradasi lingkungan berupa erosi tanah.

Wilayah dengan kelerengan di bawah 15 persen (<2 s/d 15) merupakan Kawasan yang relatif datar dan landai, dengan luas 778.686 Ha (23,63 persen). Kawasan ini hanya terdapat di Kecamatan Sangatta, Muara Bengkal, Muara Ancalong dan sebagian Muara Wahau dan Sangkulirang. Muara Wahau dan Muara Ancalong merupakan daerah pegunungan kapur. Wilayah dengan daerah pegunungan dan perbukitan mempunyai areal paling luas yaitu 1.608.915 Ha dan 1.429.922,25 Ha.

Jumlah gunung yang terdapat di wilayah Kutai Timur sebanyak 9 buah. Gunung yang tertinggi adalah gunung menyapa dengan ketinggian mencapai 2000 m. Selain



pegunungan dan perbukitan, wilayah ini juga memiliki dataran/landai seluas 536.212,5 Ha yang terdiri dari daratan, rawa dan perairan umum (sungai dan danau). Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan, sedangkan danau hanya di Kecamatan Muara Bengkal yaitu danau Ngayau dengan luas 1.900 Ha dan Danau Karang, dengan luas 750 Ha. Wilayah pantai berada di sebelah timur kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m di atas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat.

4. Geologi

Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai di suatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

Secara geologi Kabupaten Kutai Timur hampir sebagian besar didominasi oleh Formasi Pemaluan yang tersebar di bagian tengah dan timur serta alluvium yang tersebar di sepanjang pantai. Di samping itu terdapat pula kandungan batuan endapan tersier dan batuan endapan kuartar. Formasi batuan endapan terutama terdiri dari batuan kwarsa dan batuan liat. Berdasarkan aspek geologi, wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur tersusun dari 21 jenis formasi.

Tabel 2.2
Penyebaran Fisiografi
Kabupaten Kutai Timur

No	Fisiografi	Luas (Ha)
(1)	(2)	(3)
1	Dataran Alluvium	19.097
2	Dataran	1.505.176
3	Jalur Kelokan	14.161
4	Lembah	12.372
5	Rawa	138.994
6	Rawa Pasang Surut	25.84
7	Perbukitan	534.765
8	Pegunungan	975.938
9	Teras-teras	70.105

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Kutai Timur Tahun 2007



Tingkat kemampuan tanah sangat bervariasi dari rendah sampai dengan tinggi. Semakin banyak faktor penghambat yang dijumpai disuatu wilayah seperti lereng terjal, ketersediaan air kurang dan mudah terjadi erosi maka dapat dikatakan kemampuan tanah pada wilayah tersebut rendah. Jenis tanah di wilayah daratan Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh tanah podsolik merah kuning, latosol dan litosol. Jenis tanah lainnya adalah aluvial, organosol, latosol, podsol, dan podsolik merah kuning dengan tingkat kesuburan yang rendah.

5. Hidrologi

Wilayah perairan berupa laut/pantai, sungai dan danau. Daerah Aliran Sungai (DAS) terdapat di seluruh kecamatan, dimana sungai terpanjang adalah Sungai Kedang Kepala yang terletak di Kecamatan Muara Wahau dengan panjang 319 km. Danau hanya terdapat di Kecamatan Mura Bengkal yaitu Danau Ngayau dengan luas 1.900 Ha dan Danau Karang, dengan luas 750 Ha. Wilayah pantai berada di sebelah timur Kabupaten, yang mempunyai ketinggian antara 0-7 m diatas permukaan laut. Kawasan pantai yang memiliki potensi wisata bahari adalah Pantai Teluk Lombok dan Pantai Sekerat. Selama ini, wilayah Pantai Teluk Lombok dimanfaatkan oleh masyarakat lokal sebagai media persiran marikultur komoditi perikanan seperti tambak ikan dan udang, budidaya rumput laut dan budidaya ikan dalam karamba jaring apung (KJA).

6. Klimatologi

Kabupaten Kutai Timur berada di wilayah yang beriklim tropis mempunyai musim yang hampir sama dengan wilayah Indonesia pada umumnya yaitu musim kemarau dan musim penghujan. Kabupaten Kutai Timur memiliki suhu udara rata-rata 26°C dengan perbedaan suhu terendah dengan suhu tertinggi mencapai 5° sampai 7°C. Jumlah curah hujan antara 2000 hingga 4000 mm/tahun, dengan jumlah hari hujan rata-rata adalah 130 hingga 150 hari/tahun.

7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur Penggunaan lahan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 sebanyak 43,08% merupakan kawasan hutan, meliputi Hutan Mangrove, Hutan Primer, Hutan Rawa, Hutan Sekunder dan Hutan Tanaman. Hutan Primer banyak dijumpai pada daerah pegunungan yang tersebar



pada bagian barat Kabupaten Kutai Timur, yaitu Kecamatan Muara Wahau, Telen, dan Busang. Kawasan tidak berhutan di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 56,14% yang didominasi oleh belukar dan belukar rawa, masing-masing sebesar 37,65% dan 5,76%. Kawasan pertanian sebanyak 9,28% atau sekitar 296.119,33 Ha, meliputi perkebunan, sawah dan lahan pekarangan. Sedangkan penggunaan lahan untuk perikanan masih sangat kecil meskipun mempunyai potensi yang sangat besar baik budidaya kolam maupun perairan umum. Penggunaan lainnya adalah pertambangan batubara sebesar 0,70% atau sekitar 22.410,51 Ha.

2.1.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

Pengembangan sub satuan wilayah pengembangan (SSWP) di Kabupaten Kutai Timur sebagai acuan untuk menentukan pusat-pusat kegiatan baik perkotaan maupun perdesaan. Sistem perwilayahan ini pun menggambarkan satuan wilayah kabupaten yang memiliki pusat di suatu kota kecamatan yang dijasikan sebagai pusat di suatu kota kecamatan yang dijadikan sebagai pusat kegiatan perwilayahan tersebut. SSWP di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

- a) SSWP Pusat meliputi Kecamatan Teluk Pandan, Sangatta Selatan, Sangatta Utara, Rantau Pulung dan Bengalon
- b) SSWP Timur meliputi Kecamatan Karang, Kaibun, Kaliorang, Sangkulirang, dan Sandaran
- c) SSWP Utara meliputi Kecamatan Kongbeng, Telen dan Muara Wahau
- d) SSWP Selatan meliputi Kecamatan Batu Ampar, Busang, Long Mesangat, Muara Ancalong dan Muara Bengkal.

Potensi masing-masing kawasan di 18 kecamatan Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada tabel 2.3. berikut:

Tabel 2.3
Potensi di setiap Kecamatan di Kabupaten Kutai Timur

No	Kecamatan	Potensi
1.	Muara Ancalong	<ul style="list-style-type: none">- Perkebunan kelapa sawit- Perikanan tangkap dan budidaya darat- Food estate- Konservasi Fauna: buaya supit dan bodas- Plasma nutfah buah lokal
2.	Busang	<ul style="list-style-type: none">- Perkebunan kelapa sawit- Pertanian tanaman pangan dengan komoditas padi ladang dan sawah- Sektor Perkebunan dengan komoditas utama kakao,



No	Kecamatan	Potensi
		Hortikultura: jeruk dan pisang - Wisata budaya - Konservasi Fauna: Orangutan (Restorasi Habitat Orang Utan Indonesia) - Terdapat potensi bahan galian dan tambang berupa emas dan besi
3.	Long Mesangat	- Perkebunan kelapa sawit, karet, padi, palawija - Budidaya perikanan darat
4.	Muara Wahau	- Perkebunan kelapa sawit - Wisata Budaya dan Hutan Lindung Wehea - Tambang Batubara - HPH
5.	Telen	- Perkebunan kelapa sawit, kakao dan karet - Teridentifikasi sebagai salah satu wilayah yang memiliki kandungan logam mulia berupa emas
6.	Kongbeng	- Terdapat pertanian tanaman pangan dengan komoditas utama padi - Perkebunan kelapa, kakao, lada, karet, kelapa sawit - Peternakan - Wisata budaya dan wisata geologi (Karst)
7.	Muara Bengkal	- Perkebunan kelapa sawit, karet - Perikanan tangkap dan budidaya - Wisata danau gelumbang
8.	Batu Ampar	- Perkebunan kelapa sawit, karet dan lada - Potensi HTI (Hutan Tanaman Industri) yang cukup luas untuk sentra produksi hutan.
9.	Sangatta Utara	- Tambang batubara - Perdagangan dan jasa. - Kawasan wisata konservasi orang utan dan ekowisata
10.	Bengalon	- Tambang batubara - Perkebunan kelapa sawit, karet dan kakao - Perikanan tangkap dan budidaya - Wisata bahari dan geologi
11.	Teluk Pandan	- Aren gajah - Padi sawah, pisang, dan Kakao. - Budidaya perikanan
12.	Rantau Pulung	- Perkebunan kelapa sawit, pertanian tanaman pangan dan peternakan
13.	Sangatta Selatan	- Memiliki potensi wisata bahari dan ekowisata - Budidaya perikanan dan perikanan tangkap - Pertanian tanaman pangan dan peternakan
14.	Kaliorang	- Perkebunan kelapa Sawit, kakao, kelapa dan pisang - Wisata bahari dan ekowisata - Kawasan Ekonomi Khusus Maloy Batuta Trans Kalimantan (KEK MBTK) - Berada di sepanjang garis pantai, sektor perikanan menjadi salah satu sektor yang tumbuh dan



No	Kecamatan	Potensi
		<ul style="list-style-type: none">berkembang dengan baik dengan komoditas perikanan tangkap• Peternakan sapi sebagai penopang kebutuhan daging Kabupaten Kutai Timur• Terdapat potensi bahan galian berupa besi, gipsum dan pasir kuarsa
15.	Sangkulirang	<ul style="list-style-type: none">• Letak geografis kecamatan ini bisa menjadi potensi untuk produksi perikanan laut serta outlet barang dan jasa• Potensi perikanan laut• Perkebunan kelapa sawit dan karet• Ternak besar
16.	Sandaran	<ul style="list-style-type: none">• Perikanan laut,• Wisata Bahari dan geologi [Karst]• Perkebunan• Kehutanan
17.	Kaubun	<ul style="list-style-type: none">• Perkebunan kelapa sawit• Pertanian pangan• Ternak besar
18.	Karangan	<ul style="list-style-type: none">• Perikanan darat• Wisata geologi [Karst]• Perkebunan kakao, sawit, pisang• Kehutanan dan hasil hutan

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Berikut beberapa potensi-potensi pengembangan kawasan-kawasan di Kabupaten Kutai Timur:

1. Kawasan Pertanian Tanaman Pangan

Kawasan pertanian tanaman pangan di Kabupaten Kutai Timur terbagi menjadi 2 bagian yaitu kawasan budidaya tanaman pangan lahan basah dan kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering.

Berdasarkan kriteria kesesuaian lahan untuk kawasan budidaya tanaman pangan lahan kering yang meliputi derajat kemiringan lahan, jenis tanah, kedalaman solum, tekstur tanah, dan tingkat erosi, maka untuk kegiatan pertanian lahan kering berada di sebagian besar wilayah Kabupaten Kutai Timur dan tersebar di semua kecamatan yang ada. Sedangkan kesesuaian lahan budidaya tanaman pangan lahan basah berada di sebagian kecil wilayah yang ada di Kabupaten Kutai Timur dengan luas yang cukup signifikan, terutama di kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong.

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan,



berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional.

Penggunaan tanah untuk pertanian khususnya tanah sawah tiap tahun mengalami penyusutan luasan atau alih fungsi. Kondisi ini apabila dibiarkan dan tidak dilakukan upaya pencegahan alih fungsi, akan menjadi ancaman (hambatan) pembangunan sektor pertanian dimasa akan datang yang meliputi berkurangnya jumlah produksi dan produktivitas padi yang berpotensi mengakibatkan hambatan dalam mewujudkan swasembada pangan. Usaha-usaha yang harus dilakukan adalah mengembangkan area pertanian tanaman pangan dengan menyusun strategi pengelolaan sumberdaya lahan pertanian secara berkelanjutan dan pencegahan berkurangnya lahan sawah produktif, terutama untuk lahan beririgasi teknis yang sudah dikembangkan dan lahan produktif lainnya.

Kegiatan budidaya pertanian lahan basah dan *food estate* merupakan lahan sawah, baik yang beririgasi teknis, setengah teknis, maupun irigasi perdesaan yang telah diusahakan secara intensif. Kawasan lahan pertanian diharapkan dapat tetap dipertahankan dalam rangka ketahanan pangan dan ketahanan budaya. Kawasan budidaya pertanian lahan basah di wilayah perencanaan selain dikembangkan untuk produksi pangan juga diarahkan sebagai kawasan penyangga (*buffer zone*) untuk menjaga kualitas lingkungan dalam bentuk jalur hijau atau ruang terbuka hijau. Kawasan budidaya pertanian lahan basah terutama yang telah terlayani jaringan irigasi merupakan kawasan yang tetap dipertahankan dengan meminimasi alih fungsi ke kegiatan budidaya lainnya. Lahan *food estate* yang merupakan areal lahan pertanian pangan berkelanjutan dicadangkan di 4 (empat) kecamatan yaitu Busang, Karanganyar, Muara Ancalong dan Sandaran dengan luas 63.202,78 ha, sementara itu lahan pertanian pangan direncanakan seluas lebih kurang 107.755,37 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur merupakan lahan yang dimanfaatkan untuk budidaya tanaman pangan semusim dan atau tanaman tahunan yang dicirikan pengelolaannya relatif tidak memerlukan air irigasi.

Sedangkan pemanfaatan pertanian lahan kering adalah untuk tegalan, tanaman sayur mayur (hortikultura), dan kebun campuran. Pertanian lahan kering yang tidak intensif merupakan cadangan pengembangan kawasan perkotaan.



2. Kawasan Perkebunan

Pembangunan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur dalam beberapa tahun terakhir telah menunjukkan pertumbuhan cukup signifikan, antara lain ditandai dengan semakin meningkatnya luas areal, produksi dan produktivitas. Komoditas yang banyak dikembangkan dalam perkebunan rakyat antara lain kakao, karet, lada, dan kelapa sawit.

Kawasan perkebunan di kawasan perencanaan yang makin dekat ke pusat-pusat kegiatan dan merupakan potensi pengembangan kawasan perkotaan. Kebijakan pengelolaan kawasan perkebunan meliputi: a) Pengembangan kegiatan lahan perkebunan diupayakan untuk meningkatkan produktivitas tanaman yang ada saat ini, b) Pemanfaatan lahan perkebunan untuk sistem tumpang sari dengan kegiatan budidaya pertanian lahan kering, c) Pemilihan jenis komoditi unggulan sesuai dengan potensi lahan, d) Pengembangan lahan perkebunan pada lahan-lahan yang memiliki kesesuaian lahan sebagai lahan perkebunan melalui intensifikasi dan pemilihan teknologi tepat guna.

Kawasan perkebunan di Kabupaten Kutai Timur tersebar pada 16 (enam belas) kecamatan yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Rantau Pulung, Bengalon, Muara Bengkal, Muara Ancalong, Long Mesangat, Busang, Muara Wahau, Kongbeng, Telen, Batu Ampar, Kaliorang, Sangkulirang, Kaubun, Karanganyan dan Sandaran.

3. Kawasan Peternakan

Hasil produksi peternakan di Kabupaten Kutai Timur, baik peternakan kecil (seperti unggas) maupun peternakan besar (seperti kambing, sapi, dan lain lain). Beberapa spot lokasi wilayah perencanaan terdapat usaha kegiatan peternakan dalam skala kecil terutama peternakan ayam. Kebijakan pengelolaan kawasan budidaya peternakan diarahkan untuk: a) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) petani ternak, b) Peningkatan teknologi, produktivitas, dan kualitas ternak, c) Pengendalian limbah peternakan agar tidak mengganggu lingkungan permukiman dan sumber air, serta d) Pengembangan sinergi antara kegiatan peternakan dan usaha pertanian lainnya.

4. Kawasan Perikanan

Kawasan perikanan tangkap adalah kawasan bagi kegiatan memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apapun,



termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kawasan pengembangan perikanan tangkap di Kabupaten Kutai Timur diarahkan dan dibagi dalam tiga jalur dengan klasifikasi area dan peralatan.

Sementara itu kawasan perikanan budidaya adalah kawasan yang diperuntukkan bagi kegiatan memelihara, membesarkan, dan atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkat, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan atau mengawetkannya. Kriteria penetapan kawasan perikanan budidaya meliputi : a) Perairan laut pasang surut yang terlindung pasir, kerakal dan atau berbatu, b) Perairan laut yang semi terlindung dan atau perairan yang terlindung dari aksi gelombang ekstrim, c) Di luar kawasan pelabuhan dan atau jalur pelayaran, d) Salinitas air relatif konstan dalam kisaran normal air laut, e) Aksesibilitas kawasan mudah dicapai, dekat pemukiman masyarakat pesisir dan tidak dalam pengaruh oeh air limbah, f) Perairan laut di luar zona inti kawasan perlindungan, g) Perairan laut di luar areal terumbu karang dan Padang Lamun, h) Kualitas air memenuhi baku mutu air laut untuk budidaya ikan.

Sedangkan kawasan budidaya laut yang direncanakan dikembangkan berada di perairan laut Kecamatan Sangatta Selatan berupa budidaya perikanan tangkap laut dan budidaya rumput laut.

5. Kawasan Pertambangan

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mempertahankan kawasan lindung yang ada. Kawasan pertambangan yang ada saat ini sangat dimungkinkan menjadi kawasan lindung di masa yang akan datang. Oleh karena itu upaya rehabilitasi dan revitalisasi kawasan bekas pertambangan menjadi keharusan agar tidak terjadi kerusakan ekologis yang sangat serius dan berdampak fatal dikemudian hari.

Kawasan pertambangan, dimana produksi yang dihasilkan oleh sektor ini memiliki peran penting dalam peningkatan perekonomian regional Kutai Timur. Produksi tambang yang dihasilkan oleh beberapa perusahaan lokal, nasional dan internasional diharapkan mampu menjadi penggerak utama (*prime mover*) bagi perekonomian Kabupaten Kutai Timur, akan tetapi potensi peruntukan kawasan pertambangan dalam rencana tata ruang kabupaten tahun 2013-2032 berdasarkan ijin konsesi pertambangan sebagai kawasan tambang sebagian besar



masih dalam proses *Feasibility Study* yang lebih lanjut untuk kesesuaian lahannya. Ijin konsesi kawasan yang memiliki potensi pertambangan di Kabupaten Kutai Timur memiliki luas sebesar lebih kurang 1.602.653 Ha.

6. Kawasan Pariwisata

Sektor pariwisata merupakan sektor yang potensial menciptakan Pendapatan Asli Daerah (PAD) serta mampu memberikan *multiplier effect* bagi berkembangnya sektor-sektor terkait, seperti pertanian (bunga, buah, perikanan), industri kerajinan, perdagangan (misalnya rumah makan), dan jasa (penginapan, pemandu wisata, transportasi, dan sebagainya). Sehingga berkembangnya sektor ini diharapkan dapat meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar kawasan wisata.

Kekayaan alami di Kabupaten Kutai Timur seperti hutan, pantai, goa merupakan aset berharga yang potensial untuk dikembangkan. Kondisi alam Kabupaten Kutai Timur menawarkan ragam produk wisata yang dapat dikembangkan, antara lain Geowisata (lokasi Karst Sangkulirang-Gua Pengadan), Wisata Pantai (beberapa lokasi yang berada di zona Sangatta), Wisata Bahari (pulau Birah-Birahan), Ekowisata (berbagai lokasi di Taman Nasional Kutai), Wisata Budaya Tradisional (desa tempat suku Dayak Wehea bermukim), Wisata Pendidikan dan Penelitian (Gua Pengadan, Desa Adat, Penelitian Orang Utan di Mentoko), Keunggulan daya tarik wisata, lukisan-lukisan berupa gambar negatif cap tangan tga susun, perhiasan, peralatan, patung bahkan guci-guci China dan hewan yang ditemukan pada lokasi gua di Kawasan Pengadan sejauh ini merupakan satu-satunya gua alami di Indonesia yang memiliki peninggalan pra sejarah.

Kegiatan yang dikembangkan dengan fungsi untuk mendukung kegiatan pariwisata ini adalah: a) Peningkatan program sadar wisata kepada masyarakat melalui penerangan dan penyuluhan, b) Peningkatan promosi obyek wisata, penataan dan pengembangan terhadap obyek-obyek wisata yang ada sehingga lebih representatif.

7. Kawasan Pemukiman

Kawasan pemukiman di Kabupaten Kutai Timur mencakup kawasan pemukiman perkotaan dan kawasan pemukiman pedesaan. Kebijakan pengembangan permukiman pedesaan dilakukan dengan menciptakan sentra-sentra



produksi yang prospektif dalam penyerapan tenaga kerja dan peningkatan pendapatan. Sejalan dengan itu perlu diciptakan saling keterhubungan antara sentra produksi dengan pusat pemaserannya sehingga dapat saling menunjang system perwilayahan. Kawasan permukiman pedesaan di Kabupaten Kutai Timur direncanakan lebih kurang 70.588,63 ha yang tersebar di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur.

Sedangkan kawasan permukiman perkotaan terletak di 3 (tiga) Kecamatan antara lain: Kecamatan Sangatta Utara sebagai pusat kegiatan wilayah dan sentra pemerintahan di Kabupaten Kutai Timur dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup besar dialokasikan ruang lebih kurang 9.766,6 ha. Sedangkan Kecamatan Sangatta Selatan yang juga merupakan bagian dari pusat kegiatan wilayah, perencanaan permukiman perkotaan lebih kurang 1.755,28 ha cukup relevan mengingat Kecamatan Sangatta Selatan didalamnya meliputi areal Taman Nasional Kutai. Permukiman perkotaan lainnya yang direncanakan di Kabupaten Kutai Timur berada di Kecamatan Kaliorang sebagai perwujudan dari konsep Kota Terpadu Mandiri (KTM), yang dialokasikan seluas lebih kurang 126,04 ha.

2.1.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi mengalami bencana alam yang memerlukan perlindungan. Tujuan perlindungan kawasan ini disamping melindungi manusia juga melindungi kegiatannya.

Hasil identifikasi kawasan rawan bencana di Kabupaten Kutai Timur meliputi:

1) Kawasan Rawan Bencana Banjir

Kawasan rawan bencana banjir adalah lokasi yang secara rutin mengalami genangan lebih dari enam jam pada saat musim hujan. Kawasan rawan bencana banjir memerlukan penanggulangan. Rencana penanggulangan banjir dan pelestarian alam yang lebih berorientasi pada kelangsungan hidup ekologi dapat disebutkan sebagai berikut:

- a) Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya banjir
- b) Gerakan penghijauan lingkungan
- c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan banjir



2) Rawan Bencana Gerakan Tanah (Longsor)

Kawasan rawan bencana alam rawan longsor merupakan zona yang mudah bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Beberapa kecamatan merupakan kawasan rawan bencana longsor karena mempunyai kelerengan lebih dari 40 persen dan daerah yang berada di aliran sungai dengan arus deras. Upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah bencana longsor adalah:

- a) Membatasi eksploitasi bahan galian
- b) Gerakan penghijauan lingkungan dengan tanaman yang tepat
- c) Manajemen pengelolaan dan penanggulangan longsor

3) Rawan Bencana Kebakaran Lahan dan Pemukiman

Kabupaten Kutai Timur adalah satu daerah yang dikategorikan rawan terhadap bahaya kebakaran hutan dan lahan. Berdasarkan hasil pemantauan satelit, di wilayah Kutai Timur mulai banyak ditemukan adanya daerah rawan kebakaran. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan semua pihak untuk pencegahan dini agar tidak terjadi kebakaran. Selain itu, diperlukan peningkatan kesiagaan, mengefektifkan kegiatan pemantauan dan pengawasan, serta mengambil langkah-langkah konkret secara terkoordinasi dan terpadu untuk mengatasi bahaya kebakaran.

2.1.1.4 Aspek Demografis

Aspek kependudukan memiliki posisi yang cukup penting bagi pembangunan daerah, sehingga data kependudukan sangat diperlukan untuk penentuan kebijakan maupun perencanaan pembangunan. Dalam skala yang lebih luas lagi data penduduk dengan deskripsi kecenderungan sangat berguna dalam mengevaluasi kegiatan yang lalu dan yang sedang berjalan bahkan dapat memperkirakan bentuk dan volume kegiatan yang akan dilakukan di masa mendatang. Persoalan kependudukan seperti pertumbuhan penduduk dan tingkat fertilitas yang masih tinggi akan berdampak dalam penyediaan infrastruktur yang besar dan memadai serta lapangan pekerjaan yang cukup di masa mendatang.

Sebagai kabupaten penghasil batu bara dan dengan wilayah hutan yang sangat luas menjadi daya tarik bagi pendatang dari luar Kutai Timur. Pada sensus penduduk tahun 2010, sebagian besar pendatang yang kini bermukim di Kutai Timur berasal dari Pulau Jawa dan Sulawesi. Hal ini didorong oleh dua faktor. *Pertama*, terbukanya



daerah ini sebagai tempat yang baik untuk mencari kerja atau mengembangkan usaha penunjang industri batubara, dan pengelolaan kayu hasil hutan yang keduanya mendatangkan banyak tenaga kerja dari luar daerah. *Kedua*, Kabupaten Kutai Timur merupakan wilayah program transmigrasi yang dilaksanakan pemerintah.

Jumlah perkembangan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama 5 tahun terakhir dapat dilihat pada Tabel 2.4 berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk, Pertumbuhan dan Persebaran serta
Kepadatan Penduduk Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Jumlah Penduduk	Jiwa	430.865	527.723	554.751	412.698	413.508
2	Pertambahan Jumlah Penduduk	Jiwa	63.618	96.858	27.028	-142.053	810
3	Pertumbuhan Penduduk	(%)	17,32	22,47	5,12	(25,61)	0,20
4	Kepadatan Penduduk	Jiwa/ km ²	12,05	14,76	15,52	11,55	11,56

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Jumlah penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013 sebesar 554.751 jiwa mengalami penurunan sebanyak 142.053 jiwa, menjadi 412.698 jiwa di tahun 2014 atau mengalami penyusutan sebesar 25,61 persen. Angka kependudukan tersebut merupakan hasil pemutakhiran data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri. Penurunan jumlah penduduk ini disebabkan karena terjadinya akun ganda (*double account*) pada sejumlah penduduk terdaftar/teregister sebagai penduduk Kabupaten Kutai Timur.

Pada tahun 2015 jumlah penduduk laki-laki sebesar 225.053 jiwa dan penduduk perempuan sebesar 188.044 jiwa, ini berarti jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan dengan penduduk perempuan dengan rasio jenis kelamin 119,68, dimana besaran angka rasio jenis kelamin mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sebesar 121,87. Perubahan demografis ini dapat dimungkinkan karena migrasi masuk ke Kabupaten Kutai Timur lebih banyak didominasi oleh laki-laki. Hal ini berimplikasi pada penyediaan lapangan pekerjaan untuk penduduk laki-laki lebih banyak daripada lapangan pekerjaan untuk perempuan.



Tabel 2.5
Jumlah dan Perkembangan Penduduk Menurut Jenis Kelamin
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Kecamatan	2011		2012		2013		2014		2015	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Muara Ancalong	8.881	8.061	9.913	9.013	9.908	8.945	8.174	7.298	8.654	8.104
Busang	3.691	3.282	4.266	3.722	4.200	3.888	3.245	2.821	2.939	2.585
Long Mesangat	4.483	3.860	5.236	4.454	5.312	4.499	4.018	3.381	3.939	3.365
Muara Wahau	14.497	11.977	17.688	14.859	20.397	16.738	14.564	12.000	16.368	13.647
Telen	5.780	4.585	7.143	5.671	7.228	5.752	5.355	4.340	5.543	4.481
Kongbeng	10.329	8.891	15.205	12.880	16.980	14.354	13.663	11.521	12.256	10.883
Muara Bengkal	8.620	8.555	11.608	10.353	11.273	8.929	8.824	7.780	8.765	7.860
Batu Ampar	3.724	3.173	4.334	3.627	4.251	3.600	3.206	2.718	3.165	2.718
Sangatta Utara	80.081	64.095	93.935	74.101	98.424	76.755	72.216	58.052	70.083	57.665
Bengalon	15.575	12.682	27.849	22.054	29.651	23.170	21.832	17.389	21.466	17.487
Teluk Pandan	12.364	10.051	15.854	12.515	16.983	13.328	10.520	8.234	9.612	7.725
Sangatta Selatan	21.417	17.708	23.918	18.635	24.370	19.794	18.324	15.079	18.904	15.740
Rantau Pulung	5.428	4.668	6.441	5.573	6.742	5.832	4.849	4.255	5.208	4.846
Kaliorang	7.775	6.614	8.145	7.783	9.522	8.083	7.068	5.968	7.258	6.224
Kaubun	5.518	4.541	7.696	6.282	8.749	7.126	6.951	5.644	8.118	6.569
Sangkulirang	12.691	10.700	13.999	11.755	14.588	12.271	11.052	9.508	11.015	9.522
Karangan	8.018	6.477	10.308	7.467	10.953	7.956	7.452	5.615	7.588	5.888
Sandaran	5.543	4.553	6.518	5.292	7.522	5.919	5.363	4.330	6.193	4.812
Jumlah	236.392	194.473	290.887	236.836	307.033	247.718	228.687	186.011	225.053	189.044
Jumlah L + P	430.865		527.723		554.751		412.698		413.508	
Rasio Jenis Kelamin	112,56		122,82		123,94		121,87		119,89	
Pertumbuhan (%)	17,32		22,47		5,12		(25,61)		0,20	

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun tiga tahun terakhir didominasi pada tiga kecamatan yang memiliki jumlah penduduk paling banyak. Pada tahun 2015 persebaran penduduk di Kabupaten Kutai Timur masih didominasi tiga kecamatan yakni Kecamatan Sangatta Utara (30,92 persen), Kecamatan Bengalon (9,43 persen), dan Kecamatan Sangatta Selatan (8,39 persen).



Tabel 2.6
Persebaran Penduduk Menurut Kecamatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Kecamatan	Persebaran Penduduk (%)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Muara Ancalong	3,93	3,59	3,40	3,75	3,18
2	Busang	1,62	1,52	1,42	1,47	1,33
3	Long Mesangat	1,94	1,84	1,77	1,79	1,75
4	Muara Wahau	6,14	6,13	6,69	6,45	7,34
5	Telan	2,41	2,43	2,34	2,35	2,43
6	Kongbeng	4,46	5,32	5,65	6,10	5,53
7	Muara Bengkal	4,22	4,16	3,82	4,02	4,04
8	Batu Ampar	1,60	1,51	1,42	1,44	1,47
9	Sangatta Utara	33,46	31,84	31,58	31,56	30,91
10	Bengalon	6,56	9,42	9,52	9,50	9,38
11	Teluk Pandan	5,20	5,38	5,46	4,54	4,16
12	Sangatta Selatan	9,08	8,25	7,96	8,09	8,32
13	Rantau Pulung	2,34	2,28	2,27	2,21	2,44
14	Kaliorang	3,34	3,21	3,17	3,16	3,26
15	Kaubun	2,33	2,65	2,86	3,05	3,26
16	Sangkulirang	5,43	4,88	4,84	4,98	3,55
17	Karangan	3,60	3,37	3,41	3,17	2,69
18	Sandaran	2,34	2,24	2,42	2,35	4,96
	Jumlah (%)	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,
Keterangan: *) Angka semester 1 Tahun 2015.

Persebaran penduduk di Kecamatan Sangatta Utara masih mendominasi jumlah penduduk (30,92 persen) di Kabupaten Kutai Timur. Hal ini berkaitan dengan Kecamatan Sangatta Utara merupakan ibukota kabupaten dan keberadaan perusahaan tambang batu bara terbesar yaitu Kaltim Prima Coal (KPC). Sebaliknya persebaran penduduk di kecamatan lain, terutama pada kecamatan pemekaran dan kecamatan yang aksesibilitas masih belum baik, seperti di Long mesangat, Busang dan Batu Ampar masih sangat kecil yaitu kurang dari 2 persen.

Jumlah penduduk Kutai Timur terus mengalami peningkatan. Tingginya pertumbuhan penduduk di Kabupaten Kutai Timur sebagian besar dikarenakan oleh migrasi masuk. Kondisi ini menandakan bahwa Kutai Timur memiliki daya tarik yang sangat kuat bagi pendatang terutama karena alasan ekonomi. Indikasi ini dapat



dilihat dari *dependency ratio* sebagai daerah terbuka yang terkenal adanya potensi sumber daya alam yang melimpah, sehingga menyebabkan mobilitas penduduk yang terjadi cukup tinggi, terutama datang untuk bekerja/mencari kerja, dimana sebagian besar berusia produktif (usia 16-40).

Tabel 2.7
Persebaran Jumlah Penduduk Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Kelompok Umur Tahun 2011-2015

No	Kelompok Umur	2011	2012	2013	2014	2015*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
1	0 - 4	19.982	47.225	28.220	20.371	30.008
2	5 - 9	45.438	51.713	52.675	40.301	50.233
3	10 - 14	41.464	45.604	51.850	40.310	49.937
4	15 - 19	35.260	48.372	43.454	34.784	34.786
5	20 - 24	43.173	59.003	56.832	38.806	36.581
6	25 - 29	50.591	61.964	66.460	43.956	41.907
7	30 - 34	49.758	53.704	65.675	45.176	41.645
8	35 - 39	40.585	44.019	53.648	39.832	36.001
9	40 - 44	34.285	34.554	43.079	32.720	28.937
10	45 - 49	24.008	24.099	32.846	26.096	22.573
11	50 - 54	17.835	17.968	21.930	17.949	15.209
12	55 - 59	11.413	10.579	15.084	13.353	10.781
13	60 - 64	7.651	6.721	10.342	7.996	6.345
14	65 - 69	4.343	4.023	5.758	5.065	3.867
15	70 - 74	2.612	2.334	3.388	2.999	2.263
16	75 +	2.467	1.970	3.310	2.984	2.026
	Jumlah	245.817	430.865	554.751	412.698	413.097

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,
Keterangan: *) Angka semester 1 Tahun 2015

Berdasarkan kelompok umur pada tahun 2015, tampak jumlah penduduk terbanyak berada pada kelompok umur 5-9 tahun sebanyak 50.233 jiwa, kemudian diikuti kelompok umur 10-14 tahun sebanyak 49.937 jiwa dan selanjutnya umur 25-29 tahun sebanyak 41.907 jiwa. Sementara pada tahun sebelumnya yakni tahun 2014 jumlah penduduk terbesar pada kelompok usia 30-34 tahun yakni sebesar 45.176 jiwa, kemudian kelompok umur 25-29 tahun sebesar 43.956 jiwa. Hal ini



menunjukkan adanya potensi dan sekaligus tantangan dengan adanya penduduk usia produktif di Kutai Timur cukup tinggi.

Manfaat integrasi dimensi kependudukan dalam perencanaan pembangunan daerah paling mendasar yang diperoleh adalah besarnya harapan bahwa penduduk yang ada di Kabupaten Kutai Timur menjadi pelaku pembangunan dan penikmat hasil pembangunan. Hal ini berarti pembangunan berwawasan kependudukan lebih berdampak besar pada peningkatan kesejahteraan penduduk secara keseluruhan dibanding dengan orientasi pembangunan ekonomi yang berorientasi pada pertumbuhan (*growth*). Pembangunan berwawasan kependudukan menekankan pada pembangunan lokal, dimana perencanaan berasal dari bawah (*bottom up planning*), disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat lokal, dan yang lebih penting adalah melibatkan seluruh lapisan masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan.

2.1.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

Aspek kesejahteraan masyarakat terdiri dari fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi, fokus kesejahteraan masyarakat, serta fokus seni budaya dan olahraga.

2.1.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

A. Pertumbuhan PDRB

PDRB merupakan salah satu indikator makro yang dapat digunakan sebagai parameter prestasi ekonomi suatu wilayah serta dapat pula menggambarkan kemampuan suatu wilayah dalam mengelola sumber daya alam beserta faktor produksinya. Kemampuan ini tercermin pada besaran nilai tambah bruto, pada tiap-tiap sektornya. Secara umum data PDRB disajikan berdasarkan atas harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada setiap tahun, sedangkan PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada suatu tahun tertentu sebagai tahun dasar penghitungannya. PDRB atas dasar berlaku dapat digunakan untuk melihat pergeseran struktur ekonomi, sedangkan atas dasar harga konstan dapat digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahun.

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur tidak terlepas dari



kontribusi sektor-sektor ekonomi yang mendukungnya. Sektor pertambangan dan penggalian terutama subsektor pertambangan nonmigas (batubara) masih merupakan pendukung utama perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Dominasi subsektor ini ditandai dengan masih tingginya peranan pertambangan batubara tahun 2011-2015 antara 83,76 persen dari total PDRB ADHB Kabupaten Kutai Timur dengan migas dan batubara.

Nilai PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku dengan migas pada tahun 2011-2015 terus mengalami peningkatan dari Rp88.497.036,10 juta di tahun 2011 menjadi Rp102.686.280,97 juta (angka sangat sementara) pada tahun 2015. PDRB atas dasar harga berlaku dengan migas dan batu bara pada periode tersebut secara berturut-turut yaitu sebesar Rp 88.497.036,10 juta, Rp92.109.092,10 juta, Rp98.407.227,50 juta, Rp 97.024.451,90 juta dan Rp102.686.280,97 juta. Sedangkan PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas, pada periode 2011-2015 berturut-turut sebesar Rp87.954.141,10 juta, Rp 91.574.831,80 juta, Rp97.841.908,30 juta, Rp96.461.592,50 juta dan Rp 102.043.823,16 juta (angka sementara). Sementara itu, PDRB Kabupaten Kutai Timur atas dasar harga berlaku tanpa migas dan batu bara, pada periode 2011-2015 berturut-turut sebesar Rp16.594.642,40 juta, Rp18.737.089,10 juta, Rp 19.936.893,80 juta, Rp23.531.972,40 juta dan Rp 27.603.433,29 juta.

Laju Pertumbuhan ekonomi dengan migas dalam periode tahun 2011 hingga tahun 2015 cenderung mengalami penurunan dari 17,58 persen tahun 2011 menjadi 3,71 persen pada tahun 2015, tanpa migas dari tahun 2011 sebesar 17,82 persen menjadi 3,76 persen pada tahun 2015, serta tanpa migas dan batubara dari tahun 2011 sebesar 6,79 persen menjadi 6,52 persen pada tahun 2015.

Gambaran laju pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa hingga saat ini Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur masih sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (subsektor pertambangan non migas) yang kontribusinya hingga mencapai 80,56 persen dari keseluruhan nilai PDRB tahun 2015. Batubara menjadi andalan Kabupaten Kutai Timur karena produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar diekspor ke luar negeri sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu andalan Provinsi



Kalimantan Timur dalam mengekspor komoditi non migas khususnya batubara. Dominasi sektor batubara yang masih sangat tinggi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur perlu terus menyiapkan dan mengembangkan sektor-sektor potensi lainnya seperti pertanian dalam arti luas agar ketergantungan terhadap batubara dapat diperkecil. Mengingat dalam beberapa tahun terakhir sektor batubara mengalami penurunan dan hal ini berakibat pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur yang semakin melambat dari tahun-tahun sebelumnya.



Tabel 2.8
Perkembangan PDRB dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015

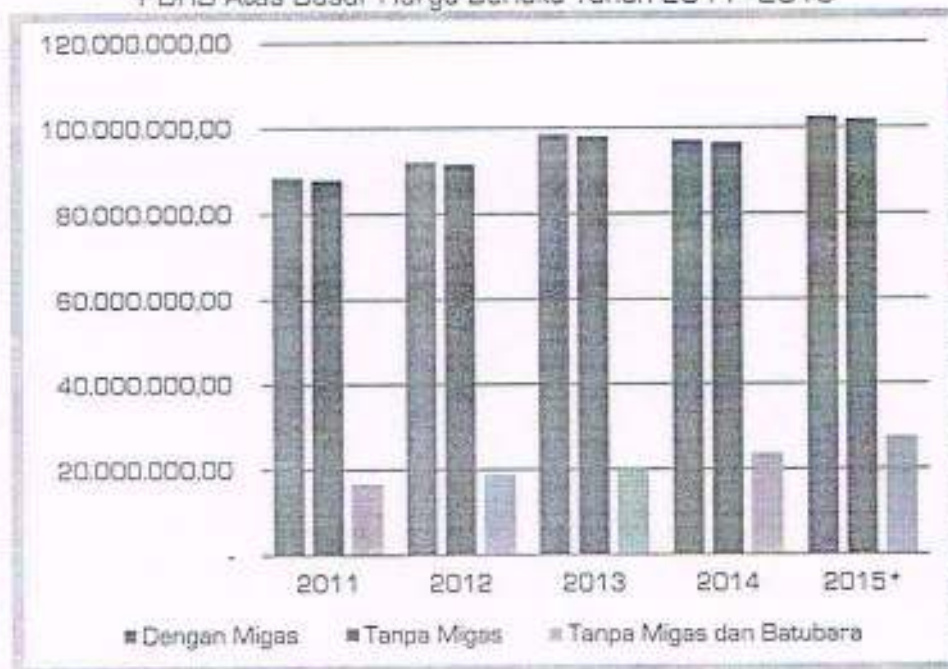
Tahun	Dengan Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas (Juta Rp)		Tanpa Migas & Batubara (Juta Rp)		Laju Pertumbuhan (%)		
	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Harga Berlaku	Harga Konstan 2010	Dengan Migas	Tanpa Migas	Tanpa Migas & Batubara
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2011	88.497.036,10	69.528.391,30	87.954.141,10	69.089.171,90	16.594.642,40	15.213.541,00	17,58	17,82	6,79
2012	92.109.092,10	77.552.439,70	91.574.831,80	77.156.307,10	18.737.089,10	16.265.039,20	11,54	11,68	6,91
2013	98.407.227,50	80.730.971,60	97.841.908,30	80.346.062,60	19.936.893,80	17.004.088,00	4,10	4,13	4,54
2014	97.024.451,90	83.597.148,80	96.461.592,50	83.227.493,80	23.531.972,40	17.978.326,30	3,55	3,59	5,73
2015*	102.686.280,97	86.702.092,38	102.043.823,16	86.357.934,61	27.603.433,29	19.151.292,08	3,71	3,76	6,52

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pembentukan PDRB tanpa migas dan batubara relatif sangat kecil. Hal ini menunjukkan potensi batubara, masih merupakan sektor tambang yang diunggulkan di Kabupaten Kutai Timur dan sebaliknya sektor migas dan sektor lainnya belum memberikan kontribusi yang besar dalam PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi ini harus menjadi perhatian lebih dan sekaligus tantangan ke depan agar dapatnya sektor migas dan sektor lainnya yang berpotensi dapat dikelola secara lebih maksimal dalam meningkatkan kontribusinya terhadap PDRB.

Gambar 2.2
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011-2015



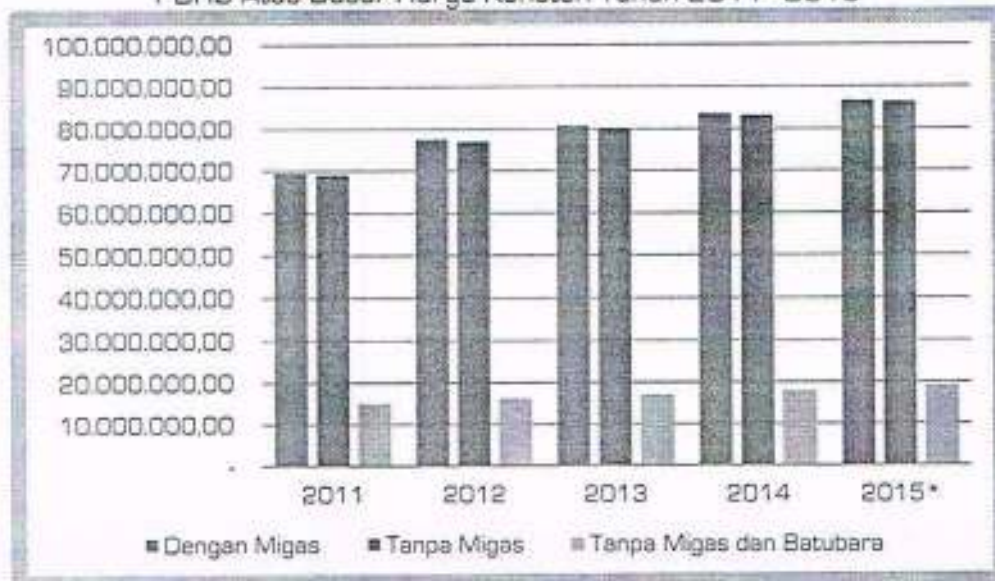
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2016

Gambar 2.2 dan 2.3 menunjukkan dominannya peranan sektor migas dan pertambangan [batubara] terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Kondisi seperti ini kurang menguntungkan bagi PDRB Kabupaten Kutai Timur karena situasi ini cukup lemah secara struktural, dalam artian terdapat ketergantungan yang tinggi dari PDRB terhadap hasil tambang tidak terbaharukan yaitu batubara hingga rata-rata 83,76 persen. Situasi PDRB seperti ini memerlukan kebijakan maupun langkah strategis dalam upaya melepaskan secara bertahap dari ketergantungan terhadap subsektor pertambangan khususnya dari batubara.



Gambar 2.3
PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Keterangan: *) Angka sangat sementara Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat dari PDRB berdasarkan 17 sektor usaha. Sektor usaha ini mencerminkan distribusi kontribusi masing-masing sector pada total perekonomian Kabupaten Kutai Timur. Sektor pertambangan dan penggalian masih merupakan sektor yang paling dominan pada perekonomian Kabupaten Kutai Timur, walau sektor ini sendiri sedang mengalami penurunan. Kontribusi sektor ini terhadap PDRB Kabupaten Kutai Timur adalah sebesar 85,13 persen pada tahun 2013, turun menjadi 81,77 persen pada tahun 2014 dan diperkirakan akan kembali turun menjadi sebesar 80,56 persen pada tahun 2015. Hal yang sebaliknya terjadi pada sektor Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan dan Jasa Pertanian. Sektor ini memberikan kontribusi terbesar kedua setelah Pertambangan dan Penggalian. Kontribusi sektor ini sebesar 5,83 persen pada tahun 2013, kemudian naik menjadi 7,72 persen pada tahun 2014, dan diestimasikan naik kembali pada tahun 2015 menjadi 8,52 persen. Sektor lain yang kontribusinya diatas 1 persen pada tahun 2015 adalah Industri Pengolahan (2,13 persen), Konstruksi (2,01 persen), dan sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda (1,45 persen).

Perkembangan PDRB atas dasar harga berlaku di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.9 di bawah ini :



Tabel 2.9
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Tahun 2011-2015 (Juta Rp)

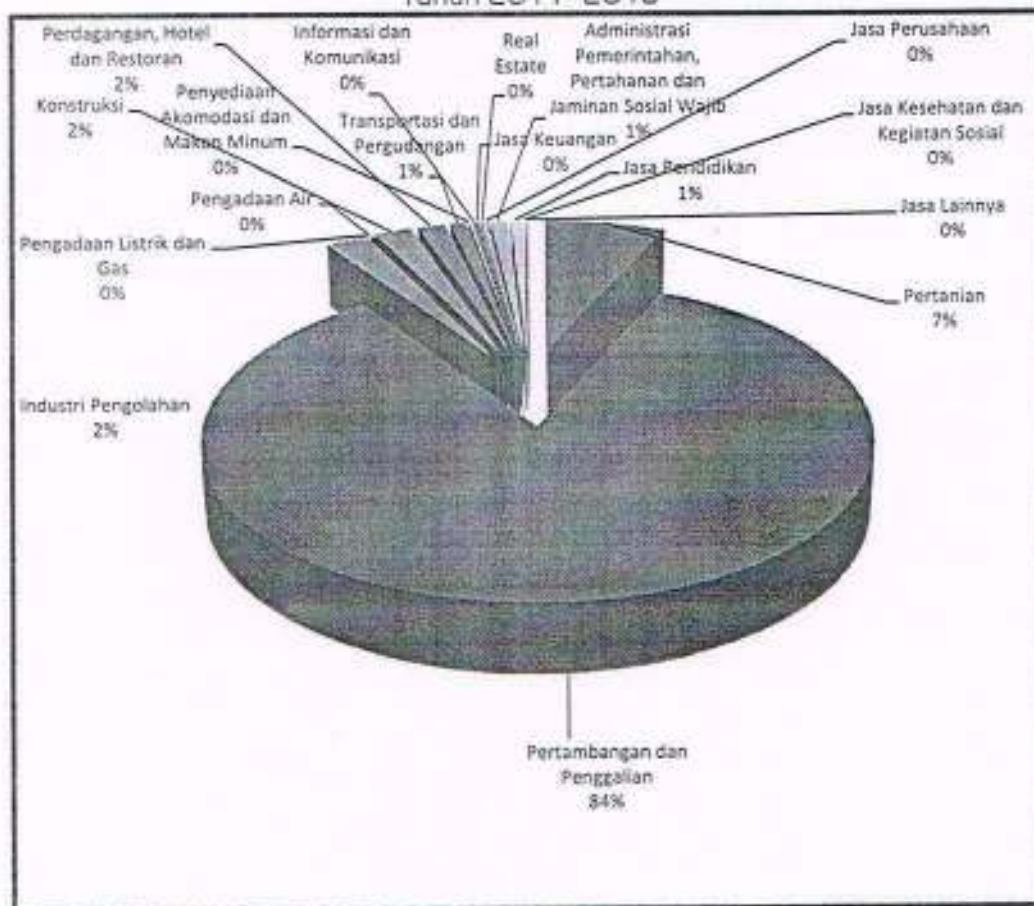
No	Sektor Usaha	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertanian, Kehutanan, Perikanan	4.971.730,20	5.581.927,70	5.734.689,00	7.492.825,30	8.745.195,28
2	Pertambangan dan Penggalian	76.331.422,80	78.374.603,30	83.774.390,40	79.332.261,10	82.720.155,75
3	Industri Pengolahan	1.755.504,20	1.972.437,60	2.097.450,90	2.520.049,10	2.831.459,82
4	Pengadaan Listrik dan Gas	4.040,40	4.158,20	4.153,20	4.384,40	4.705,98
5	Pengadaan Air	8.967,30	8.841,00	9.961,20	10.922,60	11.976,79
6	Konstruksi	1.617.782,50	1.769.291,30	1.975.099,10	2.116.697,70	2.268.447,77
7	Perdagangan, Hotel & Restoran	1.261.058,00	1.380.453,60	1.425.108,20	1.576.068,00	1.627.050,29
8	Transportasi dan Pergudangan	610.641,60	736.397,40	864.987,20	1.035.422,50	1.216.228,10
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	144.872,90	163.421,50	175.372,40	190.511,70	204.689,21
10	Informasi dan Komunikasi	161.341,30	178.145,00	194.524,10	220.635,00	240.920,85
11	Jasa Keuangan	120.483,10	126.576,00	132.197,30	136.625,40	142.693,00
12	Real Estate	242.743,10	255.942,90	271.300,30	280.460,20	297.288,72
13	Jasa Perusahaan	45.808,40	53.698,00	59.687,90	70.979,40	78.897,00
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	639.040,80	797.026,50	864.433,10	1.024.952,80	1.111.635,72
15	Jasa Pendidikan	404.288,40	511.112,70	612.659,40	772.571,70	926.064,47
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	82.165,50	90.311,30	98.150,00	108.915,50	118.368,98
17	Jasa Lainnya	95.145,60	104.748,10	113.063,80	130.169,40	140.503,24
Jumlah		88.497.036,10	92.109.092,10	98.407.227,50	97.024.451,80	102.686.280,97

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur dan Kab. Kutai Timur Tahun 2016



PDRB ADHB jika ditinjau menurut lapangan usaha selama periode 2011-2015 menunjukkan bahwa sektor pertambangan dan penggalian masih mendominasi dengan rata-rata kontribusi sebesar 83,76 persen. Namun perkembangan tahunan justru menunjukkan penurunan dimana pada tahun 2011 kontribusinya sebesar 86,25 persen menjadi 80,56 persen pada tahun 2015. Sementara itu, sektor pertanian perkembangan kontribusinya cukup baik yakni dari tahun 2011 sebesar 5,62 persen menjadi 8,52 persen pada tahun 2015. Rata-rata kontribusi selama periode 2011-2015 menunjukkan urutan yang paling tinggi adalah sektor pertambangan dan penggalian sebesar 83,76 persen, sektor pertanian sebesar 6,75 persen, sektor industri dan pengolahan 2,32 persen, konstruksi 2,03 persen dan perdagangan, hotel dan restoran sebesar 1,52 persen. Sedangkan 12 sektor lainnya masih dibawah 1 persen.

Gambar 2.4
Rata-rata Distribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Dengan Migas dan Batubara Menurut Lapangan Usaha
Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



B. PDRB Per Kapita

PDRB Per Kapita menggambarkan rata-rata pendapatan yang diterima penduduk suatu wilayah pada tahun tertentu. Secara konseptual PDRB Per Kapita, diperoleh dengan cara membagi total PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun pada tahun yang sama.

PDRB Per Kapita Kabupaten Kutai Timur selama periode 2011- 2015 yang dihitung berdasarkan tahun dasar 2010 cenderung meningkat meskipun pada tahun 2015 mengalami penurunan menurut angka estimasi. Data PDRB perkapita yang dipisahkan antara PDRB dengan migas dan PDRB tanpa migas dan batubara. PDRB Perkapita Dengan Migas dalam tahun 2015 diestimasikan menurun sebesar Rp1.444.021 dari Rp 272.303.416 pada tahun 2014 menjadi Rp 270.859.395 pada tahun 2015, diikuti pula dengan penurunan PDRB Perkapita Tanpa Migas dari Rp 271.099.328 menjadi Rp 269.784.238. Disisi lain, PDRB Tanpa Migas dan Batubara meningkat sebesar Rp 1.267.768 dari Rp 58.561.323 pada tahun 2014 menjadi Rp 59.829.091 pada tahun 2015.

Tabel 2.10
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Dengan Migas (Rp)	Tanpa Migas (Rp)	Tanpa Migas dan Batubara (Rp)
2011	258.086.085,00	256.455.723,00	56.471.941,00
2012	275.399.289,00	273.992.568,00	57.759.372,00
2013 ^{a)}	274.408.469,00	273.100.145,00	57.797.716,00
2014 ^{b)}	272.303.416,00	271.099.328,00	58.561.323,00
2015 ^{c)}	270.859.395,00	269.784.238,00	59.829.091,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Keterangan: a) Angka sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

b) Angka sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

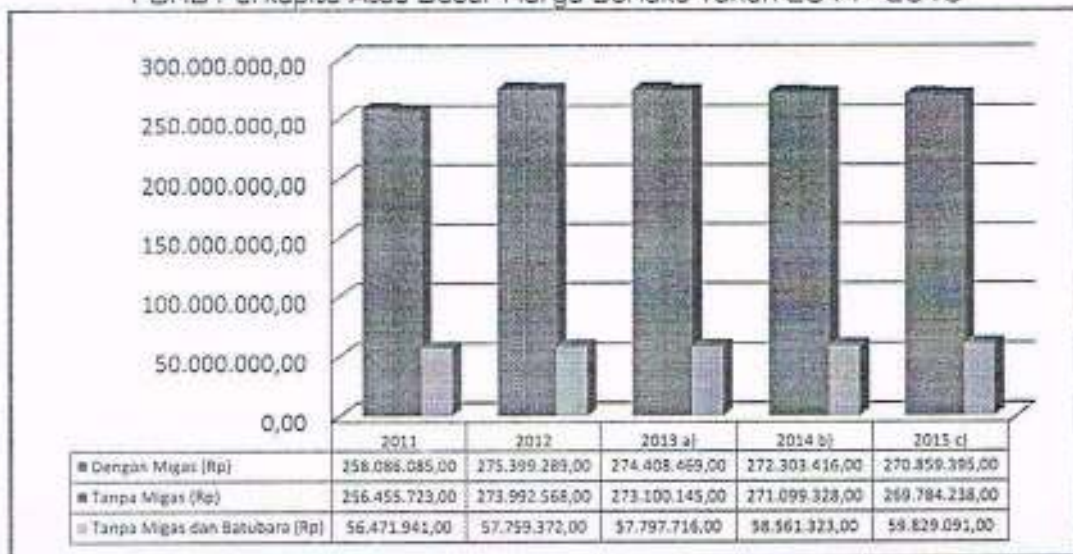
c) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Berdasarkan Tabel 2.10 di atas bahwa PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Dengan Migas menunjukkan peningkatan pada tahun 2012, kemudian mengalami penurunan selama 3 tahun (2013,2014 dan 2015). Demikian juga PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas mengalami pola yang sama dengan PDRB ADHB Dengan Migas. Sedangkan PDRB Perkapita ADHB Tanpa Migas dan Batubara menunjukkan peningkatan tiap tahunnya.

Perkembangan PDRB ADHB Perkapita tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Gambar di bawah ini:



Gambar 2.5
PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Tahun 2011 - 2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

Keterangan: a) Angka sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

b) Angka sangat sementara BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

c) Angka Estimasi Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

C. Kemiskinan

Kemiskinan merupakan permasalahan utama yang harus dipecahkan. Persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar berapa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Selain upaya memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan penanggulangan kemiskinan juga terkait dengan bagaimana mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Oleh karena itu penanggulangan kemiskinan secara sinergis dan sistematis harus dilakukan.

Perkembangan penduduk miskin Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.11 di bawah ini:

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Miskin
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Penduduk Miskin	Penduduk Miskin
	(Jiwa)	(%)
(1)	(2)	(3)
2011	27.432	6,37
2012	24.295	6,12
2013	27.200	9,06
2014	27.610	8,66
2015*	27.763	8,67

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016

*) Angka Sementara BAPPEDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



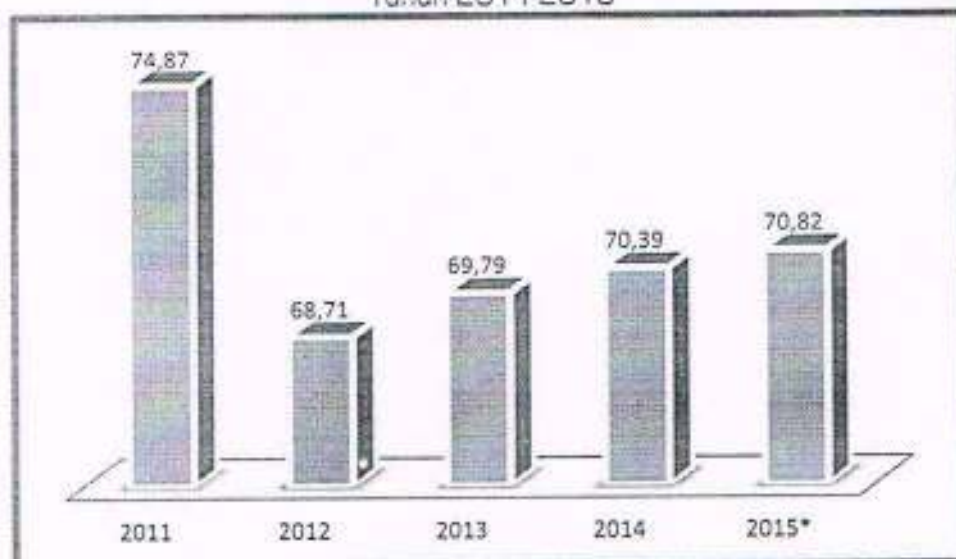
D. Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran. Pada tahun 2014 digunakan metode baru dalam penghitungan IPM. Pada metode baru menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik.

- Dengan memasukkan rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, dapat diperoleh gambaran yang lebih relevan dalam pendidikan dan perubahan yang terjadi.
- PNB menggantikan PDB karena lebih menggambarkan pendapatan masyarakat pada suatu wilayah.

Dengan menggunakan rata-rata geometrik dalam menyusun IPM dapat diartikan bahwa capaian satu dimensi tidak dapat ditutupi oleh capaian di dimensi lain. Artinya, untuk mewujudkan pembangunan manusia yang baik, ketiga dimensi harus memperoleh perhatian yang sama besar karena sama pentingnya.

Gambar 2.6
Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016
Keterangan: *) Angka sangat sementara

Berdasarkan metode penghitungan baru, capaian IPM Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2015 meningkat dari tahun 2014 sebagaimana pada Gambar 2.6 di atas.



2.1.2.2 Fokus Kesejahteraan Masyarakat

Analisis kinerja atas fokus kesejahteraan masyarakat dilakukan terhadap indikator angka melek huruf, angka rata-rata lama sekolah, angka partisipasi kasar, angka pendidikan yang ditamatkan, angka partisipasi murni, angka kelangsungan hidup bayi, angka usia harapan hidup, persentase penduduk yang memiliki lahan, dan rasio penduduk yang bekerja.

A. Pendidikan

Tabel 2.12
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka melek huruf (%)	97,99	98,23	98,28	98,09	98,28
2	Rata-rata lama sekolah	8,05	8,10	8,49	8,63	8,60
3	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD/MI (%)	120,36	125,52	119,86	118,67	113,83
4	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs (%)	98,36	100,59	101,31	100,94	99,39
5	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA (%)	69,68	72,08	82,56	72,19	87,38
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI (%)	99,51	99,58	99,66	99,03	97,35
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs (%)	62,56	84,29	66,53	87,69	97,26
8	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA (%)	51,50	52,08	60,78	64,82	63,32

Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015,

1) Angka Melek Huruf (AMH)

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ditandai oleh peningkatan indeks Pembangunan Manusia (IPM), dimana indikator pendidikan diukur dari Angka Melek Huruf penduduk dewasa serta rata-rata lama sekolah. Faktor lainnya adalah idealnya rasio siswa terhadap guru, rasio siswa terhadap daya tampung sekolah, dan rasio guru terhadap sekolah. Angka Melek Huruf telah digunakan sebagai indikator tercapainya *Education for All* (EFA) dan MDG's dan berperan penting dalam meningkatkan standar hidup masyarakat. Melek huruf merupakan prasyarat utama yang memungkinkan seseorang mengakses informasi dan pengetahuan serta memiliki kemampuan untuk memperoleh pekerjaan demi kehidupan yang lebih baik.

Indikator Angka Melek Huruf dapat digunakan untuk: 1) mengukur keberhasilan program-program pemberantasan buta huruf, terutama di daerah pedesaan dimana masih tinggi jumlah penduduk yang tidak bersekolah atau tidak



tamat SD; 2) menunjukkan kemampuan penduduk di suatu wilayah dalam menyerap informasi dari berbagai media; 3) menunjukkan kemampuan berkomunikasi baik lisan maupun tulisan yang mencerminkan perkembangan intelektual sekaligus kontribusi terhadap pembangunan daerah. Capaian dari tahun 2015 menunjukkan terjadi peningkatan angka melek huruf dibanding tahun 2014, dari 98,09 persen menjadi 98,28 persen.

2) Angka Rata-Rata Lama Sekolah

Rata-rata lama sekolah adalah rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang diduduki. Standar UNDP minimal 0 tahun dan maksimal 15 tahun.

Tabel 2.13
Rata-rata Lama Sekolah Penduduk
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Tahun	Rata-rata Lama Sekolah [Tahun]
(1)	(2)
2011	8,05
2012	8,10
2013	8,49
2014	8,63
2015	8,60

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016

Capaian rata-rata lama sekolah penduduk Kabupaten Kutai Timur menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun, dimana tahun 2012 adalah 8,10 tahun, kemudian pada tahun 2013 naik menjadi 8,49 tahun dan tahun 2014 naik lagi menjadi 8,63 tahun. Namun tahun 2015 sedikit menurun menjadi 8,60. Apabila angka ini dikonversikan ke jenjang pendidikan, rata-rata keseluruhan penduduk Kabupaten Kutai Timur sudah menduduki kelas 2 SMP dan hal ini berarti sudah melampaui angka 6 tahun (ulus SD).

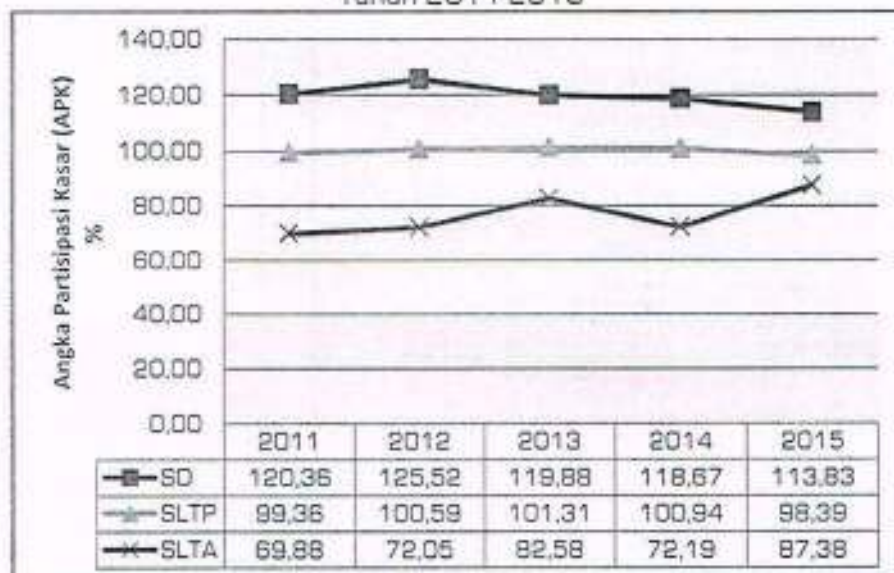
3) Angka Partisipasi Kasar (APK)

Angka Partisipasi Kasar (APK) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan APK ini digunakan untuk mengetahui banyaknya



anak yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi APK berarti semakin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Gambar 2.7
Angka Partisipasi Kasar [APK] Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011-2015



Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016 (dolah)

APK SD/MI di Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu 2012-2015 mengalami penurunan meski masih di atas 100 persen. Pada tahun 2011 capaian APK SD sebesar 120,36 persen, mengalami penurunan pada tahun 2015 sebesar 113,83 persen. Hal ini berarti bahwa rasio antara jumlah anak yang bersekolah ditingkat sekolah dasar lebih besar daripada jumlah anak usia sekolah di tingkat sekolah dasar (7-12 tahun), yaitu selisih 13,83 persen pada tahun 2015. Hal ini bisa diartikan bahwa ada sekitar 13,83 persen anak yang bersekolah di sekolah dasar atau yang setara merupakan anak dibawah atau diatas usia 7-12 tahun.

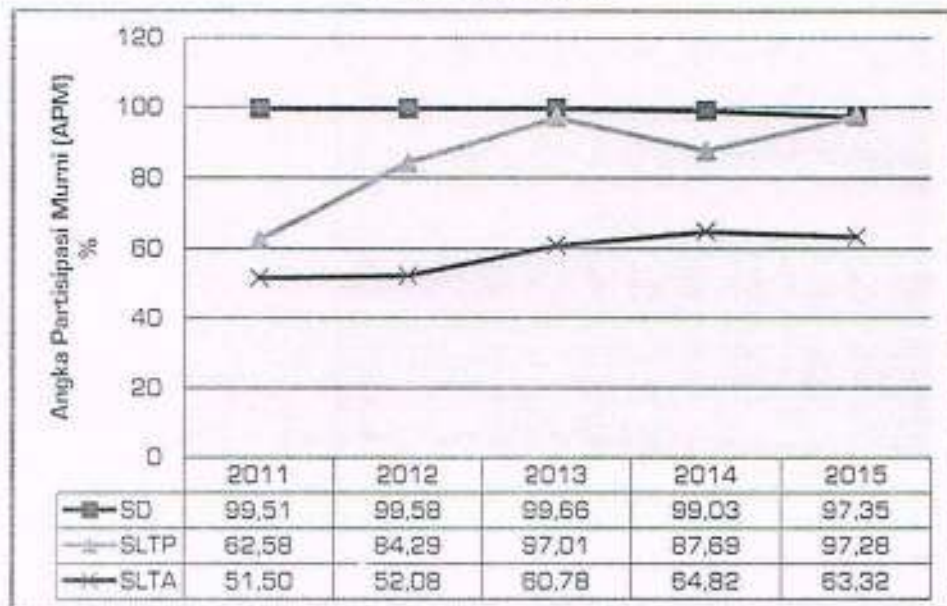
Pada jenjang sekolah yang lebih tinggi (SLTP atau SLTA) angka partisipasi kasar penduduk lebih rendah. Hal ini berkaitan dengan kegiatan ekonomi penduduk pada usia tersebut yang sebagian besar membantu orang tua untuk bekerja atau bahkan pada usia tersebut sudah berstatus kawin sehingga mempunyai kewajiban mengurus rumah tangga. Pada tingkat SLTP APK tercatat pada tahun 2015 sebesar 98,39 persen. Sedangkan APK SLTA sebesar 87,38 persen.



4) Angka Partisipasi Murni (APM)

Angka Partisipasi Murni (APM) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah siswa kelompok usia sekolah pada jenjang pendidikan tertentu dengan penduduk usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. Indikator Angka Partisipasi Murni (APM) ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Gambar 2.8
Angka Partisipasi Murni (APM) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016 (diolah)

Gambar 2.8 menunjukkan tren APM SD di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2011 hingga 2015 mengalami naik turun, pada tahun 2011 mencapai 99,51 persen, namun kemudian pada tahun 2015 sedikit menurun menjadi 97,35 persen.

Kondisi yang cukup berbeda terdapat pada pencapaian APM SLTP, dimana tahun 2011 sebesar 62,58 kemudian naik menjadi 97,28 persen pada tahun 2015. Demikian juga, trend peningkatan capaian yang positif terjadi pada APM SLTA. Pada tahun 2011 sudah tercapai 51,50 persen menjadi sebesar 63,32 persen pada tahun 2015.



B. Kesehatan

Tabel 2.14
Capaian Fokus Kesejahteraan Masyarakat Urusan Kesehatan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Indikator	2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
1	Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB) (%)	88,13	81,93	85,44	90,40	94,00
2	Angka Harapan Hidup (UHH)	68,72	68,79	68,86	69,39	69,58

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

*) Angka sangat sementara Bappeda Kab. Kutai Timur Tahun 2016

1) Angka Kelangsungan Hidup Bayi (AKHB)

Angka kelangsungan hidup bayi (AKHB) adalah probabilitas bayi hidup sampai dengan usia 1 tahun. Angka kelangsungan hidup bayi = (1-angka kematian bayi). AKB dihitung dengan jumlah kematian bayi usia dibawah 1 tahun dalam kurun waktu setahun per 1.000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.

Berdasarkan perkembangan Angka Kelangsungan Hidup Bayi Di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan perkembangan yang positif. Pada tahun 2011 sebesar 88,13 persen menjadi 94,00 persen pada tahun 2015. Perkembangan yang semakin meningkat tersebut secara otomatis menunjukkan angka kematian bayi di Kutai Timur mengalami penurunan. Kematian bayi adalah kematian yang terjadi antara saat setelah bayi lahir sampai bayi belum berusia tepat satu tahun. Banyak faktor yang dikaitkan dengan kematian bayi. Secara garis besar, dari sisi penyebabnya, kematian bayi ada dua macam yaitu endogen dan eksogen.

Angka Kematian Bayi (AKB) di Kabupaten Kutai Timur mengalami penurunan yang cukup cepat seperti pada Tabel 2.14 dan sudah tergolong rendah dan sudah jauh dibawah AKB Nasional (34 per 1.000 kelahiran) maupun target MDGs yaitu 23 per 1.000 kelahiran. Selain itu juga menunjukkan trend yang masih fluktuatif dari tahun ke tahun, diantaranya terlihat pada tahun 2011 sebesar 11,39 per 1.000 kelahiran, kemudian naik lagi pada tahun 2013 sebesar 18,07 menjadi 15,00 pada tahun 2014 . Hal ini mengindikasikan bahwa ibu-ibu usia produktif usia subur mengalami peningkatan dalam hal kesehatannya, memahami arti penting menjaga janin selama kehamilan dengan memakan makanan bergizi dan memeriksakan kesehatannya di tempat sarana kesehatan yang semakin lengkap. Hasil analisis SDKI menunjukkan pendidikan ibu



mempunyai hubungan yang terbalik dengan tingkat kematian bayi, dimana anak dari ibu dengan pendidikan rendah umumnya mempunyai tingkat kematian yang lebih tinggi daripada anak yang dilahirkan dari ibu yang berpendidikan tinggi. Rendahnya Angka Kematian Bayi di Kabupaten Kutai Timur dan adanya trend menurun dari tahun ke tahun, disinyalir turut memberikan kontribusi penting dalam peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Kutai Timur. Namun demikian data tersebut di atas perlu diverifikasi, apakah data yang sesungguhnya atau hanya data yang terlapor saja.

Tabel 2.15
Angka Kelahiran dan Kematian, dan Usia Harapan Hidup
Tahun 2011-2015

Variabel	Setuan	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)	(8)
Angka Kelahiran Total /TFR	Per Wanita	2,85	1,44	3,03 [*]	2,23	-
Angka Kematian bayi/IMR	Per 1000 kelahiran hidup	11,39	18,07	14,27	15,00	-
Angka Harapan Hidup	Tahun	68,72	68,79	69,17	69,38	69,58 [*]

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Keterangan: *) Angka sangat sementara Beppeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

2) Angka Harapan Hidup (AHH)

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator derajat kesehatan suatu negara dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan program kesehatan maupun penilaian kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Oleh karena itu, upaya peningkatan derajat kesehatan, diantaranya difokuskan untuk meningkatkan AHH yaitu rata-rata-tahun hidup yang akan dijalani oleh seorang bayi saat lahir sampai pada tahun tertentu saat ia meninggal.

Pada perkembangan capaian tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan terjadi peningkatan tiap tahunnya. Pada tahun 2014 sebesar 69,38 tahun menjadi sebesar 69,58 tahun (angka sangat sementara).

C. Pertanian

Pemanfaatan lahan digunakan sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penggunaan lahan yang cocok di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil optimasi antara hasil analisis kesesuaian lahan dengan aspek-aspek lain seperti tujuan pembangunan Kabupaten Kutai Timur, peraturan perundang-undangan



terkait, serta kondisi dan kecenderungan yang ada, maka pola pemanfaatan ruang yang direncanakan secara garis besar dapat dibagi menjadi 2 kelompok besar, yaitu kawasan lindung dan kawasan budidaya. Oleh karena itu, dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang tersebut, perlu dilakukan penatagunaan tanah dalam rangka menjamin penguasaan tanah, penggunaan tanah, dan pemanfaatan tanah sesuai arahan fungsi kawasan.

D. Ketenagakerjaan

Pertumbuhan penduduk di daerah memiliki konsekuensi bagi pembangunan yaitu bertambahnya sumber daya manusia sebagai tenaga kerja. Namun sebaliknya, pertumbuhan penduduk tidak terkendali akan membawa dampak yang kurang baik apabila tidak diikuti dengan penyediaan lapangan pekerjaan. Penyediaan lapangan kerja yang lebih banyak akan mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi suatu daerah, yang secara tidak langsung akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Tersediaanya sumber daya alam yang melimpah berpotensi untuk investasi besar. Masuknya investasi akan memberikan pembukaan lapangan kerja yang lebih banyak. Penyerapan tenaga kerja sebagai dampak masuknya investasi akan memberikan pendapatan kepada masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan kemampuan memenuhi kebutuhan dalam jangka panjangnya diharapkan mampu mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah.

Salah satu sasaran dalam pembangunan adalah diarahkan pada perluasan kesempatan kerja dan terciptanya lapangan kerja baru dalam jumlah dan kualitas yang seimbang dan memadai untuk dapat menyerap tambahan angkatan kerja yang memasuki pasar kerja setiap tahunnya. Karena itu peningkatan dalam jumlah angkatan kerja bila tidak diimbangi dengan penambahan kesempatan kerja akan menimbulkan permasalahan dalam pembangunan.

Pertumbuhan penduduk yang bekerja sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk usia kerja. Tingkat pertumbuhan penduduk usia kerja yang hampir sama dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang bekerja memberikan gambaran bahwa jumlah penduduk yang terserap ke dalam lapangan pekerjaan yang ada relatif lebih sedikit daripada penambahan jumlah penduduk yang siap kerja. Kesempatan kerja dapat menggambarkan ketersediaan pekerjaan bagi para pencari kerja.

Berdasarkan perkembangan jumlah tenaga kerja yang terserap, maka jumlah penduduk tenaga kerja di sektor pertanian menempati posisi yang paling tinggi dibandingkan dengan sektor usaha lain. Hal ini tentu memberikan pengaruh positif terhadap pembangunan perekonomian di Kabupaten Kutai Timur yang berbasis



agribisnis. Untuk mengetahui jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur yang bekerja menurut lapangan usaha tahun 2014-2015 dapat dilihat pada Tabel 2.16.

Tabel 2.16
Jumlah Tenaga Kerja di Kabupaten Kutai Timur
Berdasarkan Lapangan Pekerjaan Utama Tahun 2014-2015

Sektor/ Lapangan Pekerjaan Utama (1)	2014		2015	
	Jumlah (2)	% (3)	Jumlah (4)	% (5)
Pertanian	158.510	63,23	139.441	39,78
Pertambangan	26.818	10,70	27.801	19,67
Listrik, Gas dan Air Bersih	707	0,28	505	0,36
Bangunan	5.026	2,00	1.909	1,35
Perdagangan, Hotel dan Restoran	10.553	4,21	7.435	5,26
Pengangkutan dan Komunikasi	3.315	1,32	2.780	1,97
Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan	1.585	0,62	522	0,37
Jasa-jasa	44.181	17,62	44.181	31,25
Total	250.675	100,00	224.574	100,00

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Penduduk usia kerja di Kabupaten Kutai Timur bekerja pada berbagai lapangan usaha. Lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja di tahun 2015 adalah sektor pertanian dengan persentase sebesar 39,78 persen atau sejumlah 56.232 jiwa dan diikuti oleh sektor jasa sebesar 31,25 persen atau sebesar 44.181 jiwa, kemudian disusul sektor pertambangan dengan persentase 19,67 persen atau sebesar 27.801 jiwa. Sedangkan pada sektor-sektor lain yakni sektor perdagangan, hotel dan restoran, pengangkutan dan komunikasi, listrik, gas dan air bersih serta keuangan, persewaan dan jasa perusahaan masih dibawah 5 persen.

2.1.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pembangunan kebudayaan di Kabupaten Kutai Timur ditujukan untuk melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah serta mempertahankan jati diri dan nilai-nilai budaya daerah di tengah-tengah semakin derasnya arus informasi dan pengaruh negatif budaya global. Pembangunan seni dan budaya di Kabupaten Kutai Timur sudah mengalami kemajuan yang ditandai dengan meningkatnya pemahaman terhadap nilai budaya. Namun demikian upaya peningkatan jati diri masyarakat Kabupaten Kutai Timur seperti halnya solidaritas sosial, kekeluargaan, budaya dan perilaku positif seperti kerja keras, gotong royong, penghargaan terhadap nilai budaya dan bahasa masih perlu terus ditingkatkan. Kebersamaan dan kemandirian dirasakan makin memudar. Hal ini menunjukkan perlunya mengembalikan dan menggali kearifan lokal dalam kehidupan masyarakat.



2.1.3 ASPEK PELAYANAN UMUM

2.1.3.1 Fokus Layanan Urusan Wajib

A. Pendidikan

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan aspek yang sangat berperan dalam pembangunan suatu wilayah. SDM yang dimaksud adalah sumber daya yang berkualitas atau SDM yang memiliki pendidikan, *skill*, maupun kemauan untuk maju demi kesejahteraan hidupnya, masyarakat dan negara. Berkenaan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur mengedepankan peningkatan kualitas SDM melalui program-program pembangunan yang berorientasi pada pendidikan, baik formal maupun non formal yang tepat sasaran.

Tabel 2.17
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pendidikan
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD	%	99,14	99,25	107,02	101,22	105,08
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTP	%	95,13	94,82	94,89	118,82	71,74
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SLTA	%	83,45	83,78	68,63	95,03	65,12
Angka putus sekolah SD	%	0,25	0,28	0,10	0,15	0,1
Angka putus sekolah SLTP	%	0,43	0,67	0,19	0,03	0,42
Angka putus sekolah SLTA	%	0,64	0,67	0,20	0,20	-
Angka Kelulusan (AL) SD	%	100	100	100	100	100
Angka Kelulusan (AL) SLTP	%	99,60	99,00	99,94	100	100
Angka Kelulusan (AL) SLTA	%	99,99	99,00	99,00	99,25	66,00
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	%	55,421	65,261	67,12	65,64	73,50
Jumlah guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	%	32,31	59,17	64,68	67,81	112,00
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SD)		58,71	59,75	59,55	56,83	53,08
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SMP)		61,15	58,78	56,29	59,81	51,88
Rasio ketersediaan sekolah/penduduk (SMA)		34,07	31,74	39,6	33,47	-
Rasio guru/murid (SD)		14,66	15,11	14,98	6,37	16,93
Rasio guru/murid (SMP)		12,45	12,62	13,09	7,64	13,43
Rasio guru/murid (SMA)		11,62	12,62	11,64	6,92	-
Angka melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs	%	94,85	82,66	94,50	93,47	98,00
Angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	%	93,57	92,19	95,38	94,07	96,00

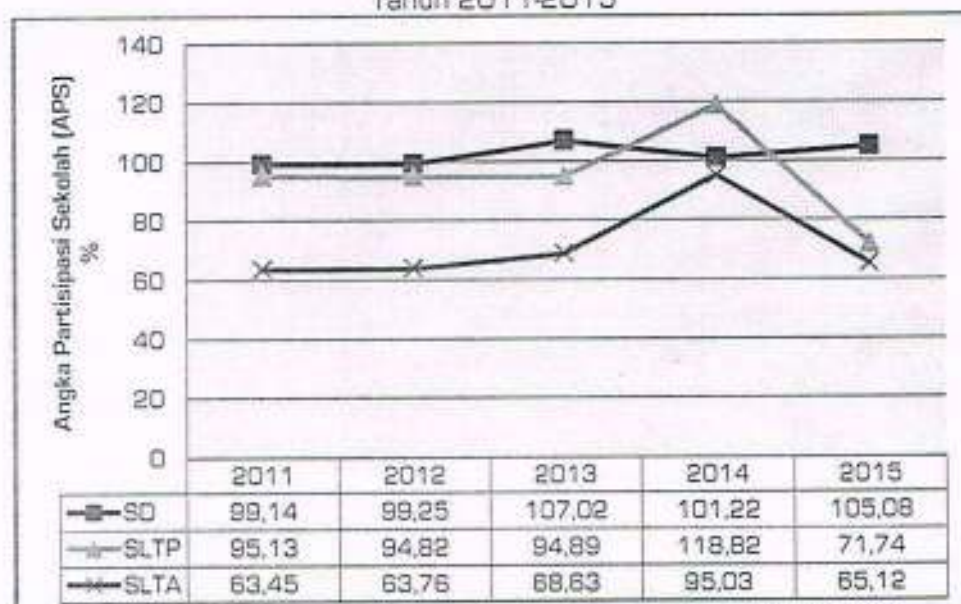
Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Keterangan: *) Rasio angka absolut, **) Rasio Persentase



1) Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka Partisipasi Sekolah (APS) didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid kelompok usia sekolah tertentu yang bersekolah pada berbagai jenjang pendidikan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang sesuai dan dinyatakan dalam persentase. APS dihitung berdasarkan jumlah murid kelompok usia pendidikan yang masih menempuh pendidikan dasar per 1.000 jumlah penduduk usia pendidikan dasar. Indikator ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang telah bersekolah di semua jenjang pendidikan. Makin tinggi APS berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah.

Gambar 2.9
Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Tingkat Pendidikan
Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Kutai Timur Tahun 2016 [diolah]

APS SD dari tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan capaian yang terus mengalami peningkatan, yakni dari sebesar 99,14 persen menjadi sebesar 105,08 persen.

APS SLTP dari tahun 2011 hingga tahun 2014 menunjukkan capaian yang meningkat yakni dari sebesar 95,13 persen menjadi 118,82 persen. Namun pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 71,74 persen. Demikian pula APS SLTA pada tahun 2011-2014 mengalami peningkatan yakni dari sebesar 63,45 persen menjadi 95,03 persen, sementara itu pada tahun 2015 mengalami penurunan yang drastis sebesar 65,12 persen.



2) Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Rasio Ketersediaan Sekolah terhadap penduduk usia sekolah adalah indikator untuk mengukur kemampuan jumlah sekolah dalam menampung penduduk usia pendidikan. Rasio ini bisa diartikan jumlah sekolah berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 penduduk usia pendidikan.

Tabel 2.18
Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Rasio Ketersediaan Sekolah Terhadap Penduduk Usia Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	58,71	59,75	59,55	56,83	53,08
SLTP	61,15	58,79	58,29	59,61	51,86
SLTA	34,07	31,74	39,60	33,47	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pada Tabel di atas menunjukkan bahwa rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah SD selama kurun waktu 2011-2015 cenderung mengalami penurunan, terutama terjadi pada tahun 2015. Kondisi yang relatif sama juga terdapat pada level SLTP dan SLTA.

3) Rasio Guru Terhadap Murid (SD/SLTP/SLTA)

Rasio guru terhadap murid adalah jumlah guru berdasarkan tingkat pendidikan per 10.000 jumlah murid berdasarkan tingkat pendidikan. Rasio ini mengindikasikan ketersediaan tenaga pengajar juga mengukur jumlah ideal murid untuk satu guru agar tercapai mutu pengajaran. Perkembangan Rasio Guru terhadap Murid selama tahun 2011-2015 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.19
Rasio Guru Terhadap Murid
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Rasio Guru Terhadap Murid	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
SD	14,66	15,11	14,98	6,37	16,93
SLTP	12,45	12,62	13,09	7,64	13,43
SLTA	11,62	12,62	11,64	6,92	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

4) Pendidikan Anak Usia Dini

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang



ditujukan bagi anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki jenjang pendidikan lebih lanjut, yang diselenggarakan pada jalur formal, nonformal, dan informal.

Ada dua tujuan diselenggarakannya pendidikan anak usia dini yaitu:

- a) Tujuan utama: untuk membentuk anak Indonesia yang berkualitas, yaitu anak yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan tingkat perkembangannya sehingga memiliki kesiapan yang optimal di dalam memasuki pendidikan dasar serta mengarungi kehidupan pada masa dewasa.
- b) Tujuan penyerta: untuk membantu menyiapkan anak mencapai kesiapan belajar [akademik] di sekolah.

Rentangan anak usia dini menurut Pasal 28 UU Sisdiknas Nomor 20/2003 ayat 1 adalah 0-6 tahun. Sementara menurut kajian rumpun keilmuan PAUD dan penyelenggaraannya di beberapa negara, PAUD dilaksanakan sejak usia 0-8 tahun. Dimana Ruang Lingkup Pendidikan Anak Usia Dini meliputi: a) *Infant* (0-1 tahun); b) *Toddler* (2-3 tahun); c) *Preschool/ Kindergarten children* (3-6 tahun); dan d) *Early Primary School* (SD Kelas Awal) (6-8 tahun).

Berdasarkan perkembangan capaian indikator PAUD selama kurun waktu 2011-2015 terjadi peningkatan berturut-turut sebesar 55,42 persen, 65,26 persen, 67,12 persen, 65,64 persen dan 73,50 persen. Dalam rangka memotivasi seluruh lembaga PAUD sebagai bentuk pemerataan dan perluasan akses pendidikan, peningkatan mutu, relevansi dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik yang merupakan tiga pilar pembangunan pendidikan di Indonesia maka perlu dilaksanakan apresiasi lembaga PAUD berprestasi.

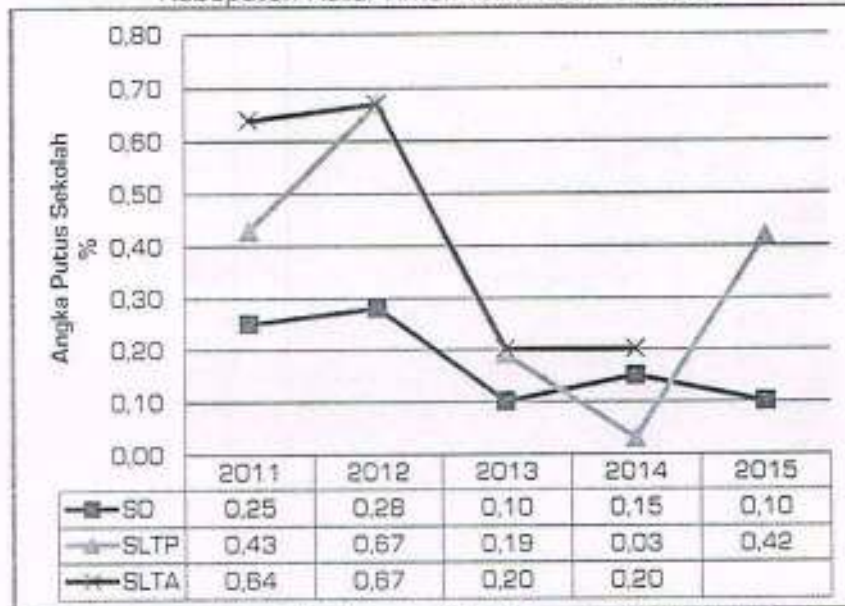
5) Angka Putus Sekolah (SD/SLTP/SLTA)

Angka Putus Sekolah didefinisikan sebagai perbandingan antara jumlah murid putus sekolah pada jenjang pendidikan tertentu (SD, SLTP, SLTA dan sebagainya) dengan jumlah murid pada jenjang pendidikan tertentu dan dinyatakan dalam persentase. Hasil perhitungan Angka Putus Sekolah ini digunakan untuk mengetahui banyaknya siswa putus sekolah di suatu jenjang pendidikan tertentu pada wilayah tertentu. Semakin tinggi Angka Putus Sekolah



berarti semakin banyak siswa yang putus sekolah di suatu jenjang pendidikan pada suatu wilayah.

Gambar 2.10
Angka Putus Sekolah Menurut Tingkat Pendidikan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015



Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 (diolah)

Berdasarkan angka putus sekolah SLTP dan SLTA selama kurun waktu 2011-2015 menunjukkan adanya trend positif penurunan meskipun masih fluktuatif, sedangkan capaian AptS SD masih terjadi fluktuasi bahkan capaian pada tahun 2015 relatif sama dengan tahun 2013 yaitu 0,10 persen. Sementara itu capaian AptS SLTP masih fluktuatif pada tahun 2014 sebesar 0,03 persen menjadi sebesar 0,42 persen pada tahun 2015.

Upaya untuk menurunkan angka putus sekolah dan meningkatkan angka kelulusan pada jenjang pendidikan dasar melalui peningkatan kesiapan anak bersekolah [*school readiness*]. Berbagai penelitian mengemukakan bahwa kabupaten/kota dengan tingkat partisipasi taman kanak-kanak yang tinggi cenderung memiliki angka putus sekolah yang rendah di tingkat sekolah dasar. Keikutsertaan anak-anak pada program pengembangan dan pendidikan anak usia dini [*early childhood education and development - ECED*] telah meningkatkan kesiapan anak untuk mengikuti pendidikan di sekolah dasar karena potensi anak yang meliputi kemampuan kognitif, emosional dan sosial terbina dengan baik.



6) Angka Kelulusan (SD/SLTP/SLTA)

Angka kelulusan adalah rasio antara murid yang lulus jenjang tertentu terhadap murid kelas tertinggi pada jenjang yang sama. Angka kelulusan merupakan indikator yang sangat penting dalam memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan. Selain itu Angka Lulusan (AL) merupakan indikator output yang memberikan gambaran tentang efisiensi proses pendidikan. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa dalam menamatkan pendidikannya di suatu jenjang pendidikan.

Tabel 2.20
Angka Kelulusan (AL) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

AL	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
SD	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
SLTP	99,60	99,00	99,94	99,25	100,00
SLTA	99,99	99,00	87,12	65,64	66,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Indikator Angka Kelulusan di Kabupaten Kutai Timur menunjukkan capaian yang sangat menggembirakan, dimana Angka Kelulusan SD dalam kurun waktu 2011 hingga 2015 tercapai 100 persen. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan siswa dalam mengikuti ujian dan mutu pendidikan tingkat SD di Kabupaten Kutai Timur cukup baik. Demikian pula capaian indikator Angka Kelulusan tingkat SLTP juga menunjukkan prestasi yang cukup baik, meskipun pada tahun 2015 akhirnya dapat mencapai 100 persen. Sedangkan capaian indikator Angka Kelulusan SLTA justru masih jauh dari harapan. Pada tahun 2015 mencapai 66,00 persen.

7) Angka Melanjutkan Sekolah

Angka melanjutkan ke SMP adalah perbandingan antara jumlah lulusan jenjang sekolah dasar, termasuk MI dan paket A setara SD terhadap jumlah siswa baru tingkat 1 pada jenjang SMP, termasuk MTs, dan paket B setara SMP dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memantau kemajuan siswa yang telah menyelesaikan pendidikan pada jenjang sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP.



Tabel 2.21
Angka Melanjutkan Sekolah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Angka Melanjutkan Sekolah	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
	(%)	(%)	(%)	(%)	(%)
SD/MI ke SMP/MTs	94,85	82,68	94,50	93,47	98,00
SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	93,57	92,19	95,38	94,07	96,00

Sumber : Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Tabel 2.21 menunjukkan capaian indikator Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dari tahun 2011 hingga 2015 yang masih fluktuatif (naik turun), dimana pada tahun 2014 telah mencapai 93,47 persen kemudian naik menjadi 98,00 persen. Angka Melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA dari tahun 2011 hingga 2015 juga masih fluktuatif (naik turun), dimana pada tahun 2014 telah mencapai 94,07 persen naik menjadi 96,00 persen pada tahun 2015.

8) Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S-1/D-IV

Berdasarkan capaian indikator tersebut, menunjukkan selama kurun waktu 2011-2015 mengalami capaian yang cukup positif. Pada tahun 2011 sebesar 32,31 persen naik menjadi 67,81 persen pada tahun 2014, kemudian tahun 2015 naik menjadi 112,00 persen.

Dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan diperlukan peningkatan tenaga guru yang memenuhi standar kualifikasi. Terdapat hubungan erat antara kualifikasi akademik guru dengan keberhasilan pendidikan dan kualitas belajar mengajar. Beberapa kendala yang masih terjadi diantaranya adalah distribusi guru yang tidak merata di perkotaan maupun perdesaan terutama daerah terpencil, sehingga mengakibatkan beberapa guru memiliki beban kerja yang berlebih. Hal ini mengakibatkan proses belajar mengajar tidak berjalan sebagaimana mestinya. Berdasarkan hal tersebut berarti tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan kualifikasi akademik dan profesionalisme guru serta meningkatkan pemerataan distribusinya.



B. Kesehatan

Kesehatan merupakan salah satu faktor utama selain bidang pendidikan, yang diperlukan untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah harus senantiasa meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan diantaranya pemerataan pelayanan kesehatan serta sarana prasarana yang memadai.

Tabel 2.22
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kesehatan
Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Rasio puskesmas, poliklinik, pusat per satuan penduduk	0,29	0,24	0,25	0,37	0,37
Rasio rumah sakit per satuan penduduk	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01
Rasio dokter per satuan penduduk	0,19	0,19	0,18	0,24	0,30
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,67	2,88	2,66	0,52	
Rasio Posyandu per satuan balita	7,09	6,99	6,99	7,43	7,02
Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan [%]	100	100	100	100	
Cakupan puskesmas [%]	105,56	116,67	116,67	116,67	
Cakupan puskesmas pembantu [%]	73,33	73,33	77,78	61,48	
Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin [%]	27,02	39,31	12,12	30,09	
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani [%]	58,21	41,79	62,42	62,81	
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan [%]	72,90	85,15	99,78	95,35	
Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) [%]	61,43	65,93	83,70	68,15	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA [%]	35,38	40,49	45,04	44,28	
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD [%]	100	100	100	100	
Cakupan kunjungan bayi [%]	87,26	72,41	90,73	94,17	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Derajat kesehatan atau tingkat kesehatan masyarakat Kutai Timur dapat dilihat dari beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilannya, yakni lingkungan sehat, pelayanan kesehatan, faktor turunan dan perilaku sehat. Di antara empat faktor tersebut, pelayanan kesehatan memiliki peranan yang sangat strategis karena melalui pelayanan kesehatan ini tidak saja dapat dilakukan pelayanan kesehatan, tetapi juga upaya kesehatan bersifat preventif, rehabilitasi, edukatif.

Permasalahan yang muncul pada sektor kesehatan secara umum mencakup:

(1) dana kesehatan yang terbatas. (2) terbatasnya dan rendahnya



profesionalisme tenaga medis dan paramedis, [3] rendahnya mutu layanan medis, [4] sarana dan prasarana kesehatan yang dimiliki sangat terbatas, [5] belum terpenuhinya mutu gizi masyarakat yang layak, dan [6] wilayah yang harus dileyoni sangat luas sebarannya.

Penjelasan capaian Urusan Kesehatan sebagaimana berikut:

1) Rasio puskesmas, poliklinik, pustu per satuan penduduk

Puskesmas, Poliklinik dan Pustu merupakan salah satu sarana penunjang pelayanan kesehatan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Semakin banyak jumlah ketersediannya, maka semakin memudahkan masyarakat dalam menjangkau pelayanan kesehatan.

Tabel 2.23
Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Puskesmas	19	19	21	21	21
2	Jumlah Poliklinik	11	12	15	28	29
3	Jumlah Pustu	95	95	105	104	104
4	Jumlah 1-3	125	126	140	153	154
5	Jumlah Penduduk	430.865	527.723	554.751	412.698	413.508
6	Rasio Puskesmas per satuan penduduk	0,04	0,03	0,03	0,05	0,05
7	Rasio poliklinik per satuan penduduk	0,02	0,02	0,02	0,06	0,07
8	Rasio pustu per satuan penduduk	0,22	0,18	0,18	0,25	0,25
9	Rasio Puskesmas, Poliklinik dan Pustu	0,29	0,24	0,25	0,37	0,37
10	Jumlah Kecamatan	18	18	18	18	18
11	Jumlah Desa/Kelurahan	134	134	134	134	133
12	Rasio Puskesmas per Kecamatan	1,055	1,055	1,166	1,166	1,166

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pada tahun 2011 hingga tahun 2015 menunjukkan peningkatan jumlah puskesmas dan rasio puskesmas per kecamatan. Pada tahun 2011 sebesar 1,055 menjadi 1,166 pada tahun 2015. Capaian rasio puskesmas, poliklinik dan pustu mengalami peningkatan dari 0,29 tahun 2011 menjadi 0,37 pada tahun 2015.

2) Rasio rumah sakit per satuan penduduk

Salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi masalah kesehatan masyarakat adalah dengan membangun atau memperbaiki fasilitas kesehatan, diantaranya Ketersediaan berbagai sarana kesehatan (misal: Rumah Sakit) di Kutai Timur. Rumah sakit merupakan pelayanan kesehatan pada masyarakat



yang bergerak dalam kegiatan kuratif dan rehabilitatif. Semakin banyak jumlah ketersediaan rumah sakit akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Tabel 2.24 menunjukkan bahwa di Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2011 terdapat 6 Rumahsakit dan baru tahun 2015 bertambah 1 RS sehingga menjadi 7 rumah sakit. Kondisi ini menggambarkan perkembangan yang relatif lambat hingga tahun 2015 jika dibandingkan dengan laju penambahan penduduk sehingga rasio RS per jumlah penduduk semakin kecil, yaitu pada tahun 2011 sebanyak 1 RS : 71.811 jiwa, kemudian pada tahun 2015 perbandingan dengan jumlah penduduk sebesar 1 RS : 59.073 jiwa.

Tabel 2.24
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Rumah Sakit	6	6	7	7	7
2	Jumlah Penduduk	430.865	527.723	554.751	412.698	413.508
3	Rasio	0,01	0,01	0,01	0,01	0,01

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pelayanan sarana kesehatan (Rumah Sakit) dapat diukur kinerjanya antara lain dengan melihat, 1) Persentase pemanfaatan tempat tidur rumah sakit atau *Bed Occupation Rate (BOR)* yang ideal 60-80 persen; 2) Rata-rata lama rawat seorang pasien atau *Average Length of Stay (ALOS)* yang ideal 6-9 hari; 3) Rata-rata tempat tidur tidak ditempati/ *Turn of Interval (TOI)* yang ideal antara 1-3 hari; 4) angka kematian penderita yang dirawat < 48 jam/ *Net Death Rate (NDR)* dengan nilai yang dapat ditolerir adalah 25 per 1000 penderita keluar; 5) angka kematian umum penderita yang dirawat rumah sakit/ *Gross Death Rate (GDR)* dengan angka yang dapat ditolerir maksimum 45.

Jumlah pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi di Kabupaten Kutai Timur akan berimplikasi pada rasio jumlah rumah sakit. Oleh karena itu, yang patut mendapatkan perhatian oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur adalah melaksanakan program-program dan kegiatan dalam meningkatkan rasio rumah sakit yang perlu ditingkatkan seiring dengan penambahan jumlah penduduk yang cepat terutama karena faktor migrasi sebagai bentuk pelayanan umum bagi masyarakat.



3) Rasio dokter per satuan penduduk

Ketersediaan tenaga kesehatan khususnya, dokter di Kabupaten Kutai Timur tahun 2013 dan 2014 masih belum ideal berdasarkan rasio ideal perbandingan dengan jumlah penduduk berdasarkan standar Indonesia sehat dan WHO (1 dokter untuk 2500 jiwa). Demikian juga berdasarkan sebaran dokter masih terjadi ketimpangan, dimana tenaga dokter 50 persen lebih masih terkonsentrasi di ibukota kabupaten. Jumlah dokter umum di Kabupaten Kutai Timur sebesar 91 dokter umum, dan 46 diantaranya berada di Kecamatan Sangatta Utara. Tenaga dokter paling banyak terdapat di RSUD Sangatta yaitu 32 orang, diikuti puskesmas sangatta selatan 8 orang, kemudian puskesmas teluk lingga 7 orang dan RS SOHC 6 orang.

Tabel 2.25
Rasio Dokter, Tenaga Kesehatan per Satuan Penduduk
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Dokter Umum	66	103	103	109	121
2	Jumlah Dokter Gigi	25	25	29	35	35
3	Jumlah Dokter Spesialis	19	19	16	28	31
4	Bidan	232	267	266	305	339
5	Perawat	430	512	454	506	571
6	Tenaga Farmasi	39	55	32	74	69
7	Tenaga Sanitarian	12	22	11	19	19
8	Kesehatan Masyarakat	38	34	69	78	69
9	Tenaga Gizi	23	22	10	23	23
10	Tenaga Terapi Fisik	5	6	3	6	6
11	Tenaga Ketenikisan Medis	33	41	36	41	60
12	Jumlah Penduduk	430.865	527.723	554.751	412.698	413.508
13	Rasio dokter terhadap penduduk	1:5.010	1:5.123	1:5.386	1:4.128	
14	Rasio dokter spesialis terhadap penduduk	1:22.677	1:27.774	1:34.672	1:14.739	
15	Rasio dokter gigi terhadap penduduk	1:17.234	1:21.109	1:19.129	1:12.506	
16	Rasio tenaga farmasi dan apoteker terhadap penduduk	1:1.785,8 4	-	-	-	
17	Rasio tenaga gizi terhadap penduduk	1:18.733	1:23.987	1:55.475	1:20.635	
18	Rasio tenaga keperawatan terhadap penduduk	1:920,65	-	-	-	
19	Rasio tenaga bidan terhadap penduduk	1:1.857	1:1.977	1:2.088	1:1.353	
20	Rasio tenaga kesehatan masyarakat terhadap penduduk	1:11.338	1:15.521	1:8.040	1:6.678	
21	Rasio tenaga sanitasi terhadap penduduk	1:35.905	1:23.987	-	-	
22	Rasio tenaga teknis medis terhadap penduduk	1:13.056	1:12.871	1:15.490	1:9.598	

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 (Data diolah)

4) Rasio tenaga medis per satuan penduduk

Rasio tenaga medis per jumlah penduduk adalah jumlah jumlah tenaga medis per 1.000 penduduk. Rasio ini mengukur ketersediaan akses penduduk terhadap



tenaga medis. Capaian rasio tenaga medis per satuan penduduk Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 5 (lima) tahun menunjukkan capaian yang positif meskipun naik turun namun masih mencapai target RPJMD. Capaian selama 3 tahun terakhir 2011-2013 berturut-turut sebesar 2,67, 2,88 dan 2,66. Namun menurun menjadi 0,52 tahun 2014 di bawah target RPJMD. Sementara target tahunan dari tahun 2011 hingga tahun 2015 sebesar 1,74. Upaya yang dapat dilakukan adalah dengan meningkatkan rasio, karena pada tahun 2014 mengalami penurunan serta melakukan pendistribusian tenaga medis yang lebih merata guna meningkatkan kualitas pelayanan.

5) Rasio posyandu per satuan balita

Pemeliharaan kesehatan ibu dan anak-anak sejak usia dini merupakan suatu strategi dalam upaya pemenuhan pelayanan kesehatan dasar yang meliputi peningkatan status kesehatan dan gizi yang baik, lingkungan yang sehat dan aman, pengembangan psikososial/emosi, kemampuan berbahasa dan pengembangan kemampuan kognitif (daya pikir dan daya cipta) serta perlindungan anak. Pengalaman empirik di beberapa tempat menunjukkan, bahwa strategi pelayanan kesehatan dasar masyarakat dengan fokus pada ibu dan anak seperti itu, dapat dilakukan pada Posyandu.

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat (UKBM) yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat, dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar, untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.

Tabel 2.26
Jumlah Posyandu dan Balita
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah Posyandu	214	213	243	273	273
2	Jumlah Balita	30.189	31.917	34.775	36.766	39.871
3	Rasio	7,09	6,99	6,99	7,43	7,02

Sumber: Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Capaian rasio posyandu per satuan balita pada tahun 2014 sebesar 7,43 kemudian pada tahun 2015 menjadi 7,02. Upaya awal yang dapat dilakukan



dalam rangka untuk update perkembangan rasio posyandu adalah melakukan pendataan wilayah kerja posyandu termasuk jumlah balita. Sehingga dapat diketahui apakah jumlah posyandunya memang kurang atau jumlah balita yang terus meningkat.

6) Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan

Gizi buruk adalah bentuk terparah dari proses terjadinya kekurangan gizi menahun. Cakupan balita gizi buruk mendapat perawatan adalah balita gizi buruk yang ditangani di sarana pelayanan kesehatan sesuai tatalaksana gizi buruk di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Capaian tahun 2014 adalah 100 persen yaitu semua kasus balita gizi buruk yang terjadi di tahun tertentu mendapat perawatan insentif, oleh karena capaian ini harus terus dipertahankan.

7) Cakupan Puskesmas

Puskesmas adalah kesatuan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat yang juga membina peran serta masyarakat disamping memberikan pelayanan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu kepada masyarakat di wilayah kerjanya dalam bentuk kegiatan pokok. Berdasarkan tren capaian cakupan puskesmas pada kurun waktu 2013-2014 menunjukkan capaian yang positif yakni sebesar 116,67 persen.

8) Cakupan Puskesmas Pembantu

Puskesmas Pembantu yaitu Unit pelayanan kesehatan yang sederhana dan berfungsi menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan yang dilakukan puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.

Berdasarkan tren capaian pada kurun waktu 2011-2014 menunjukkan adanya kenaikan yakni sebesar 68,15 persen pada tahun 2011 menjadi 81,48 persen pada tahun 2014. Capaian tersebut telah melampaui target pada tahun 2015 sebesar 78,15. Oleh karena itu berdasarkan capaian tahun 2014 tersebut, maka target pada akhir tahun 2015 yaitu sebesar 78,15 sangat besar kemungkinan akan terlampaui dengan program yang telah dilaksanakan.

9) Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada



tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Target cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah 100 persen artinya setiap ibu yang mengalami komplikasi kebidanan mendapat penanganan oleh tenaga kesehatan. Pada tahun 2011 hingga tahun 2013 masih terjadi fluktuasi yakni berturut-turut sebesar 58,21, 41,79, 62,42 persen. Kemudian naik pada tahun 2014 sebesar 82,81 persen namun masih di bawah target. Masih rendahnya capaian dan adanya kecenderungan penurunan cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani harus segera mendapatkan perhatian yang serius guna menemukan penyebabnya. Apakah karena faktor pengumpulan data atau faktor kondisi yang sebenarnya. Jika kondisi yang sebenarnya akan berpotensi kepada meningkatnya angka kematian bayi dan angka kematian ibu.

10) Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan adalah ibu bersalin yang mendapat pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu.

Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2013-2014 masih terjadi fluktuatif yakni berturut-turut sebesar 99,78 persen menjadi 95,35 persen. artinya telah mencapai target sebesar 56 persen tiap tahunnya. Jadi, meskipun capaiannya masih fluktuatif tetap pada posisi sudah *on-track* Sehingga pada akhir tahun pelaksanaan RPJMD tahun 2015 diperkirakan akan bisa melampaui target yang telah ditetapkan dengan berdasarkan capaian dari tahun-tahun sebelumnya yang cukup tinggi.

11) Cakupan desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Pencapaian *Universal child immunization* (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi secara lengkap pada sekelompok bayi. Apabila cakupan UCI dikaitkan dengan batasan suatu wilayah tertentu, berarti dalam wilayah tersebut menggambarkan besarnya tingkat kekebalan masyarakat atau bayi (*herd immunity*) terhadap penularan penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Dalam hal ini pemerintah menargetkan pencapaian UCI pada wilayah administrasi desa/kelurahan. Suatu desa/kelurahan telah mencapai



target UCI apabila >80 persen bayi di desa/kelurahan tersebut mendapat imunisasi lengkap dalam satu tahun.

Jika dilihat dari rasio tenaga medis per satuan penduduk dan rasio posyandu per satuan balita yang sedikit di bawah target serta cakupan kunjungan bayi yang sudah melebihi target di tahun 2014, dimana capaian cakupan desa/Kelurahan UCI mencapai 68,15 melebihi target sebesar 55 persen, Melihat dari perpaduan data tersebut, disinyalir bahwa belum semua bayi yang berkunjung ke pelayanan kesehatan termasuk posyandu dan pustu mendapatkan pelayanan imunisasi atau saat kunjungan bayi, kader atau tenaga kesehatan kurang memberikan informasi tentang manfaat dan jadwal imunisasi yang lengkap.

12] Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA

Tuberculosis adalah suatu penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh Kuman "*mycobacterium tuberculosis*". Angka penemuan pasien baru TB BTA positif atau *Case Detection Rate* (CDR) adalah persentase jumlah penderita baru TB BTA positif yang ditemukan dibandingkan dengan jumlah perkiraan kasus baru TB BTA positif dalam wilayah tertentu dalam waktu satu tahun.

Upaya dalam menanggulangi TB baru di Kabupaten Kutai Timur, dapat dilihat dari capaian pada tahun 2013 sebesar 45,04 persen, sedangkan pada tahun 2014 meningkat menjadi 44,28 persen. Meskipun terjadi kenaikan cakupan CDR, namun capaian ini masih jauh dari target pada tahun 2015 yaitu 70 persen. Menurut hasil penelitian Pasaribu (2005) menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi rendahnya CDR pada program TBC adalah kemiskinan, penyuluhan kesehatan dan perlunya peningkatan infrastruktur dan sumber daya. Mitos yang terkait dengan penularan TB masih dijumpai di masyarakat. Sebagai contoh, studi mengenai perjalanan pasien TB dalam mencari pelayanan di Yogyakarta telah mengidentifikasi berbagai penyebab TB yang tidak infeksius, misalnya merokok, alkohol, stres, kelelahan, makanan gorengan, tidur di lantai, dan tidur larut malam (Kemenkes, RI, 2011).

Stigma TB di masyarakat terutama dapat dikurangi dengan meningkatkan pengetahuan dan persepsi masyarakat mengenai TB, mengurangi mitos-mitos TB dapat dilakukan melalui kampanye pada kelompok tertentu dan membuat materi penyuluhan yang sesuai dengan budaya setempat agar pengetahuan masyarakat tentang TB meningkat. Sehingga masyarakat dapat mengidentifikasi gejala TB pada dirinya sendiri dan orang yang berada di sekitarnya, untuk



kemudian menyarankan agar memeriksakan ke Puskesmas atau pelayanan kesehatan terdekat.

13) Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD

Demam berdarah dengue (DBD) adalah suatu penyakit yang disebabkan oleh infeksi virus dengue. DBD disebabkan oleh salah satu dari empat serotipe virus dari *genus Flavivirus, famili Flaviviridae*. Setiap serotipe cukup berbeda sehingga tidak ada proteksi-silang dan wabah yang disebabkan beberapa serotipe [*hiperendemisitas*] dapat terjadi. Virus ini bisa masuk ke dalam tubuh manusia dengan perantara nyamuk *Aedes aegypti* dan *Aedes albopictus*.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD adalah persentase penderita DBD yang ditangani sesuai standar di satu wilayah dalam waktu 1 [satu] tahun dibandingkan dengan jumlah penderita DBD yang ditemukan/dilaporkan dalam kurun waktu satu tahun yang sama. Capaian penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD di Kabupaten Kutai Timur sebesar 100 persen pada tahun 2013 dan tahun 2014.

14) Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien masyarakat miskin adalah jumlah kunjungan pasien masyarakat miskin di sarana kesehatan strata pertama di satu wilayah kerja tertentu pada kurun waktu tertentu. Cakupan rujukan pasien miskin adalah jumlah kunjungan pasien miskin di sarana kesehatan strata dua dan strata tiga pada kurun waktu tertentu [lama & baru].

Capaian pada tahun 2011 hingga tahun 2013 menunjukkan capaian berturut-turut sebesar 27,02 persen, 39,31 persen, dan 10,73 persen. Sementara target RPJMD tahun 2011 hingga tahun 2013 berturut-turut sebesar 78 persen, 81 persen, 84 persen. Kemudian naik menjadi 30, 09 persen tahun 2014.

15) Cakupan kunjungan bayi

Cakupan kunjungan bayi adalah cakupan bayi yang memperoleh pelayanan kesehatan sesuai dengan standar oleh dokter, bidan, dan perawat yang memiliki kompetensi klinis kesehatan, paling sedikit 4 kali disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Cakupan kunjungan bayi di kabupaten Kutai Timur telah jauh mencapai target di tahun 2013 dan tahun 2014 yaitu mencapai sebesar 90,73 persen dan 94,17.



C. Pekerjaan Umum

Tabel 2.27
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pekerjaan Umum
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]
Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	%	56,91	58,53	46,85	51,79	-
Rasio jaringan irigasi		11	3	2	1,4	0,08
Luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	%	72,99	74,99	43,32	43,33	43,33
Rasio tempat ibadah per satuan penduduk		2,5	2,94	2,72	2,57	-
Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk	-	28,69	27,71	27,71	5,52	5,52
Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air [minimal 1,5 m]		0,079	0,1	0,49	0,51	-
Rasio panjang jalan dilalui roda 4		72	80	80		-
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	%	35	40,50	29,76	144,48	-
Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	%	0,16	0,16	0,16	NA	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Proporsi Panjang Jaringan Jalan Berdasarkan Kondisi Jalan

Pembangunan transportasi di Kabupaten Kutai Timur memiliki arti terpenting dan strategis untuk mendorong pertumbuhan dan pemerataan pembangunan. Berdasarkan karakteristiknya, wilayah Kutai Timur dapat dikategorikan tiga kawasan yang berbeda, yakni kawasan pantai/pesisir, pedalaman, dan kawasan perkotaan. Meskipun hampir semua kawasan memiliki potensi sumber daya alam yang besar, namun karena terletak secara geografis dan topografinya relatif sulit dan berat, sehingga kawasan pedalaman mengalami ketertinggalan.

Kondisi minimnya aksesibilitas dan pola penyebaran penduduk yang masih timpang semakin menciptakan kesenjangan ekonomi dan disparitas regional antar kawasan-kawasan tersebut. Pembangunan transportasi sangat berperan dalam langkah awal sebagai upaya pemerataan pembangunan di semua sektor. Jalan sebagai sarana penunjang transportasi memiliki peran penting khususnya untuk transportasi darat. Perkembangan panjang jalan dan kondisi baik mengalami peningkatan, pada tahun 2011 sebesar 222,92 km menjadi sebesar 669,21 km pada tahun 2014, kemudian tahun 2015 mengalami peningkatan menjadi sebesar 1.057,71 km.



2) Rasio Jaringan Irigasi

Irigasi adalah usaha untuk menyalurkan serta membagi air ke bidang-bidang tanah pertanian secara teratur, serta membuang air kelebihan yang tidak diperlukan lagi. Pembangunan irigasi ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani, namun pembangunan irigasi juga memberikan dampak atau pengaruh terhadap aspek sosial.

Infrastruktur yang berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan produksi pertanian, khususnya beras adalah jaringan irigasi. Jaringan irigasi diperlukan untuk pengaturan air, mulai dari penyediaan, pengambilan, pembagian, pemberian dan penggunaannya. Ketersediaan jaringan irigasi yang cukup akan meningkatkan produktivitas pertanian. Peningkatan jumlah saluran irigasi mendorong peningkatan kontribusi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Kabupaten Kutai Timur. Berdasarkan hasil capaian tahun 2011 rasio jaringan irigasi sebesar 11 menjadi 0,08 pada tahun 2015.

3) Rasio tempat ibadah per satuan penduduk

Rasio tempat ibadah per satuan penduduk adalah jumlah ketersediaan tempat ibadah per 1.000 penduduk. Beribadah sangat berguna untuk membentuk manusia seutuhnya. Untuk itu diperlukan tempat sarana ibadah dalam mewujudkan hal tersebut bagi masing-masing pemeluk agama tersebut.

Tabel 2.28
Sarana Peribadatan
Di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Sarana Peribadatan	Tahun			
	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Masjid/Musholla/Langgar	590	713	849	849
Gereja Kristen Protestan	134	138	159	160
Gereja Kristen Katolik	51	53	53	54
Pura	16	16	15	15
Vihara	1	1	1	1
Jumlah	792	921	1.077	1.079

Sumber : Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

- Kementerian Agama Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

- Bagian Sosial Sekretariat Kab. Kutai Timur Tahun 2013

Keterangan*) Data KUA Kecamatan yang dihimpun di Kementerian Agama Kab. Kutai Timur

Berdasarkan Tabel 2.28 di atas menunjukkan bahwa jumlah sarana peribadatan telah mengalami peningkatan pada tiap tahunnya terlihat dari tahun 2011 hingga tahun 2015 jumlah masjid dan gereja meningkat. Hal ini



menunjukkan bahwa seiring terjadinya peningkatan jumlah penduduk di Kabupaten Kutai Timur diikuti dengan adanya penambahan jumlah sarana peribadatan.

4) Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk

Rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pemakaman umum per 1.000 jumlah penduduk.

Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu kabupaten dengan tingkat pertumbuhan penduduk yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk ini juga menuntut kesiapan dari Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk menyediakan Tempat Pemakaman Umum (TPU) bagi penduduknya tersebut. Pada saat ini Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah memiliki TPU yang diperuntukkan bagi masyarakat Kabupaten Kutai Timur. Untuk mengantisipasi kebutuhan terhadap TPU yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, perlu juga didorong partisipasi swasta dalam menyediakan lahan pemakaman.

Capaian rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk pada tahun 2011 sebesar 28,69 kemudian turun drastis menjadi 5,52 pada tahun 2015.

5) Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)

Capaian panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m) mengalami peningkatan tiap tahunnya pada tahun 2011 tercapai 0,079, kemudian tahun 2014 sebesar 0,51. Meskipun tiap tahun terjadi peningkatan capaian namun masih belum mencapai atau melampaui target RPJMD yang telah ditetapkan.

6) Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota

Pada tahun 2014 capaian pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota sebesar 144,48 telah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 29,76. Capaian tersebut telah mencapai target pada tahun 2014 sebesar 34,94 persen.



7) Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar

Capaian sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar selama kurun waktu empat tahun terakhir 2011-2014 tidak mengalami perubahan sebesar 0,16 persen, sementara target yang ditetapkan tiap tahun selalu mengalami penurunan. Oleh sebab itu, diperlukan upaya kerja keras untuk menurunkan persentasenya hingga tercapai pada akhir pelaksanaan tahun 2016.

D. Perumahan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perumahan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.29
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perumahan
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase rumah tinggal bersanitasi	%	NA	90,00	28,33	59,28	-
Rasio rumah layak huni		-	-	0,057	0,118	-
Rasio permukiman layak huni		60	70	85	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Persentase Rumah Tinggal Bersanitasi

Persentase rumah tinggal bersanitasi adalah proporsi rumah tinggal bersanitasi terhadap jumlah rumah tinggal. Sanitasi adalah segala upaya yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya kondisi yang memenuhi persyaratan kesehatan. Sedangkan fasilitas sanitasi adalah sarana air minum/air bersih, sarana pembuangan kotoran kakus/jamban, sarana pembuangan limbah cair, limbah padat, limbah gas/debu dan sarana pembuangan sampah. Rumah tangga berakses sanitasi sekurang-kurangnya mempunyai akses untuk memperoleh layanan sanitasi, sebagai berikut: 1) fasilitas air bersih; 2) pembuangan air besar/tinja; 3) pembuangan air limbah (air bekas); 4) pembuangan sampah.

2) Rasio Rumah Layak Huni

Rasio rumah layak huni adalah perbandingan jumlah rumah layak huni dengan jumlah penduduk. Pembangunan perumahan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu kebutuhan dasar manusia. Sejalan dengan upaya tersebut dan



sebagai bagian dari peningkatan kualitas hidup masyarakat, pembangunan perumahan ditujukan pula untuk mewujudkan perumahan pemukiman yang secara fungsional dapat mendukung pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah yang pada gilirannya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

3) Rasio Pemukiman Layak Huni

Pemukiman dan rumah layak huni merupakan harapan dan idaman setiap insan. Pemerintah telah berupaya meningkatkan kualitas hunian masyarakat terutama masyarakat berpenghasilan rendah dan kurang mampu, dengan tujuan agar muncul kepedulian sosial untuk partisipasi dari warga mampu terhadap yang kurang mampu.

Rasio pemukiman layak huni adalah perbandingan luas pemukiman layak huni dengan luas wilayah pemukiman secara keseluruhan. Indikator ini mengukur proporsi luas pemukiman yang layak huni terhadap keseluruhan luas permukaan.

E. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penataan Ruang dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.30
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penataan Ruang
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	%	NA	4,66	16,25	4,66	-
Rasio bangunan ber IMB per satuan bangunan	%	50	65	100	-	-

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB

Ruang Terbuka Hijau (RTH) merupakan area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Tujuan penyelenggaraan RTH adalah 1) menjaga ketersediaan lahan sebagai kawasan resapan air; 2) menciptakan aspek planologis perkotaan melalui keseimbangan antara lingkungan alam dan lingkungan binaan yang berguna untuk kepentingan masyarakat; 3) meningkatkan keserasian lingkungan perkotaan



sebagai sarana pengaman lingkungan perkotaan yang aman, nyaman, segar, indah, dan bersih.

2) Rasio Bangunan ber-IMB per Satuan Bangunan

Setiap orang/badan usaha di Kabupaten Kutai Timur yang akan mendirikan/membangun gedung baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan persyaratan administratif dan persyaratan teknis yang berlaku wajib memiliki Ijin Mendirikan Bangunan (IMB). Hal ini dimaksudkan dalam rangka pengendalian pemanfaatan ruang Kabupaten Kutai Timur.

F. Perencanaan Pembangunan

Dokumen perencanaan daerah diantaranya terdiri dari: Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis SKPD, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Rencana Kerja SKPD dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Berikut adalah gambaran ketersediaan dokumen perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu 2011-2015.

Tabel 2.31
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perencanaan Pembangunan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA		Ada	Ada	ada	ada	ada
Tersedianya dokumen perencanaan RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA		Ada	Ada	ada	ada	ada
Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



G. Perhubungan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Perhubungan dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.32
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perhubungan Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio ijin trayek		NA	NA	0,012	0,00058	-
Jumlah uji kir angkutan umum	Unit	3.586	3.702	4.797	5.143	5.964
Terminal	Unit	11	12	12	12	13
Pelabuhan Laut	Unit	2	2	2	2	3
Pelabuhan Udara	Unit	11	11	11	11	11
Angkutan Darat	%	22,18	16,18	13,31	7,91	37,77
Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)		1 hari	25-48 menit	25-48 menit	25-48 menit	25-48 menit
Pemasangan rambu-rambu	%	80	90	90	90	115

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Timur Tahun 2016

1) Rasio ijin trayek

Rasio ijin trayek adalah perbandingan jumlah ijin trayek yang dikeluarkan selama 1 (satu) tahun terhadap jumlah penduduk.

Seluruh angkutan umum yang ada di Kabupaten Kutai Timur wajib memiliki ijin trayek. Hal ini dimaksudkan untuk penataan pengaturan dan pengendalian trayek angkutan umum, sehingga ini dapat meminimalisir trayek ilegal yang dilakukan para pengendara angkutan umum. Perkembangan capaian rasio ijin trayek di Kabupaten Kutai Timur sementara belum dapat dianalisis karena belum tersedianya data.

2) Jumlah uji kir angkutan umum

Seluruh angkutan umum yang didatangkan di Kabupaten Kutai Timur baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri dan akan dioperasikan di jalan wajib memiliki pengujian agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Hal ini dimaksudkan menjamin keselamatan penumpang angkutan umum dan menjaga keseimbangan ekosistem lingkungan. Kondisi mengenai jumlah kendaraan wajib uji dan yang telah melakukan uji kir di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2011-2015 belum tersedia maka diperlukan perhatian, khususnya SKPD



terkait untuk memaksimalkan pendataan guna evaluasi pelaksanaan pembangunan ke depan.

Mengingat belum adanya data yang tersedia persentase jumlah KIR dengan kendaraan yang wajib uji maka diperlukan pendataan yang kontinu untuk mengontrol sarana mobilitas dalam rangka memberikan jaminan keselamatan serta kenyamanan bagi penumpang.

3) Jumlah Terminal/ Pelabuhan Laut/ Pelabuhan Udara

Perkembangan jumlah pelabuhan laut, udara, serta terminal darat tidak mengalami pertumbuhan signifikan, namun dapat dipastikan tingkat mobilitasnya semakin tinggi dengan lonjakan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahun. Sementara itu, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menargetkan pembangunan sarana dan prasarana perhubungan baik darat, laut dan udara guna mengantisipasi perkembangan jumlah penumpang yang meningkat setiap tahunnya.

4) Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)

Berdasarkan perkembangan capaian lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR) menunjukkan waktu yang lebih cepat dibandingkan dengan target RPJMD. Sebagaimana yang telah ditetapkan RPJMD per tahunan bahwa lama pengujian kelayakan angkutan umum maksimal selama 1 (satu) hari, namun dalam realisasinya lebih cepat dari target tersebut yaitu rata-rata selama 25 sampai 46 menit. Capaian tersebut menunjukkan adanya peningkatan pelayanan umum yang baik bagi masyarakat.

5) Persentase Pemasangan Rambu-Rambu Lalu Lintas

Rambu lalu lintas merupakan salah satu alat perlengkapan jalan dalam bentuk tertentu yang memuat lambing, huruf, angka, kalimat dan/atau perpaduan di antaranya, yang digunakan untuk memberikan peringatan, larangan, perintah dan petunjuk bagi pemakai jalan. Pemasangan rambu-rambu lalu lintas bertujuan untuk mengatur lalu lintas kendaraan bermotor, sehingga hal ini dapat meminimalisir jumlah kecelakaan yang terjadi. Namun demikian data terkait dengan pemasangan rambu-rambu belum tersedia, sehingga belum dapat dianalisis kecukupan rambu-rambu lalu lintas yang telah dipasang di wilayah Kabupaten Kutai Timur.



H. Lingkungan Hidup

Lingkungan merupakan salah satu faktor yang kerap mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Lingkungan Hidup salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.33
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Lingkungan Hidup
Tahun 2011-2015

Indikator (1)	Satuan (2)	Tahun				
		2011 (3)	2012 (4)	2013 (5)	2014 (6)	2015 (7)
Persentase penanganan sampah	%	NA	45	0,13	0,23	0,77
Persentase penduduk berakses air minum	%	NA	13,87	78,46	31,48	-
Pengelolaan kualitas air (penetapan kelas air)	%	NA	44,44	5,55	5,55	-
Pengendalian potensi sumber pencemaran air	%	NA	44,44	33,3	38,9	-
Pelaksanaan penetapan status mutu air	%	NA	44,44	33,3	38,9	-
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal	%	NA	40	25,7	37,3	-
Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	%	NA	NA	0,49	0,85	-
Penegakan hukum lingkungan	%	NA	100	100	NA	0,85

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Persentase penanganan sampah

Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari bahan organik dan bahan anorganik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan (SNI 19-2454-2000). Sampah adalah limbah yang berbentuk padat dan juga setengah padat, dari bahan organik dan atau anorganik, baik benda logam maupun benda bukan logam, yang dapat terbakar dan yang tidak dapat terbakar. Bentuk fisik benda tersebut dapat berubah menurut cara pengangkutannya atau cara pengolahannya (Anonim,1986). Sampah padat adalah semua barang sisa yang ditimbulkan dari aktivitas manusia dan binatang yang secara normal padat dan dibuang ketika tak dikehendaki atau sia-sia (Tchobanoglous, Theisen dan Vigil 1993).

Pengelolaan sampah adalah suatu bidang yang berhubungan dengan pengendalian bagaimana sampah dihasilkan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pembuangan sampah yang menggunakan suatu cara yang sesuai dengan prinsip-prinsip pewadahan, pengumpulan, TPS. Bila



salah satu kegiatan tersebut terputus atau tidak tertangani dengan baik, maka akan menimbulkan masalah kesehatan, banjir/genangan, pencemaran air tanah, dan estetika.

Bertambahnya jumlah penduduk, berimplikasi kepada meningkatnya permasalahan sampah di Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu perlu dilakukan penanganan yang optimal serta antisipasi adanya peningkatan jumlah penduduk yang semakin tinggi.

2) Persentase Penduduk Berakses Air Minum

Proporsi penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung adalah perbandingan antara penduduk atau rumah tangga dengan akses terhadap sumber air minum yang terlindung dengan penduduk atau rumah tangga seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Indikator ini digunakan untuk memonitor akses terhadap sumber air berdasarkan asumsi bahwa sumber air terlindung menyediakan air yang aman untuk diminum. Air yang tidak aman diminum adalah penyebab langsung berbagai sumber penyakit.

Pertumbuhan jumlah penduduk yang cukup tinggi membawa dampak meningkatnya perkembangan pemukiman di Kabupaten Kutai Timur, berimplikasi pada peningkatan kebutuhan akan air bersih. Beberapa permasalahan pelayanan air bersih yang belum maksimal disinyalir disebabkan oleh terbatasnya sumber air baku, tersebarnya kawasan pemukiman, kawasan pemukiman yang berada di tempat tinggi dan jauh dari jaringan, angka kehilangan air yang cukup tinggi mencapai kurang lebih 30 persen, sistem produksi yang kurang maksimal, biaya listrik tinggi, serta tarif yang masih rendah.

3) Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal

Analisis mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting untuk pengambilan keputusan suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.

Capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal selama tiga tahun terakhir (2011-2014) meskipun telah mengalami peningkatan di setiap tahunnya namun masih jauh dari target tahunan RPJMD. Oleh karena itu perlu ada upaya yang keras dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait dengan pelaksanaan program dan kegiatan guna lebih meningkatkan capaian cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan amdal.



4) Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk adalah jumlah daya tampung tempat pembuangan sampah per 1.000 jumlah penduduk. Capaian rasio TPS per satuan penduduk belum dapat dianalisis karena belum tersedia data. Indikator tersebut sangat penting untuk diketahui agar sejauh mana selama ini kemampuan TPS dalam menampung sampah yang dihasilkan oleh penduduk Kabupaten Kutai Timur khususnya. Saat ini penanganan persampahan masih terpusat di ibukota, sementara di wilayah lain belum tertangani dengan baik sehingga perlu mendapatkan perhatian khususnya SKPD terkait.

I. Pertanian

Tabel 2.34
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Setuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase luas lahan bersertifikat	%	NA	NA	1.421	1.601	1.601
Penyelesaian kasus tanah negara	%	NA	NA	8	26	26
Penyelesaian izin lokasi	%	NA	NA	73,33	72,41	72,41

Sumber: Dinas Tata Ruang

J. Kependudukan dan Catatan Sipil

Tabel 2.35
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil
Tahun 2011-2015

Indikator	Setuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio penduduk ber KTP per satuan penduduk		NA	71,90	37,11	82	-
Rasio bayi berakte kelahiran		NA	46,13	NA	82	-
Rasio pasangan berakte nikah		NA	4,01	NA	57	-
Kepemilikan KTP	%	83	81,30	40	62	-
Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	%	NA	NA	39	69	-
Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten		ada	ada	ada	ada	-
Penerapan KTP Nasional berbasis NIK	%	NA	61,30	NA	86	-

Sumber: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



1) Rasio Penduduk ber KTP

Rasio penduduk ber KTP adalah jumlah penduduk usia di atas 17 tahun yang memiliki KTP dibagi dengan jumlah penduduk usia di atas 17 tahun. Capaian rasio penduduk ber KTP pada tahun 2012 menunjukkan sebesar 71,90, sedangkan tahun 2014 turun menjadi 62. Capaian tersebut menunjukkan bahwa rata-rata dari 100 penduduk Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 terdapat 62,0 yang ber KTP sedangkan sisanya 38,00 belum ber KTP. Jika dibandingkan dengan target RPJMD ditetapkan tiap tahun minimal 90 maka capaian tahun 2014 masih berada dibawah target. Oleh karena itu, dalam upaya meningkatkan rasio penduduk yang ber KTP perlu adanya program sosialisasi yang lebih masif kepada masyarakat tentang arti pentingnya ber KTP.

2) Rasio bayi berakte kelahiran

Rasio bayi berakte kelahiran merupakan jumlah bayi lahir yang memiliki akte kelahiran dibagi jumlah keseluruhan bayi yang lahir. Capaian rasio bayi berakte kelahiran pada tahun 2012 masih tercapai 46,13 dari 100 yang ditargetkan, namun pada tahun 2014 telah meningkat tajam menjadi 82.

3) Kepemilikan KTP

Kepemilikan KTP adalah jumlah penduduk yang memiliki KTP dibagi jumlah penduduk wajib KTP [> 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah] dikalikan 100 persen. Capaian indikator kepemilikan KTP masih fluktuatif, dimana pada tahun 2011 tercapai 93 persen yang melampaui target RPJMD sebesar 90 persen, namun tahun 2012 menurun menjadi 61,30 persen, sedangkan tahun 2015 meningkat lagi menjadi 62, namun masih jauh di bawah target sebesar 90 persen.

4) Penerapan KTP Nasional berbasis NIK

Capaian indikator penerapan KTP Nasional berbasis NIK belum menunjukkan capaian yang positif, hal ini ditunjukkan dengan capaian pada tahun 2012 sebesar 61,30 persen dari target yang ditetapkan RPJMD sebesar 75 persen, sedangkan pada akhir tahun 2014 meningkat menjadi 82. Namun demikian kenaikan yang terjadi belum mencukupi sehingga pada akhir pelaksanaan RPJMD tahun 2015 perlu adanya akselerasi agar dapat mencapai target sebesar 90 persen. Oleh karenanya diperlukan kerja keras bagi SKPD terkait untuk mencapai target tersebut dengan menerapkan program dan kegiatan yang efektif dan efisien.



K. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Tabel 2.36
Capaian Aspek Pelayanan Umum
Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Tahun 2011-2015

Indikator	Tahun				
	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah (%)	24,70	32,25	45,83	45,83	45,83
Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta (%)	90	90	90	90	90
Partisipasi angkatan kerja perempuan (%)	35,00	35,00	35,00	35,00	96,00
Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan (%)	100	100	100	99	100

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah telah mencapai hasil yang positif, dimana selama 5 (lima) tahun terakhir (2011-2015) menunjukkan adanya peningkatan yang cukup signifikan. Pada tahun 2011 tercapai 24,7 persen, kemudian tahun 2015 menjadi sebesar 45,83.

2) Persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta

Indikator capaian persentase partisipasi perempuan di lembaga swasta juga menunjukkan hasil yang positif dimana pada tahun 2011 sebesar 90 persen, kemudian tahun 2015 tetap menjadi menjadi sebesar 90 persen.

3) Partisipasi angkatan kerja perempuan

Kesetaraan dan keadilan gender menghendaki bahwa laki-laki dan perempuan mempunyai kesempatan yang sama untuk ikut serta dalam proses pembangunan, akses yang sama terhadap pelayanan serta memiliki status sosial dan ekonomi yang seimbang. Partisipasi angkatan kerja perempuan selama kurun waktu 5 (lima) tahun telah mengalami peningkatan dari tahun 2011 sebesar 35,00 persen menjadi 96,00 persen pada tahun 2015.

4) Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan

Pelaksanaan UU jaminan Sosial sangatlah penting untuk mencapai tujuan perlindungan sosial. Sedangkan penyelenggaraan pengarusuteraan gender, mencakup pemenuhan kebutuhan praktis maupun strategis gender. Kebutuhan strategis tersebut, diantaranya penghapusan kekerasan dan diskriminasi di



berbagai kehidupan. Adapun penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan tercatat selama tahun 2011 hingga tahun 2015 tercapai 100 persen, sedangkan pada tahun 2014 terdapat sedikit penurunan menjadi 89 persen.

L. Keluarga Berencana (KB) Dan Keluarga Sejahtera (KS)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.37
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan KB dan Keluarga Sejahtera
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata jumlah anak per keluarga	Anak	2,8	2,8	2,8	2,8	2,8
Rasio akseptor KB	%	61	61	61	80,98	82,63
Cakupan peserta KB aktif	%	109	120	121	85,67	90,10
Keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I	%	48,58	22,43	21,39	21,39	20,39

Sumber: Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Rata-rata jumlah anak per keluarga

Rata-rata jumlah anak per keluarga adalah jumlah anak dibagi dengan jumlah keluarga. Program Keluarga Berencana secara demografi bertujuan untuk menurunkan angka kelahiran dan secara filosofis bertujuan untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Jumlah anak dalam keluarga yang dianjurkan oleh Pemerintah adalah 2 (dua) anak lebih baik.

2) Rasio akseptor KB

Rasio akseptor KB adalah jumlah akseptor KB dalam periode 1 (satu) tahun per 1000 pasangan usia subur pada tahun yang sama.

Tingkat fertilitas Pasangan Usia Subur (PUS) di Kabupaten Kutai Timur sebesar 26.712 dengan rata-rata jumlah anak per keluarga di Kabupaten Kutai Timur sebanyak 3-4 anak. Jumlah akseptor KB di Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 sebanyak 26.635 orang peserta dari total 43.013 PUS. Jumlah rasio akseptor KB tahun 2011 sebesar 61 persen kemudian meningkat tajam menjadi 82,63 persen pada tahun 2015. Secara lengkap disajikan pada Tabel 2.38 di bawah ini.



Tabel 2.38
Rasio Akseptor KB
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Jumlah PUS	43.013	44.594	59.376	-	-
2	Jumlah Akseptor KB	26.635	28.501	38.550	-	-
3	Rasio Akseptor KB	61	61	61	80,98	82,63

Sumber: Badan Peberdayaan Perempuan dan KB Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Pemakaian kontrasepsi banyak digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan program KB dan juga dapat digunakan untuk memperkirakan penurunan angka fertilitas sebagai akibat dari pemakaian kontrasepsi. Terlihat pada Tabel 2.38 menunjukkan adanya trend meningkat penggunaan kontrasepsi [sebagai akseptor] dari tahun ke tahun meskipun kenaikannya relatif lambat, (0,02 per tahun), namun pada tahun 2013 terjadi peningkatan capaian yang cukup tinggi [lebih dari 10000 akseptor baru] hingga mencapai 38.550 akseptor.

3) Cakupan peserta KB Aktif

Cakupan Peserta KB aktif (*Contraceptive Prevalence Rate*) adalah cakupan dari peserta KB yang baru dan lama yang masih aktif menggunakan alat dan obat kontrasepsi (alokon) dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Indikator ini menunjukkan jumlah peserta KB baru dan lama yang masih aktif memakai alokon terus-menerus hingga saat ini untuk menunda, menjarangkan kehamilan atau yang mengakhiri kesuburan. Capaian cakupan Peserta KB Aktif pada tahun 2011 sebesar 109 persen kemudian turun menjadi 90,10 persen pada tahun 2015.

M. Sosial

Tabel 2.39
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Sosial
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial (%)	70,14	69,12	91,11	60,23	-
2	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial (%)	89,94	91,43	89,12	77,00	-

Sumber: Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015



Tabel 2.39 menunjukkan capai program pelayanan Umum urusan sosial masih berfluktuasi, dimana capaian pada tahun 2014 cenderung mengalami penurunan dibandingkan 3 tahun sebelumnya. Namun demikian, jika dibandingkan dengan target yang ditetapkan telah melampauinya berdasarkan capaian tahunannya.

N. Ketenagakerjaan

Tabel 2.40
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketenagakerjaan
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Tingkat partisipasi angkatan kerja	%	70,45	80,20	85,84	70,65	87,61
Tingkat pengangguran terbuka	%	4,95	3,90	3,11	1,28	1,04
Rasio penduduk yang bekerja		NA	NA	81,93	72,48	-
Angka pengangguran	Jiwa	7.045	5.096	4.729	3.015	2.571

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Jumlah Pengangguran

Pengangguran merupakan keadaan dimana dalam sebuah masyarakat, sebagian warganya tidak mampu memasuki kesempatan kerja yang ada, sehingga ia tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan ekonominya. Secara alami pengangguran terjadi karena pada saat kesempatan kerja penuh (*full employment*) dimana 95 persen angkatan kerja dalam waktu tertentu sepenuhnya bekerja, angkatan kerja yang belum masuk dalam kesempatan kerja tersebut berarti menganggur. Pengangguran umumnya disebabkan karena jumlah angkatan kerja tidak sebanding dengan jumlah lapangan pekerjaan yang mampu menyerapnya. Pengangguran seringkali menjadi masalah dalam perekonomian karena dengan adanya pengangguran, produktivitas dan pendapatan masyarakat akan berkurang sehingga dapat menyebabkan timbulnya kemiskinan dan masalah-masalah sosial lainnya. Berdasarkan capaian empat tahun terakhir menunjukkan adanya capaian tren penurunan, dimana pada tahun 2015 menurun menjadi 2.571 jiwa.

2) Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah suatu indikator ketenagakerjaan yang memberikan gambaran tentang penduduk



yang aktif secara ekonomi dalam kegiatan sehari-hari merujuk pada suatu waktu dalam periode survei. Pada kelompok umur muda (15-24) tahun, TPAK cenderung rendah, karena pada usia ini mereka lebih banyak masuk kategori bukan angkatan kerja [sekolah], demikian juga pada kelompok umur tua [diatas 65 tahun], TPAK rendah dikarenakan mereka masuk pada masa purnabakti [pensiun]. TPAK perempuan jauh lebih rendah dibandingkan laki-laki. Hal ini kemungkinan di Indonesia, tanggung jawab mencari nafkah pada umumnya laki-laki, sehingga perempuan lebih sedikit masuk ke dalam angkatan kerja.

3) Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase penduduk yang mencari pekerjaan, yang mempersiapkan usaha, yang tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, yang sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja dari sejumlah angkatan kerja yang ada. Tingkat pengangguran dapat dihitung dengan cara membandingkan jumlah pengangguran dengan jumlah angkatan kerja yang dinyatakan dalam persen. Indikator ini bermanfaat untuk melihat keterjangkauan pekerjaan (kesempatan kerja). Besarnya angka pengangguran terbuka mempunyai implikasi sosial yang luas karena mereka yang tidak bekerja tidak mempunyai pendapatan. Semakin tinggi angka pengangguran terbuka maka semakin besar potensi kerawanan sosial yang ditimbulkannya, contohnya kriminalitas. Sebaliknya semakin rendah angka pengangguran terbuka maka semakin stabil kondisi sosial dalam masyarakat. Sangatlah tepat jika pemerintah seringkali menjadikan indikator ini sebagai tolok ukur keberhasilan pembangunan.

4) Rasio penduduk yang bekerja

Rasio penduduk yang bekerja adalah merupakan perbandingan jumlah penduduk yang bekerja terhadap jumlah angkatan kerja. Cara menghitung rasio tersebut terlebih dahulu disusun data angkatan kerja yang bekerja dan yang mencari pekerjaan menurut kelompok umur berdasarkan hasil sensus terakhir.

Kesempatan kerja merupakan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. Pertambahan angkatan kerja harus diimbangi dengan investasi yang dapat menciptakan kesempatan kerja. Dengan demikian, dapat menyerap pertambahan angkatan kerja. Dalam ilmu ekonomi, kesempatan kerja berarti peluang atau keadaan yang menunjukkan tersedianya lapangan pekerjaan sehingga semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja dalam proses produksi dapat memperoleh pekerjaan sesuai dengan keahlian,



ketarampilan dan bakatnya masing-masing. Kesempatan Kerja [*demand for labour*] adalah suatu keadaan yang menggambarkan/ketersediaan pekerjaan [lapangan kerja untuk diisi oleh para pencari kerja]. Dengan demikian kesempatan kerja dapat diartikan sebagai permintaan atas tenaga kerja.

D. Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.41
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Koperasi dan UKM
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase koperasi aktif	%	48	60	61,86	64,81	64,81
Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Unit	3.450	5.080	5.080	5.454	5.454
Jumlah BPR/LKM	Unit	-	-	9	11	-

Sumber: Dinas Koperasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Persentase Koperasi Aktif

Koperasi merupakan salah satu usaha dalam rangka pemberdayaan ekonomi rakyat, menurunkan kemiskinan dan memperluas lapangan pekerjaan. Semakin banyak jumlah koperasi yang aktif, diharapkan semakin berdaya ekonomi kerakyatan, menurunnya jumlah kemiskinan dan menurunnya jumlah pengangguran. Koperasi yang mampu menyelenggarakan RAT menunjukkan keaktifan nil dalam menjalankan koperasi sesuai asas koperasi. Tabel 2.42 menunjukkan persentase koperasi aktif yang cenderung mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, meskipun peningkatannya tidak signifikan. Kondisi ini perlu dilakukan pembinaan manajemen perkoperasian yang lebih intensif agar mampu melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan meningkatkan kinerja koperasi serta kesejahteraan anggotanya.

2) Jumlah UKM Non BPR/LKM UKM

Usaha kecil dan menengah merupakan suatu peluang usaha ekonomi produktif yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha dalam rangka meningkatkan pendapatan. Semakin banyak jumlah UKM non BPR/LKM akan menunjukkan semakin besar kapasitas pelayanan pendukung dan "lokomotif perekonomian" yang dimiliki Kutai Timur dalam meningkatkan ekonomi daerah, bahkan dapat menekan angka pengangguran. Tabel 2.41 menunjukan



kecenderungan peningkatan yang menggembirakan, terutama terjadi dalam dua tahun terakhir yaitu 5.080 pada tahun 2013 menjadi 5454 UKM pada tahun 2014.

3) Jumlah BPR/LKM

BPR dan LKM memiliki fungsi sebagai lembaga yang memberikan berbagai jasa keuangan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil. Semakin banyak jumlah BPR dan LKM, memudahkan masyarakat miskin dan pengusaha kecil dapat mengakses keuangan dalam rangka meningkatkan perekonomiannya. Tabel 2.41 menunjukkan masih terdapat fluktuasi keberadaan BPR/LKM, meskipun antara tahun 2013 dan 2014 mulai terjadi peningkatan jumlah BPR/LKM yang ada. Upaya percepatan pertumbuhan BPR/LKM sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan UMKN yang cukup nyata pada dua tahun terakhir.

P. Penanaman Modal

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Penanaman Modal dapat dilihat dari capaian indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.42
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Penanaman Modal
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Buah	15	21	4	NA	-
Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Rupiah	NA	NA	Meningkat	Meningkat	-
PMDN	Rupiah (T)	13,275	1,8	5,19	2,02	2,02
PMA	US \$ [juta]	123	69,3	94,80	406,71	406,71

Sumber: Badan Penanaman Modal Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Jumlah Investor Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Hampir semua kabupaten/kota membutuhkan modal dalam negeri maupun modal asing dalam rangka melaksanakan program/kegiatan pembangunan. Kehadiran investor asing diharapkan dapat meningkatkan potensi ekspor dan substitusi impor, juga agar terjadi alih teknologi yang dapat mempercepat laju pertumbuhan ekonomi dan pembangunan nasional Indonesia, khususnya di



Kabupaten Kutai Timur. Hadirnya investor asing sangat dipengaruhi oleh kondisi internal negara, seperti stabilitas ekonomi, politik, penegakan hukum dan lain sebagainya. Tabel 2.42 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, terutama tahun 2013 hingga 2014 belum terdapat perkembangan jumlah investor (PMA) yang menggembirakan, namun terdapat kenaikan jumlah nilai investasinya.

2) Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional (PMDN/PMA)

Pemerintah daerah dan pengusaha adalah dua kelompok yang paling berpengaruh dalam menentukan corak pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah, mempunyai kelebihan dalam satu hal, dan tentu saja keterbatasan dalam hal lain, demikian juga pengusaha. Sinergi antara keduanya untuk merencanakan bagaimana ekonomi daerah akan diarahkan perlu menjadi pemahaman bersama. Pemerintah daerah mempunyai kesempatan membuat berbagai peraturan, menyediakan berbagai sarana dan peluang. Tetapi pemerintah daerah tidak mengetahui banyak bagaimana proses kegiatan ekonomi sebenarnya berlangsung. Pengusaha mempunyai kemampuan mengenali kebutuhan orang banyak dan dengan berbagai inisiatifnya, memenuhi kebutuhan itu. Aktivitas memenuhi kebutuhan itu membuat roda perekonomian berputar, menghasilkan gaji dan upah bagi pekerja dan pajak bagi pemerintah. Dengan pajak, pemerintah daerah berkesempatan membentuk kondisi agar perekonomian daerah berkembang lebih lanjut.

Ketersediaan pelayanan penunjang yang dimiliki daerah dapat mengundang ketertarikan investor untuk menanamkan investasinya di daerah tersebut. Semakin banyak realisasi proyek maka menggambarkan keberhasilan daerah dalam memberi fasilitas penunjang pada investor untuk merealisasikan investasi yang telah direncanakan. Tabel 2.42 menunjukkan bahwa pada tahun-tahun terakhir, terutama tahun 2014 terdapat kenaikan jumlah nilai investor (PMA) yang menggembirakan, hingga mencapai 406,71 US \$ [juta].

Q. Kebudayaan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kebudayaan dapat dilihat dari sejumlah indikator: *Pertama*, jumlah sarana dan penyelenggaraan seni budaya. *Kedua*, jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya daerah dan yang dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus berupaya menggali dan menginventarisir warisan budaya yang dapat dipergunakan untuk menarik minat wisatawan mengunjungi wilayah Kutai Timur.



Tabel 2.43
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan kebudayaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penyelenggaraan Festival seni dan budaya	Kali	6	6	6	6	6
Sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Unit	4	4	4	4	4
Jumlah benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestakan	%	100	100	100	100	100

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kab. Kutai Timur Tahun 2015

R. Kepemudaan dan Olah Raga

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kepemudaan dan Olah Raga dapat dilihat dari jumlah organisasi kepemudaan dan olahraga serta kegiatan yang dilaksanakannya. Banyaknya jumlah organisasi pemuda dan organisasi olahraga menunjukkan besarnya tanggungjawab yang harus dilakukan pemerintah dalam melakukan fungsi pembinaan dan fasilitasi penunjang keperdayaannya. Sedangkan banyaknya jumlah kegiatan yang dilaksanakan organisasi pemuda dan organisasi olahraga menggambarkan tingkat partisipasinya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tabel 2.44
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kepemudaan dan Olahraga
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah organisasi pemuda	Buah	38	38	37	38	38
Jumlah organisasi olahraga	buah	43	43	379	380	380
Jumlah Kegiatan Kepemudaan	kali	4	4	6	10	10
Jumlah Kegiatan olahraga	kali	10	9	16	22	22
Gelanggang/Balai Remaja (selain milik swasta)	Unit	-	-	22	22	-
Jumlah Lapangan Olahraga	Unit	-	-	114	114	-

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015



S. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

Tabel 2.45
Capaian Aspek Pelayanan Umum
Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Keg	NA	NA	2	NA	-
Kegiatan pembinaan politik daerah	Keg	NA	NA	3	NA	-
Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk		6	6	10	15	15
Jumlah Linmas per Jumlah 10.000 penduduk	orang	130	NA	meningkat	855	855
Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kalurahan			NA	NA	NA	-

Sumber: - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
- Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

1) Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja Per 10.000 Penduduk

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP), merupakan aparatur Pemerintah Daerah yang melaksanakan tugas Kepala Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Keputusan Kepala Daerah. Capaian rasio jumlah polisi pamong praja belum dapat ditentukan karena belum ada data yang representative, sehingga belum bisa menggambarkan kondisi rasio Kabupaten Kutai Timur.

2) Rasio Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk

Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas), merupakan satuan yang memiliki tugas umum memelihara dan menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban masyarakat secara luas. Perkembangan rasio Linmas per 10.000 penduduk mengalami peningkatan namun masih belum dapat dianalisis rasio kecukupan terhadap jumlah penduduk.

T. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian dapat dilihat dari capaian indikator kinerja berikut :



Tabel 2.46
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemerintahan Umum
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Penegakan PERDA	%	72	72	85	85	85
Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	%	NA	NA	30,77	50,67	73,25
Predikat hasil audit oleh BPK	opini	TW	WDP	WDP	WDP	-

Sumber: - Sekretariat Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Persentase Penyelesaian Penegakan PERDA

Tugas penegakan Peraturan Daerah (Perda), berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 32 Tahun 2004 dilaksanakan oleh Satpol PP. Detail tugas Satpol PP adalah memelihara, menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, menegakkan Perda dan Keputusan Kepala Daerah.

Gambaran penegakan Perda di Kabupaten Kutai Timur belum dapat diidentifikasi dengan lebih detail data perkembangan penegakkan Perda. Oleh karena itu, inventarisasi data pelanggaran Perda hingga penyelesaiannya perlu dilakukan agar Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dapat mengimplementasikan *good government governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan demikian, hal tersebut akan mendorong tingkat kepatuhan terhadap segala peraturan perundangan yang berlaku.

2) Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat

Fungsi utama pemerintah adalah memberikan layanan masyarakat. Salah satu parameter keberhasilan layanan masyarakat aparatur pemerintah adalah Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) sebagai penerima pelayanan. IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Untuk melihat kepuasan layanan terhadap masyarakat perlu memperhatikan komponen IKM dan standar pelayanan publik sebagai komponen layanan yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Komponen IKM yakni: (1) kesederhanaan, (2) kejelasan, (3) kepastian waktu, (4) akurasi, (5) keamanan, (6) tanggungjawab, (7) kelengkapan sarana dan prasarana, (8) kemudahan akses, (9) kedisiplinan, (10) kenyamanan. Adapun standar pelayanan publik adalah sekurang-kurangnya mencakup hal-hal sebagai berikut: (1) Prosedur pelayanan, (2) Waktu penyelesaian,



(3) Biaya pelayanan, (4) Produk pelayanan, (5) Sarana dan Prasarana.

Pelayanan publik oleh aparaturnya pemerintah hingga saat ini masih banyak dijumpai kelemahan sehingga belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat. Hal ini ditunjukkannya berbagai keluhan masyarakat yang disampaikan melalui media massa, sehingga dapat menimbulkan citra yang kurang baik terhadap aparaturnya pemerintah. Mengingat fungsi utama pemerintah adalah melayani masyarakat, maka pemerintah daerah Kutai Timur perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan. Kepuasan penerima layanan dapat dicapai apabila penerima layanan memperoleh pelayanan sesuai dengan yang diharapkan. Melalui survey IKM, diharapkan dapat sebagai tolok ukur menilai tingkat kualitas pelayanan yang diselenggarakannya, dan sebagai upaya peningkatan kualitas layanan yang akan direncanakan.

U. Ketahanan Pangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Ketahanan Pangan dapat dilihat dari capaian beberapa indikator sebagai berikut :

1) Ketersediaan Pangan Utama

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Tabel 2.47 menunjukkan ketersediaan pangan utama di wilayah Kutai Timur masih berfluktuasi dari tahun ke tahun, bahkan pada tahun 2014 justru mengalami penurunan yang cukup nyata dibandingkan dengan tahun 2013. Kondisi ini memerlukan perhatian dan upaya lebih keras, bahkan perlu diprioritaskan dalam tahun mendatang guna memantapkan ketersediaan pangan utama dalam menjaga kestabilan ketahanan pangan.

Tabel 2.47
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Regulasi ketahanan pangan		Tidak ada	ada	ada	ada	ada
Ketersediaan pangan utama	Ton	33.621	36.072	43.170	37.900	37.900
Jumlah lumbung pangan	Unit	11	12	12	13	13
Prevalensi penduduk rawan pangan	%	6	6,12	6,0	5,2	-

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

2) Regulasi Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan merupakan urusan wajib Pemerintah Provinsi dan



Pemerintah Kabupaten. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ada dan tidak adanya regulasi ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2011-2015.

Tabel 2.48
Regulasi Ketahanan Pangan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perda ;		√	√	√	√
	- Ada		√	√	√	√
	- Tidak Ada	√				
2	Regulasi Ketahanan Pangan dalam Bentuk Perkada ;		√	√	√	√
	- Ada		√	√	√	√
	- Tidak Ada	√				

Sumber: Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur

Tabel 2.48 menunjukkan bahwa sejak tahun 2014, terdapat regulasi yang mengatur tentang Ketahanan pangan di Kabupaten Kutai Timur, diantaranya diterbitkan Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPT) Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Pada Badan Ketahanan Pangan dan Badan Penyuluhan Kabupaten Kutai Timur.

V. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan suatu upaya terencana dan berkesinambungan untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar memiliki kemampuan untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya yang dimiliki. Pemberdayaan masyarakat kemungkinan besar akan terhambat oleh tingkat pengetahuan dan keterampilan masyarakat yang relatif masih rendah.

Tabel 2.49
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Perdesaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	buah	12	13	13	153	153
PKK Aktif	buah	135	135	135	153	153
Poeyandu Aktif	buah	108	185	185	273	298

Sumber: Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



Tabel di atas menunjukkan adanya gambaran kecenderungan peningkatan capaian kinerja upaya pemberdayaan masyarakat, meliputi jumlah binaan PKK, PKK aktif maupun Posyandu yang aktif. Peningkatan capaian pada semua indikator sangat nyata terlihat pada tahun 2015, hal menjadi fakta dilapangan bahwa program-program yang bertumpu dengan pendekatan masyarakat memberikan hasil yang efektif dan tingkat keberlanjutan yang lebih baik.

W. Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan merupakan bagian yang sangat penting dalam proses perumusan suatu kebijakan. Data statistik tersebut harus terdokumentasi secara memadai yang selanjutnya dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data tersebut harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kabupaten Kutai Timur selama kurun waktu tahun 2011-2015.

Tabel 2.50
Ketersediaan Dokumen Statistik
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	2011		2012		2013		2014		2015	
		Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada	Ada	Tidak Ada
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Produk Domestik Regional Bruto [PDRB]	√		√		√		√		√	
2	Indeks Pembangunan Manusia [IPM]	√		√		√		√		√	
3	Penyusunan Data Sosial Ekonomi Daerah [Suseda]										
4	KBDA										
5	Indeks Gini Rasio	√		√		√		√		√	
6	Input Output	√		√		√		√		√	
7	Indeks Kemiskinan Masyarakat [IKM]	√		√		√		√		√	
8	Indeks Harga Konsumen [IHK]										

Sumber: Bappeda Kabupaten Kutai Timur



X. Kearsipan

Arsip merupakan dokumen yang berisi data/informasi beberapa tahun ke belakang. Keberadaannya sangat penting untuk mengingatkan peristiwa/kejadian/kronologis penyelenggaraan pemerintahan. Kearsipan, bank data ataupun dokumen merupakan salah satu instansi yang memiliki fungsi yang cukup penting, mengingat fungsi utamanya sebagai tempat penyimpanan dokumen kearsipan yang dimiliki kabupaten. Hal ini tentu membutuhkan tenaga pengelola yang professional dalam mengatur tata laksana kearsipan daerah, sehingga peningkatan pengelolaan SDM pengelola Arsip dipandang sangan penting.

Tabel 2.51
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kearsipan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Buku 'Kabupaten dalam angka'		ada	ada	ada	ada	Ada
Buku 'PDRB kabupaten'		ada	ada	ada	ada	Ada

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Y. Komunikasi dan Informatika

Kemajuan teknologi komunikasi dan informasi sangat potensial, terutama dalam pengumpulan data maupun diseminasi informasi penyelenggaraan pemertahan dan hasil pembangunan berbasis data mutakhir kepada masyarakat luas.

1) Jumlah Jaringan Komunikasi

Jaringan komunikasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur berperan dalam meningkatkan jangkauan dan kualitas layanan pemerintah kepada masyarakat serta menunjang peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan.

2) Jumlah Surat Kabar, Radio dan TV Lokal/Nasional

Media informasi baik cetak maupun elektronik berperan penting dalam penyebaran berbagai informasi termasuk informasi pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, media tersebut juga berperan sebagai kontrol masyarakat terhadap penyelenggara pemerintah. Dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus mendorong kemajuan berbagai media informasi yang ada.



Z. Perpustakaan

Tabel 2.52
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perpustakaan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah perpustakaan		-	-	18	18	-
Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	%	meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	-
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan		meningkat	meningkat	meningkat	meningkat	-

Sumber: Kantor Arsip dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Keberadaan perpustakaan harus ditunjang dengan pengelolaan manajemen secara memadai. Pengelolaan manajemen yang memadai, selain memiliki koleksi pustaka sesuai kebutuhan penggunaanya juga harus memiliki dokumentasi aktivitas pokoknya yang bermanfaat untuk menilai kinerja perpustakaan dan minat baca masyarakat. Tabel di atas mengindikasikan adanya kecenderungan peningkatan kuantitas dan kualitas pelayanan perpustakaan di wilayah kabupaten Kutai Timur.

2.1.3.2 Fokus Layanan Urusan Pilihan

Layanan Urusan Pilihan Pemerintahan Daerah di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

A. Pertanian

Sektor pertanian memegang peran penting di Kutai Timur, mengingat sektor tersebut menjadi bagian dari program pemerintah kabupaten yang mengedepankan pengembangan sektor agribisnis. Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB kabupaten Kutai Timur. Namun kontribusinya masih kecil dibandingkan dengan sektor pertambangan.



Tabel 2.53
Capaian Indikator Kinerja Urusan Pertanian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar	kw/ha/tahun	43,57	44,10	44,65	52,68	-
Produksi padi (ton)	Ton	33.621	35,87	35.994	43.222	-
Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	%	3,62	3,10	3,50	3,50	-
Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	%	-	0,54	1,43	-	-
Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB	%	1,16	1,22	2,40	-	-
Cakupan Bina kelompok petani	%	-	40,10	100	-	-

Sumber: Dinas Pertanian Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar

Hasil produksi tanaman pangan di Kutai Timur, ditinjau dari sisi permintaan, berpotensi dapat memenuhi permintaan di dalam negeri, terutama lokal kabupaten dan Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan peluang dan pesaing dalam pasokan hasil produksi pertanian tanaman pangan, terutama komoditas unggulan kedelai dan jagung dapat berperan serta dalam pemenuhan kebutuhan dalam lingkup nasional. Sedangkan padi, palawija dan buah-buahan juga mempunyai potensi dapat memenuhi permintaan lokal dalam jangka pendek, dan dapat memenuhi permintaan pada lingkup yang lebih luas.

Tabel 2.54
Luas Lahan hasil Pertanian Tanaman Pangan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No.	Luas Lahan	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Padi Sawah	Ha	4.819	5.056	5.424	6.026	5.169
2	Padi Ladang	Ha	5.650	5.887	5.047	6.826	6.155
3	Jagung	Ha	538	338	307	598	285
4	Ubi Kayu	Ha	299	360	141	327	281
5	Ubi Jalar	Ha	191	236	76	139	60
6	Kacang Tanah	Ha	200	194	159	198	71
7	Kedelai	Ha	257	79	73	94	65
8	Kacang Hijau	Ha	67	39	13	76	15
9	Sayuran	Ha	1.763	1.537	1.352	1.352	1.150
10	Buah-buahan	Ha	3.409	2.916	5.841	6.842	6.775

Sumber : Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



Pertanian di Kabupaten Kutai Timur dalam periode 2011-2015 menunjukkan perkembangan yang cukup stabil dalam mendukung ketersediaan pangan, terutama komoditas padi sebagai pangan utama. Seiring dengan perluasan lahan baik padi sawah dan maupun padi ladang dari tahun 2010 hingga 2015 terdapat kecenderungan peningkatan yang menggembirakan, demikian juga perluasan lahan tanaman lainnya. Meskipun terdapat fluktuasi kenaikan, namun pada akhir tahun 2015 hampir semua komoditi [kecuali sayuran] mengalami kenaikan luasan yang cukup nyata.

Tabel 2.55
Produksi Pertanian di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun				
			2011	2012	2013	2014	2015
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]
1	Padi sawah	Ton	19.854	21.082	24.476	27.435	27.616
2	Padi ladang	Ton	13.768	14.788	12.719	15.788	15.890
3	Jagung	Ton	1.117	564	649	959	160
4	Ubi kayu	Ton	4.174	4.008	1.988	479	226
5	Ubi jalar	Ton	1.731	1.721	692	115	98
6	Kacang tanah	Ton	202	227	159	192	94
7	Kedelai	Ton	299	81	86	90	39
8	Kacang hijau	Ton	68	41	14	57	28
9	Sayuran	Ton	5.064	3.188	3.386	3.014	-
10	Buah-buahan	Ton	25.148	7.818	25.353	26.372	-

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
Keterangan: *) Data hingga Oktober 2015

Peningkatan luasan lahan tanaman tersebut berimplikasi terhadap hasil produksi tanaman pangan. Pada periode tahun 2010 hingga 2014 telah mengalami peningkatan produksi padi sawah tinggi yaitu sebesar 11.112 ton, sedangkan produksi padi ladang meningkat masih sebesar 1202 ton. Tanaman pangan lainnya, palawija dan hortikultura masing terjadi fluktuasi hingga tahun 2014, meskipun pada tahun-tahun terakhir mengalami peningkatan yang sudah cukup menggembirakan.

Berdasarkan hasil capaian bidang pertanian Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015, perlu komitmen yang kuat bagi Pemerintah Kabupaten Kutai Timur untuk tetap mempertahankan bahkan terus meningkatkan luasan tanam dan produktivitas tanaman padi dari capaian yang stabil selama ini, sembari memberikan perhatian yang lebih serius terhadap penurunan luasan dan produksi tanaman umbi-umbian, palawija maupun hortikultura dengan mencegah luasan lahan yang dialihfungsikan serta melakukan upaya-upaya terobosan dan



inovatif untuk mengembangkan tanaman hortikultura dan tanaman palawija dalam mewujudkan target Kabupaten Kutai Timur menuju kemandirian pangan.

Banyak faktor yang mempengaruhi produktivitas padi dan tanaman pangan lainnya, di antaranya: kesuburan tanah, jenis bibit, musim, dan lain-lain. Upaya peningkatan produktivitas produksi pertanian, erat kaitannya dengan intensifikasi pertanian. Untuk itu, peningkatan kapasitas penyuluh pertanian, serta pengembangan teknologi dan metode pertanian menjadi penting untuk pelaksanaan program yang dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

2) Produksi padi (ton)

Hasil capaian produksi padi, terutama padi sawah di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2010 hingga 2014 menunjukkan adanya peningkatan yang konsisten seiring dengan peningkatan luas lahan sawah. Namun demikian jika dibandingkan antara capaian dengan target RPJMD maka, kenaikan tersebut masih belum cukup untuk mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD. Sehingga jika tidak dilakukan terobosan program yang inovatif dan efektif untuk meningkatkan produksi padi, maka pada target akhir tahun 2016 akan sulit terealisasikan.

Beberapa hal yang berpengaruh terhadap produktivitas padi diantaranya adalah:

- a) Luas lahan berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan tingkat teknologi yang sama, semakin luas lahan yang dapat ditanami padi, maka diduga akan semakin besar total produksinya.
- b) Tenaga kerja berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena semakin tinggi jumlah tenaga kerja hingga pada jumlah tertentu, produktivitas tenaga kerja mencapai optimal.
- c) Benih unggul berpengaruh positif terhadap produksi padi, dikarenakan benih yang bermutu mempunyai kemampuan teknis yang lebih tinggi jika dibanding dengan benih yang bermutu rendah.
- d) Pupuk berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena sampai batas tertentu, dengan pemupukan akan meningkatkan produktivitas per satuan luas lahan.
- e) Irigasi berpengaruh positif terhadap produksi padi, karena dengan pengairan yang baik produktivitas padi per satuan luas lahan semakin meningkat.



3) Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB

Sektor pertanian sebagai bagian integral dari sistem pembangunan di Kabupaten Kutai Timur, semakin penting dan strategis sejalan dengan arah perubahan lingkup nasional. Sektor pertanian memberikan kontribusi terbesar kedua setelah sektor pertambangan pada PDRB Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.56
Persentase Kontribusi PDRB ADHB sektor Pertanian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010 - 2014 (%)

Sub Sektor	Tahun				
	2010	2011	2012	2013	2014
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
PERTANIAN	6,81	8,41	9,44	9,70	12,67
a. Tanaman Pangan	0,18	0,18	0,19	0,22	0,22
b. Tanaman Hortikultura Semusim	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
c. Perkebunan Semusim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d. Tanaman Hortikultura Tahunan dan Lainnya	0,10	0,09	0,09	0,09	0,08
e. Perkebunan Tahunan	3,23	4,62	5,42	5,63	8,40
f. Peternakan	0,05	0,05	0,06	0,06	0,06
g. Jasa Pertanian dan Perburuhan	0,06	0,07	0,07	0,08	0,08
Kehutanan dan Penebangan Kayu	2,20	2,30	2,37	2,19	2,20
Perikanan	0,98	1,07	1,22	1,43	1,60

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2015

Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB ADHB kurun waktu 2010-2014 menunjukkan peningkatan kontribusi yang cukup signifikan dari tahun 2010 sebesar 6,81 persen menjadi 12,67 persen. Sementara itu, subsektor pertanian yang paling mendominasi kontribusi pertanian adalah sektor perkebunan tahunan dan kehutanan dan penebangan kayu. Sedangkan sektor tanaman pangan kontribusinya masih terbilang kecil yakni tahun 2010 sebesar 0,18 persen menjadi 0,22 persen pada tahun 2014.

4) Kontribusi sektor pertanian [palawija] terhadap PDRB

Perkembangan subsektor hortikultura menunjukkan kontribusi yang tetap dari tahun 2010 hingga tahun 2014 yakni sebesar 0,02 persen. Jika dilihat perkembangan nilainya menunjukkan perkembangan yang relatif stagnan pada tahun 2010 sebesar Rp 57.131,66 juta menjadi sebesar Rp 12.145,28 juta pada tahun 2014.

5) Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB

Kontribusi tertinggi sektor pertanian terhadap PDRB adalah pada subsektor perkebunan. Hasil produksi perkebunan yang mempunyai potensi



pengembangan dipandang dari sisi permintaan, baik dilihat dari peluang pasar maupun pesaingnya, serta mempunyai nilai ekonomis tinggi adalah kelapa sawit, karet, coklat, nanas, tanaman serat dan lada. Komoditas unggulan tersebut mempunyai peluang untuk pasar luar negeri. Kegiatan budidaya perkebunan telah dilakukan dengan produksi berupa cengkeh, coklat, lada, kopi, kelapa dan karet.

Tabel 2.57
Luas Lahan, Produksi dan Produktivitas Perkebunan 2011-2015

No	Uraian	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
Luas Lahan perkebunan (Ha):						
1	Karet	6.928,00	8.468,30	8.779,85	11.168,93	9.324,05
2	Kelapa	1.659,07	1.275,85	1.190,62	1.275,22	1.182,19
3	Kopi	236,45	218,97	218,54	220,27	211,87
4	Lada	264,50	352,88	347,88	345,63	243,13
5	Vanili	40,78	35,43	35,43	35,93	35,93
6	Kakao	6.404,40	5.253,10	4.818,40	4.472,65	4.453,65
7	Kelapa Sawit	275.454,06	302.307,53	360.210,19	404.087,21	406.467,47
8	Aren	249,95	257,30	270,80	270,80	262,80
9	Kemiri	76,93	61,67	62,67	62,67	-
Jumlah		291.314,14	317.974,03	375.934,38	421.939,31	422.201,09
Produksi perkebunan (Ton):						
1	Karet	279,98	543,64	347,86	764,54	315,95
2	Kelapa	1.000,91	583,90	344,03	495,59	616,90
3	Kopi	81,16	42,56	37,81	40,75	21,03
4	Lada	107,00	77,27	52,34	99,82	37,32
5	Vanili	10,40	5,21	5,62	6,53	4,28
6	Kakao	3.156,87	2.510,91	2.419,89	2.522,53	683,18
7	Kelapa Sawit	1.889.599,19	2.519.717,36	3.314.956,01	5.203.078,80	2.912.424,16
8	Aren	2.262,93	2.391,45	1.478,28	2.489,68	632,93
9	Kemiri	6,75	4,45	3,99	5,54	-
Jumlah		1.886.505,19	2.525.876,75	3.319.646,02	5.209.503,88	2.914.735,75
Produktivitas (Kg/Ha)						
Produksi/Luas Lahan yang Menghasilkan:						
1	Karet	712,76	1.174,98	715,50	1.075,41	-
2	Kelapa	910,56	577,31	369,14	538,99	-
3	Kopi Robusta	478,29	274,48	247,44	284,99	-
4	Lada	597,07	491,16	333,24	679,91	-
5	Vanili	388,69	208,32	232,60	261,20	-
6	Kakao	774,31	759,16	831,92	937,99	-
7	Kelapa Sawit	20.179,04	20.293,55	20.171,98	21.006,98	-
8	Aren	13.323,10	13.956,52	8.660,09	14.585,15	-
9	Kemiri	181,98	130,75	117,42	165,70	-
Jumlah		37.545,80	37.866,24	31.679,33	39.535,22	-

Sumber: Dinas Pertanian dan peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016
Keterangan: *) Data hingga Oktober 2015



Sub sektor perkebunan menunjukkan perkembangan yang baik dalam luas lahan tanam, produksi dan produktivitas serta penyerapan tenaga kerja. Hal ini terlihat dari meningkatnya total lahan, total produksi, produktivitas, dan penyerapan tenaga kerja yang terjadi dari tahun 2010-2014. Namun jika dicermati lebih dalam, terlihat bahwa peningkatan ini tidak terjadi pada seluruh komoditi perkebunan. Secara parsial terlihat adanya penurunan pada beberapa komoditi perkebunan, namun secara kumulatif menunjukkan peningkatan yang signifikan. Hal ini sangat dipengaruhi oleh perubahan minat petani dan peningkatan investasi pada komoditas tertentu yang menjadi favorit dan lebih menguntungkan.

Luas lahan tanam perkebunan dari tahun 2010-2014 bertambah seluas 182.016,45 Ha dengan peningkatan produksi 4105622,9 ton. Peningkatan produksi ini sangat ditunjang oleh peningkatan produksi perkebunan karet dan kelapa sawit. Kedua komoditas perkebunan ini pun pada gilirannya juga merupakan yang terbesar dalam proporsi penyerapan tenaga kerja di sub sektor perkebunan pada Tahun 2014, yaitu karet dan kelapa sawit.

Perkembangan yang pesat pada perkebunan kelapa sawit di Kabupaten Kutai Timur, telah pula diikuti dengan berkembangnya industri hasil perkebunan kelapa sawit berupa pabrik pengolahan *Crude Palm Oil* (CPO) di beberapa kecamatan yang menjadi sentra pengembangan perkebunan kelapa sawit. Hingga tahun 2012, telah terbangun 19 unit pabrik CPO di Kabupaten Kutai Timur dengan total kapasitas produksi terpasang 910 ton/jam dan kapasitas terpakai 880 ton/jam.

B. Kehutanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kehutanan salah satunya dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.58
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kehutanan
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	%	NA	47,16	-	-	-
Kerusakan kawasan hutan	%	NA	0,01	-	-	-
Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	%	0,71	0,60	-	-	-

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



1) Persentase Hutan dan Lahan Kritis yang Direhabilitasi

Luas hutan secara keseluruhan di Kabupaten Kutai Timur adalah 2.198.344 Ha atau 61,50 persen dari luas total wilayah kabupaten. Luasan menurut fungsinya, hutan di Kabupaten Kutai Timur meliputi : hutan lindung (13,31 persen), Hutan Suaka Alam dan Wisata (9,98 persen), Hutan Produksi Terbatas (39,52 persen) dan hutan produksi tetap (38,19 persen).

Tabel 2.59
Luas Kawasan Hutan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Fungsi Hutan	Luas (Ha)				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Hutan Lindung	317.200	317.200	270.489	382.077,63	318.257,79
2	Hutan Suaka Alam dan Wisata	184.764	184.764	215.742	197.934,34	197.973,52
3	Hutan Produksi Terbatas	839.200	839.200	787.652	772.520,93	712.550,57
4	Hutan Produksi Tetap	956.500	956.500	920.599	916.355,78	-
5	Hutan Tetap	1.980.464	1.980.464	2.205.534	-	-
6	Hutan Produksi Yang Dapat dikonversi	1.043.716	1.043.716	1.043.716	-	-
7	Luas Hutan	2.198.344	2.198.344	2.198.344	2.268.888,69	-
8	Luas Wilayah	3.574.760	3.574.760	3.574.760	3.574.760	-

Sumber: Dinas Kehutanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016

Hasil hutan utama dari kawasan kehutanan di Kutai Timur berupa 12 jenis kayu bulat dari 16 jenis kayu yang umumnya ada pada hutan Kalimantan Timur seperti: meranti, kapur, bengkirai, keruing, nyatoh, anggi, mersawa, Jelutung, kayu indah, rengas, resak dan lainnya. Jenis kayu yang paling banyak di eksploitasi adalah jenis kayu meranti, kapur, kruing dan bengkirai.

Perkembangan luasan wilayah hutan di Kabupaten Kutai Timur cenderung relatif tetap dari tahun ke tahun. Namun luasan hutan yang mengalami penurunan adalah hutan lindung, hutan produksi terbatas dan hutan produksi tetap, sedangkan yang mengalami peningkatan luasan adalah hutan suaka alan dan hutan tetap.



C. Energi dan Sumberdaya Mineral

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dapat dilihat dari tabel sebagai berikut:

Tabel 2.60
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pertambangan tanpa ijin	%	0	0	0	0	-
Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	%					-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Sektor pertambangan merupakan salah satu sektor yang punya peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Kutai Timur, khususnya tambang minyak bumi dan batubara. Pada tahun 2013, produksi minyak bumi sebesar 525,43 barrel, menurun tajam pada tahun 2014. Hal yang berbeda terjadi pada perkembangan produksi batubara, yang mencapai produksi 74,22 juta ton pada tahun 2013 jauh lebih tinggi dibanding tahun 2012 dengan produksi sebesar 64,36 juta ton, namun pada tahun 2015 kembali menurun menjadi 58,7 juta ton. Hasil produksi tambang batubara yang berada di Kabupaten Kutai Timur merupakan penyangga terbesar ekspor batubara di Provinsi Kalimantan Timur, selain itu juga hasil tambang batubara Kutai Timur digunakan sebagai bahan baku pembangkit listrik di Pulau Jawa.

Tabel 2.61
Produksi Minyak Bumi Dan Batu Bara
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Produksi	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Minyak Bumi (barrel)	617,90	682,88	525,43	350,34	-
2	Batubara (M tons)	57.982.231	64.357.763,17	74.218.224,29	58.702.215,00	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Perekonomian Kabupaten Kutai Timur didominasi oleh sektor pertambangan dan penggalian hingga mencapai 88,96 persen pada tahun 2014. Bila dirinci kontribusi dari sektor tersebut, maka subsektor Galian B (pertambangan non minyak dan gas bumi) berkontribusi paling tinggi yakni berkisar sebesar 86,73 persen, kemudian diikuti subsektor Galian A (pertambangan minyak dan gas bumi) sebesar 1,71 persen dan Galian C (penggalian) sebesar 0,53 persen. Namun besarnya



kontribusi terhadap PDRB tersebut harus disikapi dengan kehati-hatian, mengingat sektor pertambangan dan penggalian merupakan sumber daya yang tidak terbarukan dimana suatu saat akan mengalami penyusutan bahkan penipisan cadangan sehingga perlu dikembangkan sektor alternatif yakni sektor pertanian.

D. Pariwisata

Pembangunan sektor pariwisata dapat meningkatkan perekonomian suatu daerah karena pariwisata memberikan dukungan ekonomi yang kuat terhadap suatu wilayah. Industri ini dapat menghasilkan pendapatan besar bagi ekonomi lokal. Sektor ini memberikan peluang Bergeraknya berbagai kegiatan ekonomi masyarakat. Para turis baik wisatawan nusantara (wisnu) maupun wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung pada daerah membawa devisa dan berdampak pada masyarakat lokal. Dengan devisa, negara yang dikunjungi akan memperoleh dana pembangunan untuk meningkatkan perekonomian dan memberantas kemiskinan. Dengan demikian devisa meningkatkan perekonomian daerah. Karenanya sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang mampu mengintegrasikan kemajuan perekonomian pada berbagai dimensi pada skala nasional, regional, dan global.

Tabel 2.62
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Pariwisata
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kunjungan wisata	Orang	26.397	64.999	45.539	32.687	-
Jumlah obyek wisata di daerah	Obyek	9	15	68	68	-
Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	NA	0,65	NA	NA	-

Sumber: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Pembangunan sektor pariwisata suatu daerah dapat dilihat dari kunjungan wisata ke tujuan wisata daerah yang bersangkutan. Berdasarkan Tabel 2.62 dapat dilihat bahwa kunjungan di Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2010 hingga 2014 masih mengalami fluktuasi, dimana pada tahun 2010 hingga 2012 terus-menerus mengalami peningkatan, namun mengalami penurunan tajam pada tahun 2013 maupun tahun 2014. Kunjungan pada tahun 2013, sebagian besar tertuju pada wisata ke pantai sebanyak 24.903 orang atau sekitar 74,72 persen. Sedangkan



kunjungan menuju pegunungan sebanyak 2.309 orang atau sekitar 6,93 persen. Adapun kunjungan wisata hutan masih belum populer karena masih sedikit dikunjungi yakni sebanyak 6.116 orang atau berkisar 18,35 persen dari total kunjungan wisata yang terdiri dari wisatawan nusantara dan wisatawan mancanegara.

Tabel 2.63
Kunjungan Wisata
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No.	Jenis Obyek Wisata	2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Pantai	10.150	19.062	45.594	24.903	-
2	Pegunungan	4.732	4.780	4.680	2.309	-
3	Hutan	2.369	2.555	14.525	6.116	-
	Jumlah Pengunjung	17.251	26.137	64.999	33.172	-

Sumber: Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

E. Kelautan dan Perikanan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan Kelautan dan Perikanan dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.64
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Kelautan dan Perikanan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Produksi perikanan	%	NA	NA	NA	NA	-
Konsumsi Ikan	%	NA	57,88	45,43	46,75	-
Cakupan bina kelompok nelayan	%	NA	40,10	NA	NA	-
Produksi perikanan kelompok nelayan	%	NA	NA	NA	NA	-

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Ikan adalah sumber protein yang berfungsi untuk meningkatkan kecerdasan manusia, dan sekaligus sebagai upaya untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Hal ini dikarenakan usaha perikanan, mempunyai kaitan luas baik ke industri hulu [*backward linkage*] maupun hilir [*foreward linkage*], dan menyerap banyak tenaga kerja. Namun perkembangan selama kurun waktu 5 tahun yaitu 2010 hingga 2014, menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan, dimana capaian konsumsi ikan, produksi ikan maupun bina kelompok nelayan mengalami fluktuasi dan bahkan cenderung mengalami penurunan.



Tabel 2.65
Jumlah Produksi dan Konsumsi Ikan
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Uraian	Satuan	Tahun			
			2012	2013	2014	2015*
Rumah Tangga Perikanan:						
1	Perikanan Laut	RT	4.186	4.207	4.125	4.130
2	Perikanan Pesisiran Umum	RT	116	1.172	988	683
3	Tambak	RT	440	414	422	425
4	Kolam	RT	255	246	249	257
5	Keramba	RT	339	300	302	354
6	Budidaya Pantai / Sawah	RT	168	170	177	190
	Jumlah	RT	6.548	6.09	6.263	6.039
Produksi Hasil Perikanan:						
1	Perikanan Laut	Ton	5.584,3	5.211,0	5.668	2.998,74
2	Perikanan Pesisiran Umum	Ton	1.146,3	1.028,1	1.035	548,60
3	Tambak	Ton	834,8	684,1	690	371,16
4	Kolam	Ton	588,6	573,1	587	348,46
5	Keramba	Ton	403,1	348,5	357	189,16
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ton	1.748,5	1.604,4	1.669	884,68
	Jumlah	Ton	10.305,60	9.449,20	10.006	5.338,80
Nilai Produksi Hasil Perikanan:						
1	Perikanan Laut	Ribu Rp	131.579.350	132.695.144	133.553.040	70.783.217,20
2	Perikanan Pesisiran Umum	Ribu Rp	31.226.300	31.382.432	30.637.845	16.238.057,85
3	Tambak	Ribu Rp	32.037.950	25.915.650	26.174.807	30.498.134,50
4	Kolam	Ribu Rp	17.428.140	17.058.240	17.228.822	9.282.035,75
5	Keramba	Ribu Rp	16.333.750	13.919.600	14.058.796	7.429.699
6	Budidaya Pantai / Sawah	Ribu Rp	20.214.000	16.775.250	17.446.260	8.056.662,50
	Jumlah	Ribu Rp	248.819.490	237.946.316	239.099.570	142.287.806,80

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015
Keterangan: *) Data sampai oktober 2015

Jumlah produksi dan konsumsi ikan dari tahun 2010 hingga 2013 masih mengalami perkembangan yang fluktuatif. Pada tahun 2010 jumlah produksi telah mencapai 15.649 ton pada tahun 2010 turun menjadi 9.449 ton pada tahun 2013. Hal tersebut terjadi diantaranya adanya pergeseran usaha perikanan masyarakat di Kabupaten Kutai Timur. Selama tahun 2010 hingga tahun 2013 mengalami penurunan jumlah rumah tangga perikanan disinyalir karena beralih mata pencaharian. Penurunan rumah tangga perikanan ini disebabkan oleh banyaknya rumah tangga yang beralih mata pencaharian sebagai pengaruh dari kendala cuaca dan kelangkaan BBM. Penurunan rumah tangga perikanan ini pada gilirannya juga



mempengaruhi perkembangan produksi hasil perikanan dan nilai hasil produksi yang menurun.

Meskipun sub sektor perikanan secara umum mempunyai potensi yang besar sebagai andalan pendapatan daerah maupun masyarakat dan telah terbukti ketangguhannya dalam menghadapi krisis, namun kenyataannya dalam pengembangan sektor perikanan ke depan masih cukup banyak masalah dan tantangan yang harus akan dihadapi, diantaranya pemanfaatan sumberdaya perikanan umumnya masih rendah, ketersediaan prasarana perikanan masih terbatas, lemahnya pelaksanaan sistem MSC (*monitoring, control dan surveillance*) Oleh karena itu mengingat capaian beberapa indikator kinerja dalam optimalitas pemanfaatan sumberdaya perikanan dan produktifitas pada umumnya masih rendah, sehingga diperlukan perhatian yang lebih.

F. Perdagangan

Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan urusan perdagangan dapat dilihat dari indikator kinerja kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB dan ekspor bersih, sebagai berikut:

Tabel 2.66
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Perdagangan
Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kontribusi sektor perdagangan terhadap PDRB	%	3,45	3,44	3,38	NA	-
Ekspor bersih perdagangan (ribu USD)	%	3.830.437	3.134.541	2.819.570,31	2.543.677,84	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

G. Perindustrian

Daya saing yang tinggi pada sektor pertanian, merupakan prasyarat dalam pengembangan agroindustri, dan daya saing tersebut merupakan interaksi keseluruhan subsistem dalam sistem agribisnis. Dengan proses produksi yang efisien dan biaya produksi yang semakin rendah, sektor industri, termasuk industri pengolahan akan mampu meningkatkan daya saing yang pada gilirannya akan dapat berkontribusi terhadap PDRB. Sebagai salah satu contoh capaian indikator kinerja, disajikan pada Tabel berikut:



Tabel 2.67
Capaian Aspek Pelayanan Umum Urusan Prindustrian
di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kontribusi sektor industri terhadap PDRB	%	0,23	0,20	-	-	-
Pertumbuhan industri	%	1,01	0,75	-	-	-

Sumber: Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

2.1.4 ASPEK DAYA SAING DAERAH

Daya saing antar daerah merupakan komponen penting dalam pembangunan ekonomi, khususnya dalam hal kemampuan daerah untuk memenuhi kebutuhannya. Penguatan daya saing daerah tidak lepas dari kontribusi seluruh sektor pembentuk PDRB daerah itu sendiri. Gambaran umum kondisi daerah terkait dengan Aspek Daya Saing Daerah dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

2.1.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

Angka konsumsi rumah tangga per kapita adalah rata-rata pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita. Angka ini dihitung berdasarkan pengeluaran penduduk untuk makanan dan bukan makanan per jumlah penduduk. Makanan mencakup seluruh jenis makanan termasuk makanan jadi, minuman, tembakau, dan sirih, bukan makanan mencakup perumahan, sandang, biaya kesehatan, sekolah dan seterusnya.

Pola konsumsi rumah tangga merupakan salah satu indikator kesejahteraan rumah tangga/keluarga. Selama ini berkembang pengertian bahwa besar kecilnya proporsi pengeluaran untuk konsumsi makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga dapat memberikan gambaran kesejahteraan rumah tangga tersebut. Rumah tangga dengan proporsi pengeluaran yang lebih besar untuk konsumsi makanan mengindikasikan rumah tangga yang berpenghasilan rendah. Makin tinggi tingkat penghasilan rumah tangga, makin kecil proporsi pengeluaran untuk makanan terhadap seluruh pengeluaran rumah tangga. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa rumah tangga/keluarga akan semakin sejahtera bila persentase pengeluaran untuk makanan jauh lebih kecil dibandingkan persentase pengeluaran untuk non-



makanan.

Tabel 2.68
Pengeluaran Per Kapita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	Rupiah	-	-	-	-	-

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

B. Pertanian

Pembangunan pertanian pada dasarnya merupakan upaya untuk meningkatkan kualitas hidup petani.

Tabel 2.69
Rata-rata Pendapatan Petani Per Tahun
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-rata pendapatan Petani per Tahun	Juta/tahun	-	7,00	12-20 juta	18-33 juta	-

Sumber: Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015.

Berdasarkan Tabel di atas menunjukkan adanya kecenderungan peningkatan pendapatan rata-rata petani per tahun yang cukup menggembirakan. Hal ini juga dapat diartikan, bahwa dari tahun ke tahun telah terjadi kecenderungan peningkatan kesejahteraan para petani.

2.1.4.2 Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

Gambaran umum kondisi Daya Saing Daerah terkait Fasilitas Wilayah/Infrastruktur dapat dilihat dari indikator kinerja:

A. Perhubungan

1) Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan

Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan, Arus lalu lintas pengguna jalan semakin meningkat dilihat dari semakin bertambahnya jumlah kendaraan bermotor terutama di era otonomisasi daerah dimana jumlah kendaraan bertambah begitu signifikan dengan rata-rata per tahunnya. Namun demikian sarana dan prasarana pelayanan transportasi umum seperti jalan lebih lambat dan masih belum dapat



menjangkau seluruh daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 2.70
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Perhubungan
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	%	0,02'	0,02'	0,02	0,01	0,01
Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun			112.754	116.437	98.627	580.585

Sumber: Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kab. Kutai Timur Tahun 2016

Lalu lintas antar desa dari delapan belas kecamatan di Kutai Timur kesemuanya dapat dilewati melalui jalan darat dan terdapat dua belas kecamatan yang melalui darat dan air atau sebesar 66,66 persen. Sebagian besar jalan darat masih berpermukaan tanah yaitu sebanyak sepuluh kecamatan atau 55,55 persen, dan yang permukaan diperkeras sebanyak empat kecamatan atau 22,22 persen, serta hanya tiga kecamatan atau 16,66 persen yang permukaan jalannya aspal yaitu Kecamatan Sangatta Utara, Teluk Pandan, dan Sangatta Selatan. Sementara itu jenis angkutan umum utama ke ibu kota kecamatan sebagian besar menggunakan angkutan ojek motor yaitu sebanyak sebelas kecamatan atau 61,11 persen, dan hanya tiga kecamatan yang transportasi utamanya menggunakan kendaraan roda empat atau 16,66 persen yaitu Kecamatan Kombeng, Muara Bengkal, Sangatta Utara dan sisanya menggunakan transportasi umum perahu kapal motor yaitu Kecamatan Busang, Telen, Sangkulirang dan Sandaran.

2) Jumlah orang/barang melalui dermaga/bandara/terminal per tahun

Perekonomian suatu wilayah dapat tercermin dari mobilitas orang atau barang. Mobilitas penduduk maupun barang baik melalui pelabuhan, bandara, maupun terminal merupakan indikator mobilitas tersebut. Mobilitas orang maupun barang dengan angkutan barang di Kabupaten Kutai Timur tiap tahun mengalami peningkatan dari 5.216 [tahun 2013] menjadi 5.552 pada tahun 2014. Hal ini dimungkinkan karena kondisi geografis Kabupaten Kutai Timur lebih memberikan pilihan masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan melalui bandara daripada angkutan umum lainnya. Selain lebih menguntungkan dari sisi waktu [lebih cepat], juga risiko dalam perjalanan dapat diminimalkan.



B. Penataan Ruang

Gambaran umum kondisi Fasilitas Wilayah/Infrastruktur terkait dengan Penataan Wilayah, disajikan salah satu indikator kinerja yaitu ketaatan terhadap Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

Tabel 2.71
Capaian Aspek Daya Daerah Saing Urusan Penataan Ruang
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Ketaatan terhadap RTRW	%	NA	NA	90	90	-

Sumber: Dinas Tata Ruang Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan ketaatan pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terhadap RTRW yang telah ditetapkan cukup tinggi, meskipun pada 2 [dua] tahun terakhir terdapat sedikit penurunan menjadi 90 persen.

C. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1) Jenis Jumlah Bank dan Cabang

Kondisi umum fasilitas wilayah/infrastruktur terkait bidang ekonomi, diantaranya digambarkan dengan adanya fasilitas bank dan non bank. Hal ini mengingat bahwa aktivitas perekonomian yang semakin tinggi akan selalu membutuhkan dukungan sarana atau fasilitas perbankan sebagai sarana pembayaran, perkreditan, pendanaan, atau transaksi lainnya.

Tabel 2.72
Aspek Daya Saing Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi
Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jenis jumlah bank dan cabang	unit	NA	NA	26	26	-

Sumber: Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan bahwa dalam jangka waktu 5 tahun (2011 hingga 2014) terdapat kenaikan jumlah bank dan non bank dua kali lipat, sehingga kondisi ini



dapat mendorong dan memudahkan adanya akses modal maupun transaksi perdagangan, baik Kabupaten Kutai Timur maupun Kabupaten lain dalam /luar propinsi.

2) Jenis, Kelas, dan Jumlah Penginapan/Hotel

Perkembangan perekonomian Kabupaten Kutai Timur dalam kurun lima tahun terakhir cukup kondusif. Kondisi ini tidak terlepas dari banyak aktivitas yang terkait dengan adanya sektor pertambangan yang menjadi tulang punggung perekonomian. Pertumbuhan ekonomi yang cukup cepat menyebabkan banyaknya pendatang dari luar untuk mengadu nasib maupun melakukan transaksi untuk berbisnis. Situasi ini menyebabkan para pendatang yang belum memiliki tempat tinggal mengharuskan mereka memerlukan tempat tinggal sementara. Tempat singgah sementara seperti hotel dan penginapan menjadi sangat dibutuhkan. Oleh karenanya sarana hotel dan penginapan di Kabupaten Kutai Timur sangat dibutuhkan oleh pendatang baik dari lokal maupun asing.

D. Lingkungan Hidup

Manusia hidup memang tidak bisa dipisahkan dari pengaruh lingkungan di sekitarnya. Lingkungan merupakan salah satu variabel yang seringkali mendapat perhatian khusus dalam menilai kondisi kesehatan masyarakat karena perannya dalam menentukan baik buruknya derajat kesehatan. Untuk menggambarkan keadaan lingkungan, disajikan indikator seperti akses air bersih dan jangkauan layanan PDAM.

Tersalurnya air bersih secara merata dan terpenuhinya standar air layak dan higienis untuk dikonsumsi oleh masyarakat adalah ideal guna pemenuhan kebutuhan air dalam kehidupan untuk sehat. Tabel 2.73 menunjukkan capaian persentase rumah tangga yang sudah menggunakan air bersih di Kutai Timur relatif stagnan bahkan cenderung mengalami penurunan, dimana pada tahun 2014 masih mencapai 31,48 persen. Kondisi ini memerlukan perhatian lebih serius dan upaya yang lebih keras dalam akselerasi pemenuhan terhadap kebutuhan air. Hal ini mengingat air merupakan kebutuhan dan bagian dari kehidupan manusia sebagai prasyarat dan elemen penting untuk dapat hidup sehat.



Tabel 2.73
Capaian Aspek Daya Saing Daerah Urusan Lingkungan Hidup
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase Rumah tangga yang menggunakan air bersih	%	NA	NA	78,48	31,48	-

Sumber: Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

E. Komunikasi dan Informatika

Tabel 2.74
Aspek Daya Saing Daerah Urusan Komunikasi dan Informatika
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Persentase rumah tangga pengguna listrik	%	NA	39,35	74	78,4	-
Rasio ketersediaan daya listrik	%	NA	46,81	43,7	43,9	-

Sumber: Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Tabel di atas menunjukkan terdapat kecenderungan peningkatan rumahtangga pengguna listrik, namun di sisi lain masih belum diikuti dengan peningkatan ketersediaan daya listrik yang memadai.

1) Persentase Rumah Tangga Yang Menggunakan Listrik

Listrik adalah komoditas penting bagi keberlangsungan sendi-sendi kehidupan manusia saat ini, tanpa pasokan energi listrik, hampir dipastikan banyak rumah tangga, dunia usaha maupun sektor lainnya lumpuh karenanya. Berdasarkan capaian selama tiga tahun terakhir 2011-2014 menunjukkan adanya peningkatan persentase rumah tangga pengguna listrik. Berdasarkan data Perusahaan Listrik Negara PLN Ranting Sangatta menunjukkan selama kurun waktu empat tahun (2010-2013) justru mengalami penurunan yaitu jumlah pelanggan listrik tahun 2010 sebesar 15.310 menjadi 13.564 pada tahun 2013 (Kutai Timur Dalam Angka Tahun 2014).

2) Rasio Ketersediaan Daya Listrik

Rasio ketersediaan listrik adalah perbandingan daya listrik terpasang terhadap jumlah kebutuhan. Ketersediaan listrik di Kabupaten Kutai Timur sangat penting guna keberlangsungan pemerintahan, dunia usaha, rumah tangga dan lainnya, sehingga harus dipastikan pelayanan listrik terutama ketersediaan listrik dapat menjangkau



masyarakat. Energi listrik di Kabupaten Kutai Timur selama tahun 2013, yang diproduksi sebesar 5.301.657 Kwh dan terjual 13.564 Kwh [Kutai Timur Dalam Angka 2014].

2.1.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Kondisi suatu daerah, seperti tingkat keamanan, kecepatan proses pelayanan perijinan serta ada tidaknya pungutan berkaitan dengan minat dan daya tarik investor untuk menanamkan modalnya untuk berusaha di wilayah tersebut. Iklim investasi yang positif dibangun dari kondusifnya wilayah dari segi keamanan, demokrasi, politik, hingga unsur sosial budaya.

Tabel 2.75
Capaian Indikator Fokus Iklim Berinvestasi
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Angka Kriminalitas	%	NA	NA	39	49	-
Lama proses perijinan	hari	NA	NA	NA	3	-
Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	jenis	NA	NA	26	27	-

Sumber: BPS Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

Gambaran umum kondisi daerah yang dilihat dari beberapa indikator terkait, sebagaimana disajikan pada tabel 2.75 menunjukkan bahwa kondisi Kutai Timur yang secara umum tidak terdapat perbedaan dalam 5 tahun terakhir, namun pada 1 tahun terakhir (2014) terdapat kenaikan angka kriminal yang perlu mendapat perhatian serius berbagai pihak terkait keamanan dalam upaya menjaga keamanan wilayah.

1) Angka Kriminalitas

Berdasarkan Tabel 2.75 menunjukkan tindak kriminal yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur dari tahun ke tahun terjadi peningkatan angka kriminalitas yang cukup tinggi. Kasus pencurian merupakan tindak kriminal tertinggi setiap tahunnya. Adanya peningkatan gangguan keamanan, perlu mendapat perhatian lebih serius agar dapat lebih menjamin kantibmas agar kondusif untuk berinvestasi.

2) Kemudahan Perizinan

Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik. Proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya. Tabel 2.82 menunjukkan kecepatan pengurusan ijin dari tahun 2010 hingga 2015 tidak



banyak berubah yaitu sekitar 3 hari. Demikian pula sebaliknya, jika proses perizinan tidak efisien, berbelit-belit, dan tidak transparan baik dalam hal waktu, biaya, maupun prosedur akan berdampak terhadap menurunnya keinginan orang untuk mengurus perizinan usaha, dan mereka mencari tempat investasi lain yang prosesnya lebih jelas dan transparan. Hal ini tentu saja selanjutnya akan berdampak terhadap ketersediaan lapangan kerja dan masalah-masalah ketenagakerjaan lainnya yang berujung pada terhambatnya pembangunan ekonomi.

Dalam era otonomi daerah memberikan ruang yang cukup besar bagi daerah untuk mengatur dan mengurus pelayanan publiknya, termasuk dalam hal perizinan. Diharapkan semua jenis perizinan ditempatkan kepada Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). PTSP diharapkan dapat memberikan kemudahan perijinan usaha dalam menunjang laju pertumbuhan ekonomi daerah, yang pada gilirannya dapat membuka lapangan kerja serta menurunkan kemiskinan. Oleh karena itu, dalam rangka memberikan pelayanan publik yang semakin baik diperlukan infrastruktur dan sistem yang baik pula.

3) Pengenaan Pajak Daerah (Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah)

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu unsur penentu pendanaan pembangunan suatu daerah. Hal ini dikarenakan pajak maupun retribusi sebagai sumber pendapatan suatu wilayah (kabupaten) pajak dan retribusi berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pembangunan. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin pemerintahan (SKPD/lembaga) dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya.

Adapun jumlah retribusi yang dikeluarkan selama periode tersebut terus mengalami peningkatan yakni dari tahun 2010 sebanyak 24 dan meningkat pada tahun 2014 sebanyak 27. Adanya retribusi yang mendukung investasi ini sangat penting bagi pembangunan daerah. Kebijakan yang terkait dengan retribusi yang mendukung iklim investasi ini perlu untuk ditingkatkan dengan tujuan untuk memberikan kesempatan pihak terkait dengan investasi yang akan menanamkan modalnya di Kabuapten Kutai Timur.

2.1.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan faktor penting dalam pembangunan, selain sebagai obyek pembangunan juga sebagai subyek pelaksanaan pembangunan. Perbaikan dalam sumber daya manusia tidak lepas dari usaha pemerintah melalui



perbaikan tingkat pendidikan, kesehatan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Gambaran umum kondisi daerah aspek daya saing daerah terkait dengan Sumber Daya Manusia dapat dilihat dari indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 2.76
Capaian Indikator Fokus Sumber Daya Manusia
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

Indikator	Satuan	Tahun				
		2011	2012	2013	2014	2015
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rasio lulusan S1/S2/S3		NA	NA	2.024	470	NA
Rasio ketergantungan		36,90	42,40	38,03	49,10	NA

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015

1) Kualitas Tenaga Kerja (Rasio Lulusan S1/S2/S3)

Keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas yang berperan penting dalam proses keberlangsungan pembangunan dan daya saing daerah. Kualitas sumber daya manusia, salah satunya dapat dipengaruhi oleh jenjang pendidikan. Semakin tinggi jenjang pendidikan akan berdampak pada keterampilan dan produktivitas seseorang. Produktivitas berperan besar dalam penggerakan, yang pada akhirnya dapat mempercepat proses pembangunan.

Berdasarkan Tabel 2.76 tampak bahwa jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 mengalami penurunan cukup signifikan, meski pada tahun-tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Efek dari rendahnya tingkat pendidikan akan mempengaruhi minimnya penguasaan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan keahlian sebagai modal daya saing tenaga kerja. Oleh karena itu, masih rendahnya rasio lulusan sarjana menunjukkan perlunya upaya yang lebih keras untuk mendorong peningkatan jumlah penduduk berpendidikan tinggi, menuju rasio yang ideal.

2) Tingkat Ketergantungan Penduduk

Tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah menggambarkan komposisi kelompok umur produktif yang diwakili oleh penduduk dewasa/PD (diasumsikan penduduk dewasa adalah penduduk yang bekerja) akan menanggung kelompok umur yang tidak produktif yang diwakili oleh penduduk muda/PM dan penduduk tua/PT. Semakin tinggi tingkat ketergantungan penduduk suatu wilayah maka semakin berat beban penduduk dewasa menanggung penduduk yang tidak bekerja, dan sebaliknya.



Berdasarkan Tabel 2.76 tersebut di atas menjelaskan kondisi rasio ketergantungan penduduk Kabupaten Kutai Timur dari tahun 2010 hingga 2014. Rasio ketergantungan penduduk dalam periode tersebut masih cukup tinggi yaitu mencapai angka 36,90 pada tahun 2010. Angka 36,90 tersebut mengisyaratkan bahwa dari 100 penduduk bekerja akan menanggung 36 hingga 37 penduduk yang tidak bekerja. Salah satu penyebab masih tingginya rasio ketergantungan di Kabupaten Kutai Timur dikarenakan angka fertillitas masih tinggi, terutama pada penduduk muda yakni kelompok 15 tahun ke bawah. Dibandingkan tahun 2013, pada tahun 2014 terjadi peningkatan rasio ketergantungan yang cukup tinggi, dimana tahun 2013 sebesar 38, sedangkan tahun 2014 meningkat kembali menjadi 49,10.



2.2 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD sampai Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan pada perubahan RKPD digunakan untuk melihat capaian tingkat kemajuan dan kesesuaian dengan RPJMD. Untuk mengetahui capaian target yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Kutai Timur dengan realisasi yang terjadi dapat dilihat berdasarkan Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program, Urusan Pemerintahan Daerah terdiri dari Urusan Wajib yang meliputi Urusan Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum, Perumahan, Penataan Ruang, Perencanaan Pembangunan, Perhubungan, Lingkungan Hidup, Pertanahan, Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, Sosial, Ketenagakerjaan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Penanaman Modal, Kebudayaan, Kepemudaan dan Olah Raga, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian, Ketahanan Pangan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Statistik, Kearsipan, Komunikasi dan Informatika, dan Perpustakaan serta Urusan Pilihan yang meliputi Pertanian, Kehutanan, Energi dan Sumberdaya Mineral, Pariwisata, Kelautan dan Perikanan, Perdagangan dan Transmigrasi.

Evaluasi pelaksanaan program Kabupaten Kutai Timur hingga tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 2.77 di bawah ini:



Tabel 2.77
Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01	Pendidikan							
1.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka melek huruf	98,00 %	98,28%	98,00 %			Dinas Pendidikan
1.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka rata-rata lama sekolah	9,02	8,60	9,02			
1.01.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD /MI/Paket A	Minimal 98 %	113,83%	Minimal 98 %			
1.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP/MTs/Paket B	Minimal 97 %	98,39%	Minimal 97 %			
1.01.15	Program Pendidikan Anak Usia Dini	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	78,63 %	87,38%	78,63 %			
1.01.18	Program Pendidikan Non Formal	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Minimal 97,30 %	97,35%	Minimal 97,30 %			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.01.20	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Minimal 76 %	97,28%	Minimal 76 %			
1.01.22	Program Manajemen Pelayanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket	70%	63,32%	70%			
1.01.23	Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 7 - 12	Minimal 99 %	105,08%	Minimal 99 %			
1.01.34	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 13 - 15	Minimal 97 %	71,74%	Minimal 97 %			
1.01.41	Program Pendidikan Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus (inklusi)	Angka Partisipasi Sekolah (APS) 16 - 19	Minimal 82,56 %	65,12%	Minimal 82,56 %			
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SD)	57,95 %	53,08	57,95 %			
		Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah (SMP)	51,22 %	51,86	51,22 %			
		Rasio guru/murid (SD)	Minimal 99 %	16,93	Minimal 99 %			
		Rasio guru/murid (SMP)	Minimal 97 %	13,43	Minimal 97 %			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah [SMA/SMK]	52,48 %		52,48 %			
		Rasio guru terhadap murid SMA	63,03 %		63,03 %			
		Sekolah pendidikan SD/MI kondisi bangunan baik	Di atas 90 %		Di atas 90 %			
		Sekolah pendidikan SMP/MTs dan SMA/SMK/MA kondisi bangunan baik	Di atas 90 %		Di atas 90 %			
		Pendidikan Anak Usia Dini [PAUD]	Minimal 95 %	73,50%	Minimal 95 %			
		Angka Putus Sekolah [APS] SD/MI	0,05 %	0,1%	0,05 %			
		Angka Putus Sekolah [APS] SMP/MTs	0,17 %	0,42%	0,17 %			
		Angka Putus Sekolah [APS] SMA/SMK/MA	0,17 %		0,17 %			
		Angka Kelulusan [AL] SD/MI	100%	100%	100%			
		Angka Kelulusan [AL] SMP/MTs	Minimal 99 %	100%				
		Angka Kelulusan [AL] SMA/SMK/MA	Minimal 99 %	98,00%	Minimal 99 %			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [trwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
		Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	95,55 %	98,00%	95,55 %			
		Angka Melanjutkan (AM) dan SMP /MTs ke SMA /SMK/MA	Minimal 97,5 %	96,00%	Minimal 97,5 %			
		Guru yang memenuhi kualifikasi S1/DIV	60,79 %	112,00%	60,79 %			
1.02.	Kesehatan							Dinas Kesehatan dan RSUD
1.02.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angka kelangsungan hidup bayi	95,67	94,00	95,67			
1.02.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Angka usia harapan hidup	72,41	69,58	72,41			
1.02.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Rasio penyandu per satuan balisa	12,37	7,02	12,37			
1.02.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio puskesmas, poliklinik, pusda per satuan penduduk	Minimal 0,45	0,37	Minimal 0,45			
1.02.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	Minimal 0,02	0,01	Minimal 0,02			
1.02.15	Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	Rasio dokter per satuan penduduk	Minimal 0,39	0,30	Minimal 0,39			
1.02.16	Program Upaya Peningkatan	Rasio tenaga medis per satuan penduduk	Minimal 1,74		Minimal 1,74			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trawulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kesehatan Masyarakat							
1.02.17	Program Pengawasan Obat dan Makanan	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100%		100%			
1.02.19	Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	Minimal 56 %		Minimal 56 %			
1.02.20	Program Perbaikan Gizi Masyarakat	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	Minimal 55 %		Minimal 55 %			
1.02.21	Program Pengembangan Lingkungan Sehat	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	100%		100%			
1.02.22	Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	Minimal 70 %		Minimal 70 %			
1.02.24	Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	Minimal 85 %		Minimal 85 %			



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.25	Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu dan Jaringannya	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	80%		80%			
1.02.26	Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan kunjungan bayi	Minimal 65 %		Minimal 65 %			
1.02.27	Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/Rumah Sakit Mata	Cakupan puskesmas	Minimal 105,56 %		Minimal 105,56 %			
1.02.28	Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan	Cakupan puskesmas pembantu	78,15 %		78,15 %			
1.02.32	Program Peningkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak							
1.02.33	Program Upaya Kesehatan Perorangan							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.02.34	Program Manajemen dan Kebijakan Pembangunan Kesehatan							
1.02.35	Program Peningkatan Sistem Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Masyarakat							
1.02.36	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan							
1.03.	Pekerjaan Umum							
1.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	75%		75%			
1.03.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio Jaringan Ingsi	90%	0,08	90%			
1.03.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Rasio tempat ibadah per satuan (seribu) penduduk	3,00		3,00			
1.03.16	Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-Gorong	Persentase rumah tinggal bersanitasi	75,0 %		75,0 %			Dinas Pekerjaan Umum



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Usury/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kekuaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
1.03.24	Program pengembangan dan pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairannya Lainnya	Rasio tempat pemukiman umum per satu penduduk	Sesuai standar		Sesuai standar			
1.03.26	Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, danau dan Sumber- Daya Air Lainnya	Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 80 %		Minimal 80 %			
1.03.27	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah	Rasio rumah layak huni	Minimal 85 %		Minimal 85 %			
1.03.28	Program Pengendalian Banjir	Rasio permukiman layak huni	62,80 %		62,80 %			
1.03.30	Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan	Rasio panjang jalan dilalu Roda 4	0,0052		0,0052			
1.03.32	Pembangunan Infrastruktur Perkotaan	Panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/saluran pembuangan air (minimal 1,5 m)	Minimal 0,15		Minimal 0,15			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.33	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemerintahan	Sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar	0,01 %		0,01 %			
1.03.34	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Umum	Sempadan sungai yang dipakai bangunan liar	80%		80%			
1.03.35	Program Pembangunan Jalan	Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota	38,94 %		38,94 %			
1.03.36	Program Pembangunan Jembatan	Luas ingasi Kabupaten dalam kondisi baik	78,56 %	43,33	78,56 %			
1.03.37	Program Pemeliharaan Jalan dan Jembatan							
1.03.38	Pembuatan Sistem Informasi dan Perencanaan Pembangunan Infrastruktur							
1.03.39	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Air Bersih Kecamatan							
1.03.40	DAK Subbidang Sanitasi Kabupaten / Kota							



Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [trwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.03.41	DAK Subbidang Air Minum Kabupaten / Kota							
1.03.42	Swakelola Bidang Cipta Karya							
1.04.	Perumahan							
1.04.19	Program Peningkatan Kesigapan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	Rumah tangga pengguna air bersih	85,44 %		85,44 %			Dinas Pekerjaan Umum
		Rumah tangga pengguna listrik	Minimal 30 %		Minimal 30 %			
		Rumah tangga ber-Sanitasi	75,00 %		75,00 %			
		Rumah layak huni	Minimal 85 %		Minimal 85 %			
1.05.	Penataan Ruang							
1.05.16	Program Pemanfaatan Ruang	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	Minimal 40 %		Minimal 40 %			Dinas Tata Ruang
1.05.17	Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang	Rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan	Nak minimal 10 %		Nak minimal 10 %			
		Ruang publik yang berubah peruntukannya	0%		0%			
		Ketaatan terhadap HTRW	100%		100%			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.06.	Perencanaan Pembangunan							
1.06.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yg telah ditetapkan dgn PERDA	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	Bappeda
1.06.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan: RPJMD yg telah ditetapkan dgn PERDA/PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	
1.06.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Tersedianya Dokumen Perencanaan : RKPD yg telah ditetapkan dgn PERKADA	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	
1.06.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penjabaran Program RPJMD kedalam RKPD	Ada	Ada	Ada	Ada	100%	
1.06.15	Program Pengembangan data/informasi							
1.06.21	Program perencanaan pembangunan daerah							
1.06.22	Program perencanaan pembangunan ekonomi							
1.06.23	Program perencanaan sosial budaya							
1.06.26	Program Perencanaan							



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.07.	Tata Ruang Perhubungan							
1.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Angkutan Umum Darat	96,631		96,631			Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
1.07.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Angkutan Umum Laut/ Udara	688		688			
1.07.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rasio jin trayek	0,13		0,13			
1.07.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Jumlah uj kir angkutan umum	383	5.964	383			
1.07.15	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	Terminal	13	13	13			
1.07.16	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LAJ	Pelabuhan Laut	4	3	4			
1.07.17	Program peningkatan pelayanan angkutan	Pelabuhan Udara	11	11	11			



Kode	Usus/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.07.18	Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan	Angkutan Darat	0,79	37,77	0,79			
1.07.19	Program peningkatan dan pengamanan lalu lintas	Kepemilikan KIR angkutan umum	100%		100%			
1.07.20	Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor	Lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR)	Maksimal 1 hari	25.46 menit	Maksimal 1 hari			
1.07.26	Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	Biaya pengujian kelayakan angkutan umum	Sesuai standar		Sesuai standar			
1.07.27	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Pemasangan Rambu- rambu	Sesuai standar	115 %	Sesuai standar			
		Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan	0,67		0,67			
		Jumlah orang/berang melalui dermaga/tandara/ terminal per tahun	Meningkat		Meningkat			
1.08.	Lingkungan Hidup							
1.08.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase penanganan sampah	80%	0,77	80%			Badan Lingkungan Hidup



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Istisna/Revisi Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Aktif Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Kekuatan Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trivulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.08.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Persentase Penduduk berakses air minum	Minimal 80 %		Minimal 80 %			
1.08.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Persentase Luas pemukiman yang tertata	Naik minimal 10 %		Naik minimal 10 %			
1.08.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Pengelolaan kualitas air [penetapan kelas air]	40%		40%			
1.08.15	Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	Pengendalian potensi sumber pencemaran air	50%		50%			
1.08.16	Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	Sampling pemantauan kualitas air sungai dan danau secara berkala pada periode musim hujan dan kemarau	100%		100%			
1.08.17	Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	Pelaksanaan penetapan status mutu air	35%		35%			
1.08.18	Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber daya Alam	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDL	Minimal 85 %		Minimal 85 %			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.08.19	Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk	Minimal 45 %		Minimal 45 %			
1.08.21	Program pengembangan ekawisata dan jasa lingkungan di kawasan-kawasan konservasi laut dan hutan	Penegakan hukum lingkungan	50%		50%			
1.08.24	Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Persentase Rumah Tangga (RT) yang menggunakan air bersih	60%		60%			
1.08.26	Program Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup							
1.08.27	Program Pengelolaan Lingkungan Alam							
1.08.28	Program Pengelolaan Lingkungan Sosial							
1.09.	Pertanahan							
1.09.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase luas lahan bersertifikat	Naik minimal 10 %	1.601	Naik minimal 10 %			



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Unsur/Bidang Lulusan Pemerintahan Daerah Dari Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.09.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Penyelesaian kasus tanah Negara	100%	26	100%			
1.09.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Penyelesaian izin lokasi	100%	72,41	100%			
1.09.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.09.16	Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah							
1.09.17	Program Penyelesaian Konflik-Konflik Pertanahan							
1.09.19	Program Pertanahan							
1.10.	Kependudukan dan Catatan Sipil							
1.10.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio penduduk berKTP per satuan penduduk	Minimal 90 %		Minimal 90 %			Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipi
1.10.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Rasio bayi berakte kelahiran	100%		100%			



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.10.15	Program Penataan Administrasi Kependudukan	Rasio pemasangan berakte nikah	Minimal 75 %		Minimal 75 %			Badan Pembudayaan Perempuan dan Keluarga Berencana
1.10.16	Program Keluarga Berencana	Kepemilikan KTP	Minimal 90 %		Minimal 90 %			
		Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	Minimal 75 %		Minimal 75 %			
		Ketersediaan database kependudukan skala kabupaten	Ada lengkap		Ada lengkap	Ada lengkap		
		Penersipan KTP Nasional berbasis NIK	90%		90%			
1.11.	Pembudayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
1.11.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	10%	45,83%	10%			
1.11.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	90%	90%	90%			
1.11.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Rasio KDRT	Menurun		Menurun			
1.11.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur	0%		0%			



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Aktif-Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
	Kinerja dan Keuangan							
1.11.07	Program Pelaksanaan Model-model Kegiatan Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga	Partisipasi angkatan kerja perempuan	35 - 50 %	96,00%	35 - 50 %			
1.11.08	Program Peran Serta dalam Pelayanan KB, KS yang Mandiri	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dan tindakan kekerasan	100%	100%	100%			
1.11.09	Program Promosi Kesehatan Ibu & Anak	Rata-rata jumlah anak per keluarga	2 s/d 3 anak	2,8	2 s/d 3 anak			
1.11.10	Program RK - KHR	Rasio akseptor KB	87,11	82,63	87,11			
1.11.16	Program Penguatan Kelambagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Cakupan peserta KB aktif	87,11	90,10%	87,11			
1.11.20	Program Keluarga Berencana	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	20,93 %	20,39%	20,93 %			
1.11.26	Program Penguatan KKB							



Kode	Usuran/Bidang Usuran Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.11.27	Program Penyiapan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga (IMP) /Penyediaan dukungan operasional IMP							
1.11.28	Program Pembinaan Kemitraan dan Permodelan Bagi Kelompok UPPKS							
1.11.29	Program peningkatan Kualitas Hidup Perempuan							
1.13.	Sosial							
1.13.01	Program Pelayanan Administrasi Perekantoran	PMKS yg memperoleh bantuan sosial	50,25 %		50,25 %			Dinas Sosial
1.13.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	81,83 %		81,83 %			
1.13.03	Program peningkatan disiplin aparatur							
1.13.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							



Kode	Unsur/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.13.15	Program Pembudayaan Fakir-Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya							
1.13.16	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial							
1.13.17	Program pembinaan anak terlantar							
1.13.18	Program pembinaan pera penyandang cacat dan trauma							
1.13.19	Program pembinaan parti asuhan/ parti jompo							
1.13.20	Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)							
1.13.21	Program Pembudayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial							



Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkembangan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.13.22	Program Utama Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial							Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.13.23	Program Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Penanggulangan Bencana							
1.14.	Ketenagakerjaan							
1.14.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat partisipasi angkatan kerja	Meningkat	87,81	Meningkat			
1.14.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Tingkat pengangguran terbuka	3,75 %	1,04	3,75 %			
1.14.05	Program peningkatan kecapaian sumber daya aparatur	Rasio penduduk yang bekerja	86,07		86,07			
1.14.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Angka Pengangguran (Jawa)	3.680	2.571	3.680			
1.14.15	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rasio lulusan S1/S2/S3	2.585,48		2.585,48			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir-Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.14.16	Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Pengembangan Informasi Ketenagakerjaan	Rasio ketergantungan	33,45		33,45			
1.14.17	Program Perlindungan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan							
1.14.21	Program Pembinaan dan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industri dengan Serikat Pekerja							
1.14.23	Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja (BLK Mandiri)							
1.14.24	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (BLK Mandiri)							
1.15.	Koperasi dan Usaha Kecil Menengah							
1.15.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Persentase koperasi aktif	Meningkat	64,81%	Meningkat			Dinas Koperasi, UKM dan Ekonomi Kreatif



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.15.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah UKM non BPR/LKM UKM	Meningkat	5.454	Meningkat			
1.15.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah BPR/LKM	Meningkat		Meningkat			
1.15.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.15.17	Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah							
1.15.18	Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi							
1.15.21	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia UKM (Usaha Kecil Menengah)							
1.15.22	Program Peningkatan Sumber Daya Manusia Perkoperasian							



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.15.23	Program Pengembangan Jaringan Infrastruktur Usaha Kecil dan Menengah							
1.15.24	Program Pengembangan Sumber Daya Usaha Kecil Menengah (UKM) yang Mandiri							
1.15.25	Program Peningkatan Usaha dan Daya Saing Koperasi							
1.16.	Penanaman Modal Daerah							
1.16.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat		Meningkat			Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu & Penanaman Modal Daerah
1.16.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA)	Meningkat		Meningkat			
1.16.03	Program peningkatan disiplin aparatur							
1.16.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [trwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.16.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.16.15	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
1.16.16	Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi							
1.16.17	Program Penyisipan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah							
1.17.	Kebudayaan							Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
1.17.16	Program Pengelolaan Kekayaan Budaya	Penyelenggaraan festival seni dan budaya Sarana penyelenggaraan seni dan budaya Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan Jumlah gedung Kesenian	15 kali	6 kali	15 kali			
1.17.20	Peningkatan Budaya dan Destinasi Daerah		15 kali	4 Unit	15 kali			
1.17.21	Pelestarian dan Aktualisasi Adat Budaya Daerah		100%	100%	100%			
1.17.22	Evaluasi Pelaporan Keaneekaragaman Budaya		4		4			



Kode	Lulusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Analisis Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.17.23	Pengelolaan Data Kesenian dan Budaya Daerah							
1.17.25	Program Pengembangan Kekayaan Cagar Budaya							
1.17.26	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kekayaan Budaya dengan Masyarakat							
1.17.27	Membangun Kemitraan Pengelolaan Kebudayaan Antar Daerah							
1.18.	Pemuda dan Olah Raga							
1.18.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah organisasi pemuda	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting	38	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			Dinas Pemuda, Olahraga dan Parwisata
1.18.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah organisasi olahraga	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting	380	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			
1.18.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Jumlah kegiatan kepemudaan	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting	10	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			
1.18.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Jumlah kegiatan olahraga	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting	22	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.18.16	Kinerja dan Keuangan Program peningkatan peran serta kepemudaan	Gelanggong / bala remaja (selain milik swasta)	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting		Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dan Satuan Polisi Pamong Praja
1.18.20	Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga	Lapangan olahraga	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting		Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			
1.18.22	Program Pengembangan dan Pembinaan Organisasi Kepemudaan Pemuda dan Olahraga	Jumlah gedung olahraga	4		4			
1.18.24	Pemantauan Kegiatan Olahraga							
1.18.25	Program Pembinaan Olahraga Berbakat							
1.19.	Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri							
1.19.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting		Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			
1.19.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Kegiatan pembinaan politik daerah	Minimal sesuai dengan kondisi eksisting		Minimal sesuai dengan kondisi eksisting			
1.19.03	Program peningkatan disiplin aparatur							
1.19.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya							



Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	aparatur							
1.19.15	Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan							
1.19.16	Program pemeliharaan kontrantibmas dan pencegahan tindak kriminal							
1.19.17	Program pengembangan wawasan kebangsaan							
1.19.19	Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan							
1.19.27	Program Peningkatan Kewaspadaan Dini Masyarakat Daerah							
1.20.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian							



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPd Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPd Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.20.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	Meningkat	15	Meningkat			
1.20.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Jumlah Lemmas per Jumlah 10.000 Penduduk	Meningkat	855	Meningkat			
1.20.03	Program peningkatan disiplin aparatur	Rasio Pos Siskamling per jumlah desa/kelurahan	Naik minimal 10 % dari sebelumnya		Naik minimal 10 % dari sebelumnya			
1.20.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pertumbuhan ekonomi	Minimal 7 %		Minimal 7 %			
1.20.05	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kemiskinan	6,13 %		6,13 %			
1.20.07	Program Peningkatan Kapasitas Kelambagaan Pemerintahan Daerah	Sistem informasi Pelayanan Perijinan dan administrasi pemerintah	Ada		Ada			
1.20.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Penegakan PERDA	100%	85%	100%			
1.20.15	Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah	Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketertarikan, keindahan) di Kabupaten	100%		100%			



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akte Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.20.16	Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/ wakil kepala daerah	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	100%		100%			
1.20.17	Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	100%		100%			
1.20.18	Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/ kota	Sistem Informasi Manajemen Pemda	ada		ada			
1.20.20	Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH	Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat	Minimal 90 %	73,25%	Minimal 90 %			
1.20.21	Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemerkse dan aparatut pengawasan	Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita	7.836.415,01		7.836.415,01			
1.20.23	Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi	Jenis dan jumlah bank dan cabang	10		18			
1.20.24	Program Mengintensikan penanganan pengaduan masyarakat	Angka kriminalitas	Maksimal 6,50		Maksimal 6,50			



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.20.25	Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah	Lama proses penjinan	3 hari		3 hari			
1.20.26	Program Penataan Peraturan Perundang-undangan bidang pemerintahan umum	Jumlah dan macam pajak dan retribusi daerah	27 macam		27 macam			
1.20.27	Program Penataan Daerah Otonomi Baru							
1.20.28	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga Dalam Negeri							
1.20.29	Program Peningkatan Kerjasama dengan Lembaga dan atau Pemerintah Luar Negeri							
1.20.30	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
1.20.31	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan							
1.20.33	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.20.37	Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia							
1.20.38	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah							
1.20.39	Program Koordinasi, Sinkronisasi, Fasilitasi dan Evaluasi Bidang Perekonomian							
1.20.47	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur							
1.20.48	Program Peningkatan Pelayanan Ritual/Keagamaan							
1.20.49	Program Pengembangan Kediklatan							
1.20.50	Program Penelitian dan Pengembangan							
1.20.51	Penyusunan dan Pengumpulan Data/Informasi Kebutuhan Penyusunan Dokumen Perencanaan							
1.21.	Ketahanan Pangan							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.21.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Regulasi ketahanan pangan	ada	ada	ada			Badan Ketahanan Pangan
1.21.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Ketersediaan pangan utama	55.41	37.900 ton	55.41			
1.21.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
1.21.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.21.15	Program Peningkatan Kesejahteraan Petani							
1.21.21	Program Pengembangan Metode dan Teknologi Produksi Pangan							
1.21.30	Program Peningkatan Ketahanan Pangan							
1.22.	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							Bapemas
1.22.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Rata-rata jumlah kelompok binaan PKK	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	153	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting			
1.22.02	Program peningkatan sarana dan prasarana	PKK aktif	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	153	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Analisis Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	aparatur	Pozyandu aktif						
1.22.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur		Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting	298	Minimal Sesuai dg Kondisi Eksisting			
1.22.15	Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan							
1.22.17	Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa							
1.22.21	Program Penanggulangan Kemiskinan dan kerentanan							
1.22.22	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa							
1.24.	Kearsipan							
1.24.15	Program perbikan sistem administrasi kearsipan	Buku "Kabupaten dalam angka"	Ada		Ada			Balon Perpustakaan dan Arsip Daerah
		Buku "PDRB kabupaten"	Ada		Ada			
1.26.	Perpustakaan							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.26.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Jumlah perpustakaan	Minimal 1/ Kecamatan		Minimal 1/ Kecamatan			Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah
1.26.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Jumlah pengunjung perpustakaan per tahun	Meningkat		Meningkat			
1.26.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	Meningkat		Meningkat			
1.26.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
1.26.07	Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan							
2.	Urusan Pilihan							
2.01.	Pertanian							
2.01.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya per hektar produksi padi [tan]	60 kw/ha/tahun		60 kw/ha/tahun			Dinas Pertanian, Dinas Perkebunan
2.01.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur		55.41		55.41			



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RP,MD Tahun 2015 (Akhir Periode RP,MD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RP,MD Sertipis Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (trwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.01.03	Program peningkatan disiplin aparat	Kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB	7,39 %		7,39 %			
2.01.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparat	Kontribusi sektor pertanian (palawija) terhadap PDRB	1,43 %		1,43 %			
2.01.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Kontribusi sektor perkebunan (tanaman keras) terhadap PDRB	2,40 %		2,40 %			
2.01.16	Program Peningkatan Ketahanan Pangan pertanian/perkebunan	Cakupan bina kelompok petani	100%		100%			
2.01.17	Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan	Rata-rata Pendapatan Petani per Tahun per Kapita	12-20 juta		12-20 juta			
2.01.18	Program peningkatan penerapan teknologi pertanian/perkebunan							
2.01.19	Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan							
2.01.20	Program pemberdayaan penyuluh pertanian/perkebunan lapangan							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPd Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.01.21	Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak							
2.01.22	Program peningkatan produksi hasil peternakan							
2.01.23	Program peningkatan pemasaran hasil produksi peternakan							
2.01.24	Program peningkatan penerapan teknologi peternakan							
2.01.28	Program Pengembangan Agribisnis Perkebunan							
2.01.31	Program Peningkatan Perlindungan Tanaman							
2.01.32	Program Peningkatan Pemanfaatan Potensi Lahan							
2.01.33	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia							
2.01.34	Pengembangan Informasi Data Statistik dan Sistem Pelaporan Perkebunan							
2.02.	Kehutanan							
2.02.01	Program Pelayanan	Rehabilitasi hutan dan	50%		50%			Dinas Kehutanan



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Ususan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kegiatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keuaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [triwulan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Administrasi Perkantoran	lahan kritis						
2.02.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Kerusakan Kawasan Hutan	10%		10%			
2.02.15	Program Pemanfaatan Potensi Sumber Daya Hutan	Kontribusi sektor kehutanan terhadap PDRB	1,81 %		1,81 %			
2.02.16	Program rehabilitasi hutan dan lahan							
2.02.17	Perlindungan dan konservasi sumber daya hutan							
2.02.21	Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Hutan							
2.02.22	Program Pengembangan dan Evaluasi Hutan							
2.03.	Energi dan Sumberdaya Mineral							
2.03.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Pertambangan tanpa ijin	0%		0%			
2.03.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Kontribusi sektor pertambangan terhadap PDRB	73,89 %		73,89 %			Dinas Pertambangan dan Energi
2.03.05	Program peningkatan							



Kode	Lusuan/Bidang Lusuan Pemerintahan Doerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program [outcome]/Kejatan [output]	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 [Akhir Periode RPJMD]	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 [rwutan I]	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	kapasitas sumber daya operator							
2.03.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
2.03.15	Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan							
2.03.17	Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan							
2.03.19	Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Migas							
2.03.20	Pengembangan Geologi dan Sumberdaya Mineral KKT							
2.03.21	Sinkronisasi Pajak Air Bawah Tanah dan Air Permukaan							
2.03.22	Program Peningkatan Diversifikasi Bahan Bakar							
2.03.23	Program Evaluasi Cadangan Batubara Kabupaten Kutai Timur							



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.03.24	Program Penyusunan Peta Pertambangan dan Energi Kabupaten Kutai Timur							
2.04.	Pariwisata							
2.04.15	Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Kunjungan wisata	27.251		27.251			Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
2.04.16	Program Pengembangan Destinasi Pariwisata	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	73,89 %		73,89 %			
2.04.17	Program Pengembangan Kemitraan							
2.05.	Kelautan dan Perikanan							
2.05.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Produksi perikanan	100%		100%			Dinas Kelautan dan Perikanan
2.05.02	Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Konsumsi ikan	47,20 %		47,20 %			
2.05.05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Cakupan bina kelompok nelayan	85%		85%			
2.05.06	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian	Produksi perikanan kelompok nelayan	85,02 %		85,02 %			



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Kinerja dan Keuangan							
2.05.07	Program Peningkatan Kerjasama							
2.05.08	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik							
2.05.15	Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir							
2.05.16	Program pemberdayaan masyarakat dalam pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan							
2.05.17	Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut							
2.05.19	Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.05.20	Program pengembangan budaya perikanan							
2.05.21	Program Pengembangan Perikanan Tangkap							
2.05.22	Program pengembangan sistem Penyuluban perikanan							
2.05.23	Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan							
2.05.24	Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar							
2.05.25	Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Perikanan							
2.05.27	Program Identifikasi Ijin Usaha Perikanan Bidang Usaha Tangkap, Budidaya, dan Pengolahan Hasil Perikanan							
2.05.xx	Program Pengelolaan Wilayah pesisir dan							



Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]
2.06.	pulau-pulau kecil Perdagangan							
2.06.09	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Kontribusi sektor Perdagangan terhadap PDRB	8,44 %		8,44 %			Dinas Perindustrian dan perdagangan
2.06.18	Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri	Ekspor Bersih Perdagangan (ribu USD)	7.114.992,00		7.114.992,00			
2.06.21	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
2.07.	Industri							
2.07.01	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Kontribusi sektor Industri terhadap PDRB	0,39 %		0,39 %			Dinas Perindustrian dan Perdagangan
2.07.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Perumbuhan Industri	Minimal 1		Minimal 1			
2.07.03	Program Peningkatan Disiplin Aparatur							
2.07.05	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							



Bab 2 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RKPD Tahun Lalu
Dan Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan

Kode	Ususan/Bidang Ususan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Capaian Kinerja RPJMD Tahun 2015 (Akhir Periode RPJMD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program Dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2015	Target Program/Kegiatan RKPD Tahun 2016	Perkiraan Realisasi Capaian Target RPJMD Sampai Dengan Tahun 2016		SKPD Penanggung Jawab
						Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2016 (triwulan I)	Tingkat Capaian Realisasi Target s/d Tahun 2016	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2.07.16	Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah							
2.07.17	Program Peningkatan Kemampuan Teknologi Industri							
2.07.23	Program Perlindungan Konsumen dan Pengamanan Perdagangan							
2.07.28	Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
2.08.	Ketransmigrasian							
2.08.18	Program Pembukaan, Pengembangan dan Pemberdayaan Wilayah Transmigrasi							Disas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



BAB III PERUBAHAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH

Kerangka Ekonomi Makro Daerah menggambarkan kondisi dan analisis statistik Perekonomian Daerah, sebagai gambaran umum untuk situasi perekonomian Kutai Timur tahun 2015 beserta karakteristiknya serta prospek perekonomian tahun 2016. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah memberi gambaran tentang perkembangan ekonomi makro hingga semester satu tahun 2016, dan estimasi hingga akhir tahun 2016, arah kebijakan ekonomi dan keuangan daerah, sasaran-sasaran yang akan dicapai pada tahun 2016, serta kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan. Sasaran-sasaran yang dimaksud tersebut akan dicapai melalui berbagai kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan prioritas yang telah digariskan.

Aspek penting yang menentukan keberhasilan pembangunan daerah terdapat dua hal yaitu *pertama* kualitas perencanaan pembangunan daerah dan *kedua* adanya daya dukung keuangan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dengan kondisi keuangan daerah bagaikan dua sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Perencanaan yang baik, tanpa didukung oleh kekuatan anggaran atau keuangan daerah yang memadai akan menemui banyak kesulitan, demikian sebaliknya. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah.

Secara umum kerangka ekonomi makro daerah mencerminkan kondisi dinamis perekonomian daerah sekaligus merupakan gambaran umum perekonomian Kabupaten Kutai Timur tahun 2016. Kondisi tersebut juga menggambarkan prospek perekonomian tahun berjalan 2016. Kerangka ekonomi makro dan kebijakan keuangan daerah juga berisikan tentang dinamika ekonomi makro hingga semester satu tahun 2016, sekaligus kebutuhan pembiayaan pembangunan yang diperlukan.

Pembiayaan pembangunan terkait dengan kapasitas fiskal daerah maupun peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam rangka mengimplementasikan perencanaan pembangunan daerah. Kapasitas fiskal daerah sangat dipengaruhi oleh



kondisi dan dinamika ekonomi nasional maupun regional sebagai pijakan untuk merumuskan kebijakan keuangan daerah. Dalam hal ini penyusunan perencanaan pembangunan daerah perlu memperhatikan kapasitas fiskal yang tersedia. Sehingga, dalam penerapannya, konsekuensi atas integrasi kegiatan perencanaan dan penganggaran perlu diperhatikan. Dengan kata lain bahwa kualitas perencanaan pembangunan daerah dan daya dukung keuangan daerah secara bersama-sama akan menentukan kualitas pembangunan daerah.

3.1 Perubahan Kerangka Ekonomi Daerah

3.1.1 Perkembangan Perekonomian Global dan Nasional

Perbaikan ekonomi global yang melambat tetap berlanjut, seiring dengan peningkatan gejolak pasar keuangan. Pelemahan aktivitas perekonomian negara-negara maju akhir tahun 2015 dan tekanan di beberapa negara berkembang belum menunjukkan tanda akan mereda. Selain itu, faktor-faktor lain seperti *rebalancing* secara bertahap perekonomian Tiongkok, tanda-tanda pelemahan ekonomi di beberapa negara berkembang besar lainnya, dan penurunan harga komoditas energi juga mempengaruhi kinerja ekonomi akhir tahun 2015. Pada awal tahun 2016, kekhawatiran akan risiko tinggi dan terbatasnya ruang kebijakan menyebabkan penilaian aset dan harga minyak menurun tajam. Namun demikian, sentimen pasar mulai membaik pada pertengahan bulan Februari 2016 dan perbaikan secara keseluruhan pada bulan Maret 2016. Sementara itu, harga minyak mentah turun mencapai 32,0 persen sepanjang bulan Agustus 2015 hingga Februari 2016. Kondisi ini dipengaruhi oleh pasokan minyak yang cukup kuat dari negara-negara OPEC dan Rusia. Selain itu, kemungkinan pasokan lebih tinggi dari Iran, penguatan permintaan global, dan perkiraan pertumbuhan ekonomi jangka menengah global juga mempengaruhi harga minyak. Pergerakan harga komoditas batu bara dan gas alam sejalan dengan harga minyak mentah, termasuk indeks harga kontrak minyak. Pelemahan harga komoditas nonminyak seperti metal dan komoditas pertanian turun sebesar 9,0 persen dan 4,0 persen. Kelebihan pasokan minyak mendorong persediaan OECD mencapai level cukup tinggi, meskipun permintaan minyak cukup kuat dan harga jauh lebih rendah pada tahun 2015. Pada bulan Maret 2016, perubahan harga minyak secara umum seiring pemulihan sentimen pasar keuangan (Bappenas, 2016).



Berdasarkan penjelasan Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun 2016 bahwa perekonomian global yang melemah sepanjang tahun 2015 dan berlanjut hingga triwulan I tahun 2016 memiliki dampak yang cukup signifikan terhadap kinerja perekonomian domestik. Hal ini terlihat pada perkembangan realisasi asumsi dasar ekonomi makro terutama pada harga minyak mentah Indonesia dan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang masih jauh bila dibandingkan dengan asumsi yang ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Meskipun demikian, Pemerintah berhasil menjaga pertumbuhan ekonomi domestik sampai dengan triwulan I tahun 2016 di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi global dan mempertahankan tingkat inflasi dalam kondisi stabil. Penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016 secara keseluruhan. Pendapatan negara khususnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas diperkirakan mengalami penurunan. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan target penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga memengaruhi penurunan proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016.

Berdasarkan perkembangan kondisi perekonomian global dan domestik terkini, serta berbagai tantangan perekonomian yang dihadapi, Pemerintah mengajukan perubahan terhadap asumsi dasar ekonomi makro yang telah ditetapkan dalam APBN tahun 2016. Asumsi dasar ekonomi makro yang diusulkan dalam RAPBNP tahun 2016 sebagai berikut:

- Laju inflasi sepanjang tahun 2016 diperkirakan sebesar 4,0 persen, lebih rendah dibandingkan asumsi dalam APBN tahun 2016 yang ditetapkan sebesar 4,7 persen. Besaran inflasi sepanjang tahun 2016 akan terpengaruh oleh perkembangan ekonomi global dan tren pelemahan harga komoditas terutama energi. Sementara dari sisi domestik, stabilitas inflasi akan didukung oleh sinergi kebijakan Pemerintah dan Bank Indonesia (BI) dalam menjaga harga kebutuhan pokok masyarakat. Beberapa faktor positif terutama penurunan suku bunga acuan Bank Indonesia, perbaikan kinerja transaksi berjalan, inflasi yang rendah, serta membaiknya perekonomian diharapkan mampu menjaga stabilisasi dan meredam depresiasi nilai tukar rupiah.



- Dengan mempertimbangkan kondisi terkini dengan berbagai kebijakan yang dikeluarkan, maka nilai tukar rupiah terhadap dolar AS diperkirakan bergerak pada kisaran Rp13.500 per dolar AS, menguat dibandingkan asumsinya dalam APBN tahun 2016 sebesar Rp13.900 per dolar AS.
- Tren penurunan harga minyak mentah dunia diperkirakan memengaruhi kinerja industri hulu migas Indonesia. ICP diproyeksikan berada pada kisaran US\$35 per barel lebih rendah dibandingkan dengan asumsi dalam APBN tahun 2016 sebesar US\$50 per barel. Perubahan tersebut antara lain disebabkan masih lemahnya perekonomian global, di tengah pasokan minyak yang masih tinggi.
- *Lifting* minyak dan gas bumi pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 1.925 ribu barel setara minyak per hari, yang meliputi *lifting* minyak bumi sebesar 810 ribu barel per hari dan *lifting* gas bumi sebesar 1.115 ribu barel setara minyak per hari. Tren penurunan produksi minyak berpengaruh pada *lifting* gas bumi.

3.1.2 Kondisi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

Dampak melemahnya perekonomian dunia, tren penurunan harga komoditas global dan menurunnya volume perdagangan dunia mulai dirasakan berbagai negara. Tak terkecuali Indonesia dan Provinsi Kalimantan Timur yang masih mengandalkan permintaan eksternal (*tradable*) turut terkena imbasnya. Kinerja sektor riil terutama di sektor pertambangan, perkebunan dan industri pengolahan mulai terkena dampaknya. Struktur perekonomian Kalimantan Timur yang didominasi sektor pertambangan (43,1 persen) dan sektor industri pengolahan (19,4 persen) dengan orientasi ekspor sangat terpengaruh dari melambatnya perekonomian global. Selanjutnya, kinerja sektor utama tersebut pada akhirnya mempengaruhi kondisi sosial ekonomi daerah, terutama kondisi ketenagakerjaan dan ketersediaan lapangan kerja.

Ekonomi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara (Kaltimra) triwulan II 2016 masih berada dalam fase kontraksi terutama disebabkan oleh masih lemahnya kinerja pertambangan dan tren harga komoditas internasional yang masih menurun (BI, Agustus 2016). Berdasarkan Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi Kalimantan Timur tahun 2016 menyebutkan Laju pertumbuhan ekonomi Kaltimra



triwulan II 2016 berkontraksi lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Pada triwulan II 2016, pertumbuhan tahunan ekonomi Kaltimra berkontraksi -0,9% (yoy), lebih dalam dibandingkan triwulan I 2016 yang berkontraksi -0,7% (yoy). Capaian pertumbuhan ekonomi Kaltimra triwulan II 2016 jauh lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi nasional yang tumbuh sebesar 5,2% (yoy). Namun demikian, secara triwulanan kinerja ekonomi Kaltimra triwulan II 2016 sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya. Dibandingkan dengan triwulan I 2016 yang berkontraksi -3,5% (qta), ekonomi Kaltimra triwulan II 2016 tumbuh 0,3% (qta). Berdasarkan lapangan usaha, sektor pertambangan tetap menjadi penyebab utama turunnya kinerja perekonomian Kaltimra triwulan II 2016. Rendahnya permintaan global terhadap komoditas ekspor utama dan tren penurunan harga komoditas internasional yang masih berlanjut, memberi dampak signifikan terhadap kinerja sektor pertambangan.

Jika dilihat dari perkembangan keuangan daerah Provinsi Kalimantan Timur, Penurunan APBD Pemprov Kaltim tahun 2016 menyebabkan ruang fiskal pemerintah daerah menjadi lebih sempit. APBD Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim tahun 2016 ditetapkan sedikit lebih rendah jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Anggaran pendapatan tahun 2016 turun -1,9%, dari Rp 10,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 10,3 triliun pada tahun 2016. Sementara itu pagu belanja tahun 2016 juga mengalami penurunan sebesar -3,4%, dari semula Rp 11,5 triliun pada tahun 2015 menjadi Rp 11,1 triliun pada tahun 2016. Realisasi pendapatan APBD Pemprov Kaltim secara kumulatif sampai dengan triwulan II 2016 lebih rendah dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Sedangkan realisasi belanja Pemprov Kaltim hingga triwulan II 2016 lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Sementara itu, perkembangan inflasi Kaltim triwulan II 2016 terkendali pada level yang lebih rendah. Inflasi Kaltim pada triwulan II 2016 tercatat 4,37% (yoy), turun dibandingkan triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy) namun lebih tinggi dibandingkan inflasi nasional yang tercatat 3,45% (yoy). Di wilayah Kalimantan, inflasi Kaltim menempati urutan ketiga setelah inflasi Kalimantan Selatan sebesar 5,88% (yoy) dan inflasi Kalimantan Barat sebesar 5,25% (yoy).

Terbatasnya pertumbuhan ekonomi global dan perbaikan harga komoditas internasional yang berjalan lambat, diperkirakan masih menjadi tekanan bagi



pemulihan ekonomi Kalimantan Timur-Utara [Kaltimra] tahun 2016 (BI, Agustus 2016). Berdasarkan analisis Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Kalimantan Timur, Ekonomi Kaltimra triwulan IV 2016 diperkirakan masih akan berkontraksi, lebih dalam dibandingkan triwulan sebelumnya. Dari sisi pengeluaran, kinerja ekspor luar negeri Kaltimra diperkirakan masih akan berkontraksi, walaupun tidak sedalam triwulan sebelumnya. Perbaikan kinerja ekspor luar negeri Kaltimra sejalan dengan mulai membaiknya kinerja sektor pertambangan. Konsumsi RT diperkirakan akan terus menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi triwulan IV 2016. Namun demikian, hasil Survei Konsumen KPw BI Provinsi Kaltim mengindikasikan adanya penurunan optimisme masyarakat terhadap ekspektasi kondisi ekonomi ke depan. Sementara itu, kebijakan pemotongan anggaran oleh pemerintah pusat diperkirakan akan berdampak pada terbatasnya kinerja konsumsi pemerintah Kaltimra. Padahal konsumsi pemerintah diharapkan mampu memberi *multiplier effect* terhadap aktivitas perekonomian Kaltimra triwulan IV 2016.

Berdasarkan lapangan usahanya, perbaikan ekonomi Kaltimra pada triwulan IV 2016 diperkirakan didorong oleh sektor pertanian dan sektor ekonomi tersier. Sektor ekonomi pertanian yang didominasi oleh subsektor perkebunan diyakini mampu menjadi salah satu pendorong pertumbuhan ekonomi Kaltimra triwulan IV 2016. Peningkatan permintaan dari beberapa pabrik CPO baru yang mulai beroperasi pada pertengahan tahun dan peningkatan tren harga Tandan Buah Segar [TBS Sawit] diperkirakan akan mendorong pertumbuhan sektor ini. Sementara itu, perbaikan kinerja sektor pertambangan yang diiringi dengan meningkatnya harga batubara internasional diperkirakan masih terus berlanjut walaupun tidak setinggi tahun sebelumnya. Dari berbagai kondisi tersebut di atas, pertumbuhan ekonomi Kaltimra pada triwulan IV 2016 diperkirakan tumbuh -1,3% s.d. -0,9% (yoy), dengan kecenderungan bias atas.

Berdasarkan lapangan usahanya, sektor industri pengolahan diperkirakan dapat tumbuh lebih tinggi dibandingkan triwulan sebelumnya. Kinerja positif industri pengolahan Kaltimra diperkirakan didorong oleh meningkatnya industri nonmigas, terutama CPO. Beroperasinya sejumlah pabrik CPO baru di Kaltimra yang menambah kapasitas produksi CPO di Kaltimra diperkirakan akan memberikan andil yang tinggi bagi perbaikan ekonomi Kaltimra. Dalam dua tahun kedepan, terdapat 20 pabrik lagi yang akan beroperasi dengan kapasitas pengolahan sebesar 885



ton/hari. Penambahan kapasitas produksi CPO Kaltimra tahun 2016 diperkirakan mencapai 30% dari kapasitas produksi yang ada saat ini. Lebih lanjut, pemulihan harga TBS dan CPO diyakini mampu mendorong kinerja industri nonmigas di Kaltimra. Namun demikian, pelemahan kinerja industri migas menjadi tantangan bagi kemajuan industri pengolahan Kaltim. Rendahnya input industri migas yang disebabkan oleh *natural declining* masih menjadi kendala utama bagi sektor ini. Di sisi lain, sektor pertambangan diperkirakan masih mengalami kontraksi pada tahun 2016. Menyikapi penurunan kinerja sektor pertambangan tahun 2015, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menurunkan target produksi batubara nasional tahun 2016 dari 425 juta ton pada tahun 2015 menjadi 419 juta ton di tahun 2016. Berdasarkan asesmen di atas, maka pertumbuhan ekonomi Kaltimra pada tahun 2016 diperkirakan masih terkontraksi. Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Timur untuk keseluruhan tahun 2016 diperkirakan pada kisaran -1,3% s.d -0,9% (yoy) (BI, 2016).

3.1.3 Perekonomian Kabupaten Kutai Timur

Perkembangan capaian indikator kinerja utama Kabupaten Kutai Timur tahun 2011-2015 (Tabel 3.1) menggambarkan kondisi Kabupaten Kutai Timur secara umum ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, pembangunan manusia, pengangguran terbuka, dan PDRB per kapita.

Tabel 3. 1
Perkembangan Capaian Indikator Kinerja Utama
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015

No	Indikator Kinerja	Capaian				
		2011	2012	2013	2014	2015
1	Pertumbuhan Ekonomi (%)	17,58	11,54	4,10	3,55	3,71
2	Persentase Angka Kemiskinan (%)	8,37	6,12	9,06	8,86	8,67
3	Indeks Pembangunan Manusia *	74,87	68,71	69,79	70,39	70,82
4	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	4,95	3,90	3,11	1,28	1,04
5	PDRB Perkapita [juta rupiah]	258,09	275,40	274,41	272,30	270,86

Sumber: - Profil Kabupaten Kutai Timur 2015

Keterangan:

*] Angka Penghitungan dengan menggunakan metode Baru BPS Prov. Kalimantan Timur

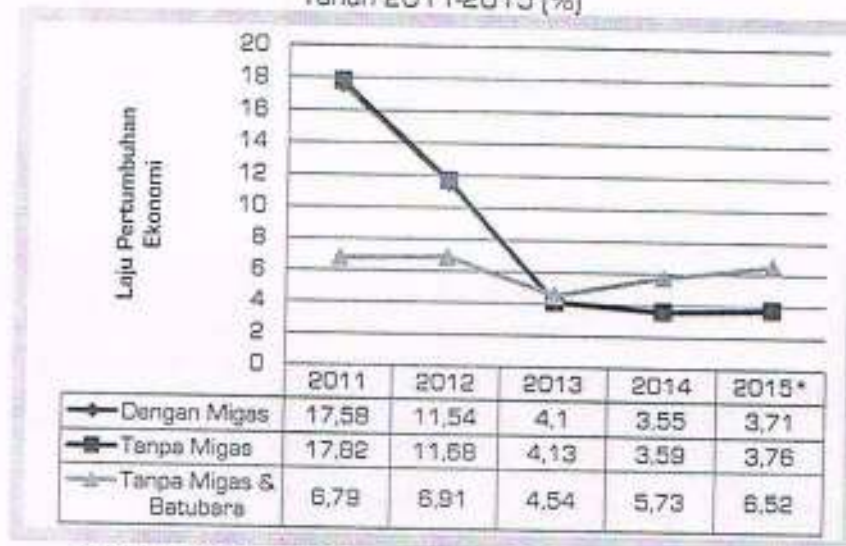
Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur sangat dipengaruhi oleh kegiatan dan komoditi pertambangan khususnya batubara (sub sektor pertambangan non migas) yang kontribusinya rata-rata 2011-2015 mencapai rata-rata 83,76 persen dari keseluruhan PDRB. Komoditi batubara menjadi andalan kabupaten ini karena produksi dari kegiatan di sub sektor tersebut sebagian besar



diekspor ke luar negeri, sehingga menempatkan Kabupaten Kutai Timur sebagai salah satu andalan Provinsi Kalimantan Timur dalam mengekspor komoditi non migas khususnya batubara.

Perkembangan pertumbuhan ekonomi tahun 2011 hingga tahun 2015 dapat dilihat pada Gambar 3.1 di bawah ini:

Gambar 3.1
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Kutai Timur
Tahun 2011-2015 (%)



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur 2016

Sehubungan dengan turunnya harga dan produksi batubara berakibat pada penurunan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Kutai Timur di tahun 2013 secara drastis dibanding tahun 2012. Hal ini memperkuat indikasi tingkat ketergantungan yang tinggi pada migas dan batubara. Pada tahun 2014 pertumbuhan ekonomi dengan migas melambat kembali menjadi sebesar 3,55 persen. Kemudian pada tahun 2015 sedikit menguat menjadi sebesar 3,71 persen dibanding tahun 2014. Melambatnya pertumbuhan ekonomi dalam 3 tahun terakhir disebabkan pemulihan ekonomi global yang berjalan lambat dan turunnya harga komoditas internasional berdampak signifikan terhadap kinerja sektor ini, khususnya pertambangan nonmigas (batubara). Dominasi sektor pertambangan dalam perekonomian Kaltim mengakibatkan *multiplier effect* terhadap kinerja sektor-sektor ekonomi lainnya.

Perkembangan kemiskinan Kabupaten Kutai Timur tahun 2011 hingga tahun 2015 mengalami fluktuasi. Pada tahun 2011 sebanyak 27.432 jiwa (6,37 persen), mengalami penurunan menjadi sebesar 24.295 jiwa (6,12 persen). Namun pada



tahun 2013-2015 justru mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin secara berturut-turut sebesar 27.200 jiwa (9,06 persen), 27.610 (8,86 persen) dan 27.763 jiwa (8,67 persen).

Sementara itu, IPM Kabupaten Kutai Timur tahun 2014-2015 berdasarkan angka perhitungan metode baru dari BPS Provinsi Kalimantan Timur menunjukkan terjadinya peningkatan. Pada Tahun 2014 sebesar 70,39 menjadi sebesar 70,82 tahun 2015 berdasarkan perhitungan sementara. Terjadi peningkatan sebesar 0,43 poin, hal ini menunjukkan kinerja perekonomian Kabupaten Kutai Timur yang positif. Apabila dilihat perkembangan komposisi IPM meliputi AHH, pengeluaran per kapita mengalami peningkatan. Sedangkan harapan lama sekolah tetap.

Sedangkan perkembangan kinerja Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yakni persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja menunjukkan kinerja yang cukup baik pada tahun 2011 hingga tahun 2015. Secara berurutan sebesar 4,95 persen, 3,90 persen, 3,11 persen, 1,28 persen, dan 1,04 persen. Hal ini menunjukkan meskipun kinerja perekonomian global yang masih belum stabil yang tentunya akan berdampak bagi pembangunan di Kabupaten Kutai Timur terutama dari angkatan kerja sektor pertambangan, tidak berdampak signifikan terhadap Kabupaten Kutai Timur. Namun demikian, bukan berarti Kabupaten Kutai Timur aman dari dampak perekonomian global terutama sektor pertambangan batubara. Sehingga Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tetaplah harus mewaspadaikan dan mengantisipasi dampak-dampak yang mungkin akan terjadi.

Perkembangan PDRB per kapita yakni nilai PDRB yang dibagi jumlah penduduk dalam suatu wilayah per periode tertentu menunjukkan kinerja yang positif. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai PDRB per kepala atau per satu orang penduduk. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan berguna untuk mengetahui pertumbuhan nyata ekonomi per kapita penduduk suatu wilayah.

Pada tahun 2011-2015 berdasarkan PDRB per kapita atas dasar harga berlaku menunjukkan adanya perkembangan yang fluktuatif. Tahun 2012 mengalami peningkatan dari tahun 2011. Namun tahun 2013 hingga tahun 2015 mengalami penurunan. Secara berurutan pada tahun 2011-2015 adalah sebesar 258,09 juta, 275,40 juta, 274,41 juta, 272,30 juta dan 270,86 juta.



3.2 Perubahan Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Pembangunan nasional yang bersifat inklusif, melalui otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, mengutamakan pembangunan berdimensi kewilayahan dengan daerah sebagai pusat pertumbuhan. Adanya kejelasan dimensi kewilayahan, sistem pendanaan penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan dengan lebih efisien, efektif dan tidak menimbulkan tumpang tindih ataupun tidak tersedianya pendanaan pada suatu bidang pemerintahan. Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat didanai dari APBN, sedangkan urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintah daerah didanai dari APBD.

Kebijakan desentralisasi dipersiapkan menuju diberlakukannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang tersebut memfokuskan efektivitas pemerintahan dengan mengklasifikasikan urusan pemerintahan. Sebagaimana tercantum pada pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tersebut, klasifikasi urusan pemerintahan dibagi menjadi tiga, yaitu [1] urusan pemerintahan absolut yang sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat, [2] urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah, [3] urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan.

Kebijakan desentralisasi fiskal erat kaitannya dengan pelayanan publik. Desentralisasi fiskal akan terlaksana dengan baik bila didukung oleh: a) pemerintah yang mampu melakukan pengawasan dan *law enforcement*; b) adanya sumber daya manusia yang kuat pada jajaran aparatur pemerintah daerah; c) serta adanya keseimbangan dan kejelasan dalam hal pembagian kewenangan dan tanggung jawab untuk melakukan pungutan pajak dan retribusi daerah dalam rangka meningkatkan PAD. Oleh karena itu, peranan pemerintah daerah dalam fungsi alokasi menjadi semakin besar terutama untuk merencanakan dan melaksanakan kebijakan di daerah, sehingga tujuan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dapat tercapai. Berkaitan dengan hal tersebut, maka upaya untuk membangun kebijakan yang lebih mempertimbangkan kepentingan publik dirasakan semakin penting. Dengan demikian, penciptaan lingkungan yang kondusif perlu dibangun, antara lain melalui kepastian peraturan, transparansi pelaksanaan aturan, kecepatan pemberian



layanan, kemudahan dan kesederhanaan proses memperoleh layanan publik, sinergitas pembangunan kebijakan antara pusat dan daerah maupun antar daerah.

3.2.1 Perubahan Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Nota Keuangan APBNP Tahun 2016, perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran hingga melebihi ambang batas. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3,0 persen dari produk domestik bruto. Berangkat dari perkembangan perekonomian tersebut, Pemerintah melakukan konsolidasi fiskal baik dalam pendapatan negara, belanja negara, maupun pembiayaan anggaran. Perubahan kebijakan fiskal terutama ditempuh melalui: (1) perubahan kebijakan pada bidang pendapatan negara terutama dilakukan dengan kebijakan *tax amnesty/voluntary disclosure* dalam rangka optimalisasi penerimaan perpajakan dan penguatan *tax base* perpajakan di Indonesia; (2) penghematan dan pemotongan belanja kementerian negara/ lembaga yang kurang produktif; (3) rasionalisasi anggaran pada Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Khusus (DAK); (4) kebijakan perubahan besaran *fixed* subsidi; (5) peningkatan dana tambahan infrastruktur dalam rangka Otonomi Khusus Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat; dan (6) peningkatan pengeluaran pembiayaan yang mendukung program pembangunan infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat.

Selain itu, terkait dengan pelaksanaan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016, pemerintah telah melakukan review menyeluruh terhadap rencana pendapatan negara, belanja negara, dan pembiayaan. Berdasarkan review tersebut, diperkirakan rencana penerimaan negara, terutama dari pajak, tidak dapat dicapai. Oleh karena itu, perlu dilakukan pengendalian belanja negara, baik belanja kementerian/ lembaga maupun penghematan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD).

Terkait dengan penghematan tersebut di atas, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan memberikan penjelasan bahwa penghematan TKDD dilakukan secara hati-hati dan selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat dan pembangunan infrastruktur yang diperlukan untuk menstimulasi perekonomian daerah. Penghematan TKDD tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp72,9 Triliun, yang



bersumber dari: (1) penghematan alamiah sebesar Rp36,8 Triliun dan (2) penundaan sebagian penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp19,4 Triliun dan Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp16,7 Triliun. Selain itu, efisiensi TKDD berasal dari penghematan alamiah dari perkiraan sisa pagu DBH Pajak sebesar Rp4,2 Triliun, akibat turunnya perkiraan penerimaan pajak yang harus diikuti dengan penurunan DBH Pajak, karena DBH disalurkan berdasarkan realisasi penerimaan negara. Penghematan juga berasal dari DAK Fisik sebesar Rp6,0 Triliun karena diperkirakan ada beberapa daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran DAK Fisik yang berbasis kinerja penyerapan. DAK Nonfisik pun mengalami penghematan sebesar Rp23,8 Triliun, yang berasal dari (i) Dana Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebesar Rp23,4 Triliun, akibat berkurangnya jumlah guru yang bersertifikasi dari 1.300.758 orang menjadi 1.221.947 orang karena pensiun, mutasi menjadi pejabat struktural, dan meninggal, serta adanya sisa Dana TPG tahun-tahun sebelumnya di kas daerah sebesar Rp 19,6 Triliun, yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran TPG kepada guru tahun 2016, dan (ii) Dana Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil) PNSD sebesar Rp209 Miliar, karena adanya sisa dana tahun-tahun sebelumnya di kas daerah yang sudah dapat digunakan untuk memenuhi sebagian kebutuhan pembayaran Dana Tambahan Penghasilan kepada guru tahun 2016. Sementara itu, Dana Desa mengalami penghematan sebesar Rp2,8 Triliun karena diperkirakan ada beberapa daerah yang tidak mampu memenuhi persyaratan penyaluran Dana Desa dilakukan berdasarkan realisasi penyaluran dari kabupaten/kota ke desa dan kinerja penyerapan Dana Desa di desa (www.djpk.depkeu.go.id).

Selain itu, Penundaan penyaluran sebagian DAU dan/atau DBH dilakukan dengan mempertimbangkan kapasitas fiskal daerah berupa perkiraan pendapatan dan belanja daerah, termasuk belanja pegawai dan belanja modal dan posisi saldo kas pada akhir tahun 2016. Penundaan penyaluran dilakukan terhadap DAU bulan September, Oktober, November, dan Desember 2016 bagi 169 daerah yang mempunyai kategori perkiraan posisi saldo kas akhir tahun 2016 dan besaran penundaan DAU sebagai berikut. Kategori-kategori tersebut antara lain "Sangat Tinggi" ditunda 50%, "Tinggi" ditunda 40%, "Cukup Tinggi" ditunda 30%, serta "Sedang" ditunda 20%. Dengan pertimbangan tersebut, DAU yang diterima oleh daerah setelah dikurangi penundaan penyaluran masih lebih besar dibandingkan dengan kebutuhan belanja gaji PNSD, kecuali untuk 5 daerah yang mendapatkan



alokasi DAU yang relatif kecil karena mempunyai DBH dan PAD yang relatif besar. Penundaan penyaluran juga dilakukan terhadap DBH Triwulan IV 2016 yang dilakukan pada daerah dengan berdasarkan prognosis realisasi penerimaan negara tahun 2016. Dengan penundaan tersebut, pendapatan daerah sampai akhir tahun 2016 memang akan berkurang, tetapi dengan memperhatikan saldo kas pada akhir Juli 2016, perkiraan pendapatan yang akan diterima daerah dari PAD dan sebagian DAU dan DBH sampai akhir tahun 2016, maka daerah-daerah yang ditunda penyaluran sebagian DAU dan DBH-nya masih dapat mendanai belanja operasional dan belanja modal termasuk belanja infrastruktur publik sampai akhir tahun 2016 (www.djpk.depkeu.go.id).

Dengan demikian, kebijakan fiskal pemerintah dengan terbitnya beberapa peraturan-peraturan dalam pelaksanaan APBN Perubahan Tahun Anggaran 2016 tersebut akan berdampak cukup signifikan pada struktur anggaran pendapatan daerah termasuk Kabupaten Kutai Timur khususnya dana perimbangan yang meliputi dana bagi hasil pajak/bukan pajak, DAU dan DAK. Proporsi dana perimbangan yang cukup besar dari struktur APBD (Pendapatan Daerah) Kabupaten Kutai Timur masih menunjukkan ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Seiring dengan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) semester pertama tahun 2016 serta perkembangan perubahan pendapatan daerah pada tahun berjalan ini, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur harus melakukan penyesuaian kebijakan Pendapatan Daerah.

3.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah diakui belum memadai dan memiliki peranan yang relatif kecil terhadap APBD khususnya bagi daerah kabupaten. Sebagian besar pengeluaran APBD dibiayai dana alokasi dari pusat. Namun dana alokasi pusat juga tidak sepenuhnya dapat diharapkan menutup seluruh kebutuhan pengeluaran Daerah. Oleh karena itu, pemberian peluang untuk mengenakan obyek baru yang semula diharapkan dapat meningkatkan penerimaan daerah, dalam kenyataannya tidak banyak diharapkan dapat menutupi kekurangan kebutuhan pengeluaran tersebut dan bahkan banyak pungutan Daerah yang mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Oleh sebab itu, untuk mengatasi berbagai kendala di atas, diberlakukannya Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.



Pendapatan Asli Daerah diproyeksikan mengalami kenaikan sebesar 13,55 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp 80.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp424.771.009.033,00 (atau naik sebesar Rp 344.771.009.033,00), Rincian besaran Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak Daerah pada perubahan tahun 2016 diproyeksikan naik sebesar 11,79 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp 27.089.827.440,00 menjadi sebesar Rp 29.323.330.440,00 (atau naik sebesar Rp2.233.503.000,00).

b. Retribusi Daerah

Retribusi Daerah pada perubahan Tahun 2016 diproyeksikan tetap tidak mengalami perubahan yakni sebesar Rp6.447.500.000,00.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada Perubahan Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar Rp1.523.967.661,00 yakni dari sebelumnya sebesar Rp8.000.000.000,00 menjadi sebesar Rp6.476.032.339,00 (atau turun 19,05 persen).

d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah pada perubahan Tahun 2016 mengalami kenaikan sebesar 894,53 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp38.462.672.560,00 menjadi sebesar Rp382.524.146.254,00 (atau naik sebesar Rp 344.061.473.694,00).

3.2.1.2 Dana Perimbangan

Berdasarkan Undang-undang Nomor 34 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, bahwa Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Filosofi dasar otonomi daerah terkait dengan alokasi dana ke daerah dilakukan berdasarkan prinsip *money follows function*. Pada prinsipnya pemerintah daerah memiliki kewenangan membelanjakan dan mempertanggungjawabkan anggaran. Selain itu perubahan tersebut juga



dimaksudkan untuk memperluas cakupan dana yang dialokasikan ke daerah, sesuai dengan kebutuhan untuk mendanai beberapa urusan pemerintahan yang kewenangannya telah diserahkan kepada daerah. Transfer ke daerah terdiri dari Dana Perimbangan berupa Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK), serta Dana Penyesuaian.

DAU merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. DAU yang diluncurkan dari pemerintah ke daerah bertujuan untuk menghindari kesenjangan fiskal antar daerah yang ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang menekankan pada aspek pemerataan dan keadilan yang selaras dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang formula dan perhitungannya ditetapkan sesuai undang-undang, berdasarkan formula dan perhitungan tersebut sesuai tujuannya diharapkan apabila dari tahun ke tahun suatu daerah alokasi DAU-nya menurun, maka daerah tersebut dianggap atau dikategorikan sudah mandiri dalam kemampuan fiskalnya.

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Reformulasi DAK dilakukan dengan: a) penajaman dan perluasan kriteria DAK agar dapat mewujudkan tujuan DAK, yaitu untuk membantu daerah dalam upaya perbaikan dan penyediaan infrastruktur dasar; b) mendorong pengalihan secara bertahap anggaran Kementerian/Lembaga (dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan), yang digunakan untuk melaksanakan urusan daerah ke DAK.

Penerimaan Dana Alokasi Khusus yang diperoleh Kabupaten Kutai Timur, diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah dan mengurangi kesenjangan pelayanan publik antardaerah. Untuk itu DAK diarahkan dengan mempertajam indikator yang diperlukan dalam penyusunan kriteria dan penggunaan DAK. Alokasi DAK diarahkan untuk mendanai bidang-bidang yang menunjang pelayanan dasar masyarakat, seperti peningkatan kualitas infrastruktur, aksesibilitas kualitas pendidikan, dan kesehatan.

Selanjutnya Dana Bagi Hasil adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk



mendana kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Dana bagi hasil bersumber dari pajak dan sumber daya alam.

Dana Perimbangan pada Perubahan RKPD Tahun 2016 diproyeksikan mengalami penurunan sebesar 34,78 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp2.872.336.997.161,00 menjadi sebesar Rp 1.873.275.244.203,00 [atau turun sebesar Rp 999.061.752.958,00]. Penurunan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak pada perubahan RKPD Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 40,89 persen, yaitu dari sebelum perubahan sebesar Rp 2.224.421.284.301,00 turun menjadi sebesar Rp1.314.921.873.299,00 [atau turun sebesar Rp 909.499.411.002,00].

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum pada perubahan RKPD Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 14,49 persen yakni dari sebelum perubahan sebesar Rp548.540.956.000,00 menjadi sebesar Rp469.084.038.904,00 (atau turun sebesar Rp79.456.917.096,00).

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus pada perubahan RKPD Tahun 2016 mengalami penurunan sebesar 10,17 persen yakni proyeksi sebelumnya sebesar Rp99.374.756.860,00 menjadi sebesar Rp89.269.332.000,00 [atau turun sebesar Rp10.105.424.860,00].

Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah Tahun 2016 dapat di lihat pada Tabel 3.2 di bawah ini:



Tabel 3.2
Proyeksi Perubahan Pendapatan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 (dalam rupiah)

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan*	Setelah Perubahan**	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	PENDAPATAN DAERAH				
1.1	Pendapatan Asli Daerah	80.000.000.000,00	424.771.009.033,00	344.771.009.033,00	430,96
1.1.1	Pajak Daerah	27.089.827.440,00	29.323.330.440,00	2.233.503.000,00	8,24
1.1.2	Retribusi Daerah	6.447.500.000,00	6.447.500.000,00	0,00	0,00
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	8.000.000.000,00	6.476.032.339,00	(1.523.967.661,00)	(19,05)
1.1.4	Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah	38.462.672.560,00	382.524.146.254,00	7.643.396.692,00	894,53
1.2	Dana Perimbangan	2.872.336.997.161,00	1.873.275.244.203,00	(999.061.752.958,00)	(34,78)
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	2.224.421.284.301,00	1.314.921.873.299,00	(909.499.411.002,00)	(40,89)
1.2.2	Dana Alokasi Umum	548.540.956.000,00	469.084.038.904,00	(79.456.917.096,00)	(14,49)
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	99.374.756.860,00	89.269.332.000,00	(10.105.424.860,00)	(10,17)
1.3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	624.117.568.000,00	490.535.748.800,00	(133.581.819.200,00)	(21,40)
1.3.1	Hibah	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi	357.473.316.000,00	284.504.391.000,00	(72.968.925.000,00)	(20,41)
1.3.4	Dana Penyesuaian	76.287.976.000,00	43.264.461.800,00	(33.023.514.200,00)	(43,29)
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi	99.172.800.000,00	71.583.420.000,00	(27.589.380.000,00)	(27,82)
1.3.6	Pendapatan Lainnya	91.183.476.000,00	91.183.476.000,00	0,00	0,00
	JUMLAH PENDAPATAN DAERAH	3.576.454.565.161,00	2.788.582.002.036,00	(787.872.563.125,00)	(22,03)

Sumber : Perda APBD TA 2016 Kab. Kutai Timur Tahun 2015

Keterangan: *] Perda APBD TA 2016 Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2015

**] TAPO Kabupaten Kutai Timur



3.2.2 Perubahan Arah Kebijakan Belanja Daerah

Perwujudan pelayanan publik di daerah tentunya berkorelasi erat dengan kebijakan Belanja Daerah. Belanja Daerah merupakan seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai seluruh program/kegiatan yang berdampak langsung maupun tidak langsung terhadap pelayanan publik di daerah.

Konsekuensi dari desentralisasi fiskal yang menitikberatkan pada sisi pengeluaran adalah fleksibilitas kebijakan pengeluaran daerah untuk disesuaikan dengan prioritas dan tujuan daerah masing-masing. Wujud dan implementasi dari kebijakan dan sekaligus operasionalisasi pelaksanaan pengeluaran adalah dengan pelaksanaan Belanja Daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Belanja Daerah akan mempunyai peran riil dalam peningkatan kualitas layanan publik dan sekaligus menjadi stimulus bagi perekonomian daerah apabila terealisasi dengan baik. Dengan demikian, secara ideal seharusnya Belanja Daerah dapat menjadi komponen yang cukup berperan dalam peningkatan akses masyarakat terhadap sumber-sumber daya ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat. Pada gilirannya, apabila kesejahteraan masyarakat telah meningkat maka diharapkan akan berdampak kepada perekonomian daerah secara luas.

Penentuan besaran belanja yang dianggarkan senantiasa berlandaskan pada prinsip disiplin anggaran, yaitu prinsip kemandirian, prioritas, efisiensi dan efektifitas anggaran. Prioritas Belanja Daerah untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.

Perkiraan penurunan realisasi pendapatan negara dari target APBN tahun 2016 dan diiringi dengan komitmen alokasi belanja negara yang masih mengacu pada APBN tahun 2016 mengakibatkan adanya potensi pelebaran defisit anggaran hingga melebihi ambang batas. Sesuai Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, jumlah kumulatif defisit APBN dan APBD dibatasi tidak melebihi 3,0 persen dari produk domestik bruto.

Demikian pula dengan kondisi APBD di Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2016 yang pendapatan daerahnya masih mengandalkan dana perimbangan. Dimana, penurunan harga minyak dan penguatan nilai tukar rupiah berpengaruh terhadap proyeksi realisasi APBN tahun 2016 secara keseluruhan. Pendapatan



negara khususnya penerimaan perpajakan dari sektor migas dan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) sumber daya alam (SDA) migas diperkirakan mengalami penurunan. Tidak tercapainya realisasi penerimaan pajak tahun 2015 sebagai basis perhitungan target penerimaan pajak pada APBN tahun 2016 juga memengaruhi penurunan proyeksi realisasi pendapatan negara tahun 2016. Penurunan tersebut mengakibatkan proyeksi pendapatan daerah Kabupaten Kutai Timur dari dana perimbangan mengalami penurunan proyeksi dari sebelumnya sehingga berimplikasi pada pelebaran defisit anggaran pemerintah daerah yang melebihi ambang batas.

Selain itu, Pemerintah juga menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 125/PMK.07/2016 tentang Penundaan Penyaluran Sebagian Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2016. Berdasarkan PMK ini, pemerintah akan memangkas Rp 19,418 triliun untuk 169 daerah, terdiri dari 143 kota/kabupaten dan 26 provinsi di antara salah satunya yang terkena dampak adalah Kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan hal tersebut di atas, dalam menjaga keseimbangan fiskal daerah, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan kebijakan penyesuaian besaran Belanja Daerah. Selain itu, hal yang paling realistis untuk segera dilakukan adalah melakukan penghematan, terlebih mengingat mayoritas daerah mengandalkan dana transfer dari pusat sebagai sumber pendapatannya. Dalam mempersiapkan langkah penghematan agar berjalan efektif, maka Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) perlu menyusun kriteria penghematan. Selanjutnya, kriteria tersebut akan digunakan oleh para Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk melakukan penghematan di unitnya masing-masing.

Belanja Daerah terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung dengan penjelasan sebagai berikut:

3.2.2.1 Belanja Tidak Langsung

Merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Tidak Langsung Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 meliputi: belanja pegawai, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa, serta belanja tidak terduga. Pada Perubahan RKPD Tahun 2016, peningkatan alokasi terdapat pada belanja pegawai. Sedangkan Belanja Sosial, Belanja Hibah, Belanja Subsidi, Belanja Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga dialokasikan tetap.



3.2.2.2 Belanja Langsung

Belanja Langsung dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Belanja Langsung terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa serta belanja modal.

Belanja Langsung diarahkan untuk dapat mendukung pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Kutai Timur. Belanja harus diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran. Keluaran dari belanja dimaksud seharusnya dapat dinikmati hasilnya oleh masyarakat. Selanjutnya alokasi anggaran perlu dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan, selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan dan dipertanggungjawabkan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Penganggaran Belanja Langsung digunakan untuk pelaksanaan urusan pemerintahan daerah, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Penganggaran belanja langsung dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan, yang manfaat capaian kinerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pemerintah kabupaten kepada kepentingan publik. Selain itu pula, belanja program dan kegiatan pada perubahan RKPD Tahun 2016 diarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan tahun 2016 yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 sebagai masa transisi.

Pemerintah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 menetapkan belanja langsung dan belanja tidak langsung secara proporsional, yakni dengan memprioritaskan belanja untuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat sehingga capaian dua belas (12) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan bisa tercapai. Oleh karena itu, proporsi belanja langsung diharapkan dapat terus ditingkatkan sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur agar sasaran-sasaran pembangunan yang hendak dicapai dapat diwujudkan. Dua belas (12) prioritas pembangunan tahun 2016 diantaranya adalah penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, peningkatan aksesibilitas, dan kualitas pendidikan, peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, peningkatan infrastruktur dasar kawasan permukiman, peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan, peningkatan pembangunan perdesaan, peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat, peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*), peningkatan sarana dan prasarana perhubungan,



pemantapan pemanfaatan penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup, peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi serta pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*).

Proyeksi Perubahan Belanja Daerah Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.3 berikut ini:



Tabel 3.3
Perubahan Belanja Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 (dalam rupiah)

NO	Uraian	Jumlah		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan *)	Setelah Perubahan **)	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	BELANJA DAERAH				
2.1	Belanja Tidak Langsung	1.037.514.391.535,00	1.107.514.391.535,00	70.000.000.000,00	6,75
2.1.1	Belanja Pegawai	712.102.524.000,00	782.102.524.000,00	70.000.000.000,00	9,83
2.1.3	Belanja Subsidi	10.660.853.535,00	10.660.853.535,00	0,00	0,00
2.1.4	Belanja Hibah	58.553.538.000,00	58.553.538.000,00	0,00	0,00
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	0,00	0,00
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa dan Partai Politik	249.697.476.000,00	249.697.476.000,00	0,00	0,00
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	0,00	0,00
2.2	Belanja Langsung	2.922.940.173.626,00	1.681.067.610.501,00	(1.241.872.563.125,00)	(42,49)
2.2.1	Belanja Pegawai	246.207.168.683,00			
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	964.706.468.855,00			
2.2.3	Belanja Modal	1.712.026.536.088,00			
	Belanja Program SKPD		1.681.067.610.501,00		
	JUMLAH BELANJA DAERAH	3.960.454.565.161,00	2.788.582.002.036,00	(1.171.872.563.125,00)	(29,59)

Sumber : Perda APBD TA. 2016 Kab. Kutai Timur Tahun 2015

Keterangan: *) Perda APBD TA. 2016 Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2015

**) TAPD Kabupaten Kutai Timur



3.2.3 Perubahan Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan merupakan transaksi keuangan yang dimaksudkan untuk menutupi selisih antara Pendapatan dan Belanja Daerah. Adapun pembiayaan tersebut bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Pemerintah Pusat membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah, yang bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Perubahan dalam Pembiayaan Daerah dilakukan ketika asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan APBD murni harus direvisi. Ketika besaran realisasi surplus/defisit dalam APBD berjalan berbeda dengan anggaran yang ditetapkan sejak awal tahun anggaran, maka diperlukan penyesuaian dalam anggaran penerimaan pembiayaan, khususnya untuk merevisi penerimaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA).

SiLPA tahun 2016 merupakan SiLPA [Sisa Lebih Pembiayaan] tahun 2015. Oleh karena itu, SiLPA merupakan penerimaan pada awal tahun berjalan. Namun, besaran yang diakui pada saat penyusunan APBD murni masih bersifat taksiran, belum definitif, karena [a] pada akhir tahun lalu tersebut belum seluruh pertanggungjawaban disampaikan oleh SKPD ke BUD dan [b] belum ada audit yang menyatakan bahwa jumlah SiLPA sudah sesuai dengan yang sesungguhnya.

Selisih antara SiLPA dalam APBD tahun 2015 dengan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun 2015 merupakan angka yang menjadi salah satu bahan untuk perubahan anggaran dalam tahun 2016, terutama dalam bentuk penyesuaian untuk belanja. Jika diterapkan konsep anggaran berimbang (penerimaan sama dengan pengeluaran atau SiLPA bernilai nol atau nihil), maka selisih SiLPA akan menyebabkan perubahan alokasi belanja.

Komposisi APBD Kabupaten Kutai Timur tahun 2016 mengalami defisit anggaran namun dapat ditutup dengan pos pembiayaan (penerimaan pembiayaan). Berikut realisasi dan Target/Proyeksi Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dapat dilihat pada Tabel 3.4 di bawah ini :



Tabel 3.4
Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Kutai Timur Tahun 2015 (dalam rupiah)

No	Uraian	Realisasi		Target/Proyeksi	
		Sebelum Perubahan *	Setelah Perubahan **	Rp	%
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3	PEMBIAYAAN DAERAH				
3.1	Penerimaan Pembiayaan	399.000.000.000,00	0,00	(399.000.000.000,00)	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	399.000.000.000,00	0,00	(399.000.000.000,00)	
3.1.2	SILPA Pelampauan Pendapatan	-	-	-	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	
3.2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah	15.000.000.000,00	0,00	(15.000.000.000,00)	
3.2.3	Pembayaran Pokok Utang	-	-	-	
3.2.4	Pembayaran Bunga Pinjaman yang Jatuh Tempo dan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Dana Perimbangan	-	-	-	
3.2.5	Pemberian Pinjaman Daerah	-	-	-	
	PEMBIAYAAN NETTO	384.000.000.000,00	0,00	(384.000.000.000,00)	

Sumber : Perda APBD Kab. Kutai Timur Tahun 2015

Keterangan: *) Perda APBD Kabupaten Kutai Timur Nomor 7 Tahun 2015

***) TAPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016



BAB IV RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH DALAM PERUBAHAN RKPD

4.1 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah

Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Klasifikasi program dan kegiatan dituangkan secara lengkap dalam matrik rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur wajib menerapkan prinsip efisien, efektif, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam pelaksanaan kegiatan guna mencapai sasaran yang tertuang dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016.

Dalam rangka mencapai target sasaran pelaksanaan pembangunan tahun 2016 sebagai masa transisi RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015 dan RPJMD Tahun 2016-2021, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur telah menetapkan tema "*Peningkatan Daya Saing Keunggulan Daerah Berbasis Agribisnis*" dengan menetapkan 12 (dua belas) prioritas pembangunan, yaitu :

1. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran
2. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan
3. Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan
4. Peningkatan infrastruktur dasar kawasan pemukiman
5. Peningkatan ketahanan pangan dan kemandirian pangan
6. Peningkatan pembangunan pedesaan
7. Peningkatan investasi dan ekonomi masyarakat
8. Peningkatan kapasitas pemerintahan (*capacity building*)
9. Peningkatan sarana dan prasarana perhubungan
10. Pemantapan, pemanfaatan, penggunaan dan pengelolaan lahan serta lingkungan hidup
11. Peningkatan dan pengembangan pemanfaatan teknologi informasi
12. Pengelolaan kawasan perbatasan (*hinterland*)



Berdasarkan prioritas pembangunan yang menitikberatkan pembangunan pada pembangunan sumberdaya manusia, agribisnis (pertanian dalam arti luas), infrastruktur serta penunjang lainnya, maka dijabarkan pada 34 Urusan yang terdiri atas :

a). 26 [dua puluh enam] Urusan Wajib, yaitu :

- 1) Pendidikan;
- 2) Kesehatan;
- 3) Pekerjaan Umum;
- 4) Perumahan;
- 5) Penataan Ruang;
- 6) Perencanaan Pembangunan;
- 7) Perhubungan;
- 8) Lingkungan Hidup;
- 9) Pertanahan;
- 10) Kependudukan dan Catatan Sipil;
- 11) Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) KB dan Keluarga Sejahtera
- 13) Sosial;
- 14) Ketenagakerjaan;
- 15) Koperasi dan Usaha Kecil Menengah;
- 16) Penanaman Modal Daerah;
- 17) Kebudayaan;
- 18) Kepemudaan dan Keolahragaan;
- 19) Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri;
- 20) Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Administarsi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian;
- 21) Ketahanan Pangan;
- 22) Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- 23) Statistik;
- 24) Kearsipan;
- 25) Komunikasi dan Informatika;
- 26) Perpustakaan



b). 8 (delapan) Urusan Pilihan, yaitu :

- 1) Pertanian;
- 2) Kehutanan;
- 3) Energi dan Sumberdaya Mineral;
- 4) Pariwisata;
- 5) Kelautan dan Perikanan;
- 6) Perdagangan;
- 7) Perindustrian;
- 8) Ketransmigrasian.

Perubahan Rencana Kerja yang memuat Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah pada Perubahan RKPD Tahun 2016 mengarahkan pada pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan. Berikut matrik Perubahan Rencana Kerja Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD Tahun 2016:



Tabel 5.2
Matrik Rencana Program dan Kegiatan SKPD Pada Perubahan RKPD Tahun 2016
Kabupaten Kutai Timur



BAB V PENUTUP

Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur wajib melaksanakan program dan kegiatan untuk pencapaian target dan sasaran RKPD 2016 dengan melibatkan seluruh unsur lembaga pemerintah, masyarakat dan pemangku kepentingan [*stakeholders*] melalui rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2016. Selanjutnya Perubahan RKPD tahun 2016 merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran (KUPA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun 2016. Selanjutnya berdasarkan KUPA dan P-PPAS yang telah disepakati bersama antara DPRD dengan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur, digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2016.

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 tetap difokuskan pada optimalisasi pencapaian target sasaran indikator kinerja hingga tahun 2016 sebagai masa transisi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Kutai timur tahun 2011-2015 dan tahun 2016-2021, meskipun terjadi penurunan Pendapatan Daerah yang cukup drastis. Selain itu juga diarahkan pada program dan kegiatan yang belum diakomodir dalam RKPD sebelum perubahan tahun 2016.

Selanjutnya dengan berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya, Perubahan RKPD Tahun 2016 adalah sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2016, mengarahkan pada pencapaian arah, tujuan, sasaran dan target prioritas rencana pembangunan tahun 2016 serta mengarahkan pada program dan kegiatan yang belum diakomodasi dalam RKPD (Sebelum Perubahan) tahun 2016.

Pelaksanaan semua kegiatan mensyaratkan pentingnya keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan, baik di antara kegiatan dalam satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing SKPD, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan perubahan RKPD Tahun 2016 sebagaimana berikut:

1. SKPD Kabupaten Kutai Timur berkewajiban melaksanakan program dan kegiatan dalam Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016 dengan sebaik-baiknya dalam rangka sinkronisasi antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan untuk pencapaian sasaran pembangunan yang optimal sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2011-2015;
2. Bila terdapat adanya perubahan, maka SKPD Kabupaten Kutai Timur menyusun Perubahan Rencana Kerja SKPD Tahun 2016;
3. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan Perubahan RKPD Kabupaten Kutai Timur Tahun 2016, Badan Perencanaan Pembangunan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program maupun kegiatan pembangunan tahun 2015.
4. Pada akhir tahun anggaran 2016 setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus melakukan evaluasi kinerja pelaksanaan RKPD dan perubahan RKPD Tahun 2016.

BUPATI KUTAI TIMUR,

H. ISMINANDAR

	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Kasmidi Bulang, ST., MM	Wakil Bupati	A
2.	Ir. Hj. Yulianti	Plt. Sekda	
3.	Drs. H. Syafruddin, MAP	Ass. I	Y
4.	Nora Ramadani, SH., MH	Pit. Kabeg Hukum	b
5.	Ir. Suprihanto, CES	Kepala Bappeda	N